



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan semua jenis bangunan gedung harus mempertimbangkan kondisi geologis dan topografis yang aman bagi bangunan gedung di dalam tanah berdasarkan studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah merupakan faktor penunjang dalam pemberian pelayanan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, cermat, dan akuntabel;
- c. bahwa regulasi tentang studi kelayakan rencana percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah merupakan alas hukum penunjang dalam melaksanakan segala kegiatan dalam proses pembangunan pusat pemerintahan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Studi Kelayakan Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran negara Republik indonesia Nomor 26 tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam rangka pembangunan kawasan pusat pemerintahan Daerah.

BAB II STUDI KELAYAKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pembangunan kawasan pusat pemerintahan, Pemerintah Daerah melaksanakan studi kelayakan yang bertujuan:
 - a. untuk menilai kelayakan pembangunan;
 - b. memitigasi potensi bencana; dan
 - c. meminimalisasi kerugian investasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan;
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan.
- (3) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3...../4

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 12 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN TANAH

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Letak geografis negara kesatuan RI selain memberikan keberagaman dan kekayaan luarbiasa bagi Indonesia, namun kondisi ini juga memberikan dampak negative terhadap pemerataan pembangunan. Banyaknya kepulauan dan luasnya lautan yang memisahkan kepulauan Indonesia menyebabkan sulit dan besarnya biaya pembangunan. Sebagai upaya pelaksanaan UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur, pemerintah terus berupaya membangun diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya bertumpu di salah satu pulau saja. Tidak meratanya pembangunan dapat menyebabkan kesenjangan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang padaakhirnya dapat menyebabkan perpecahan.

Untuk itu dalam upaya pemerataan pembangunan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemecahan wilayah dari mulai tingkat desa hingga provinsi. Tujuannya adalah dengan memperkecil luas wilayah akan meningkatkan mutu pelayanan publik dan jangkauan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dengan pemekaran provinsi atau kabupaten akan memicu aktivitas pemerintahan dan aktivitas social ekonomi. Hal ini tentunya akan meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu tentunya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan akan menjadi pendorong pertumbuhanekonomi dan perputaran siklus ekonomi. Hal ini lah yang melatarbelakangi pemekaran provinsi di wilayah Papua dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi.

Provinsi Papua Tengah adalah salah satu Danalieraerah Otonomi Baru di tanah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah Perlu melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan penyiapan sarana dan prasarana Pemerintahan. Atas pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pendukung lainnya, maka tahap awal dalam pengadaan tanah adalah penyusunan studi

kelayakan sebagai dasar penyusunan DPPT perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dengan penyusunan Studi Kelayakan dan DPPT yang baik dilengkapi dengan data awal yang baik diharapkan proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat berlajalan lancar dan baik.

1.2. MAKSUD RENCANA PEMBANGUNAN

Maksud penyusunan dokumen Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah adalah melakukan kajian secara komprehensif terhadap dampak pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah terhadap Negara dan masyarakat baik dampak positif maupun negatif dari aspek tata pemerintahan, tata ruang, aspek ekonomi, sosial dan budaya.

1.3. TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

Tersusunnya dokumen studi kelayakan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang akan digunakan sebagai dasar Penetapan Lokasi oleh Gubernur Papua Tengah.

1.4. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- 5) Undang-Undang No. 15 tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah.

BAB II KESESUAIAN TATA RUANG WILAYAH

2.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didukung sektor pertanian, perdagangan, jasa, pertambangan dan sektor-sektor lainnya yang berbasis mitigasi bencana dan lingkungan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa perdagangan skala regional sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung;
- d. peningkatan mitigasi bencana pada kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi;
- e. pengembangan dan optimalisasi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, dan kawasan budidaya lainnya serta kawasan pertambangan secara berkelanjutan;
- f. pengembangan kawasan strategis sesuai penetapan dan sudut kepentingannya; dan
- g. pengembangan/peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Lokasi Rencana Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah berada di Distrik Wanggar, Distrik Wanggar sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, sebagai system pemerintahan dan perkotaan :

Kawasan Strategis Kabupaten

(1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan Perkotaan Nabire di Distrik Nabire;
- b. Kawasan Perkotaan Unipo di Distrik Siriwo;
- c. Kawasan Perkotaan Topo di Distrik Uwapa;
- d. Kawasan Agropolitan Wanggar di Distrik Wanggar;
- e. Kawasan Agropolitan Lagari di Distrik Makimi;
- f. Kawasan Wisata Bahari di Distrik Kepulauan Moora; dan
- g. Kawasan Pusat Pemerintahan di Distrik Wanggar.

(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdapat di Distrik Teluk Umar, Distrik Yaur, Distrik Teluk Kimi, Distrik Kepulauan Moora, Distrik Siriwo, dan Distrik Uwapa.

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup.

- (5) Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Distrik Yaur dan Distrik Teluk Umar.

Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perkampungan.

Sistem Perkotaan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp); dan
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

(1) PKW yaitu perkotaan Nabire.

(2) PKL sebagaimana terdiri atas:

- a. perkotaan Topo di Distrik Uwapa; dan
- b. perkotaan Karadiri di Distrik Wanggar;

(3) PKLp yaitu perkotaan Lagari Jaya di Distrik Makimi.

(4) PPK terdiri atas:

- a. perkotaan Kwatisore di Distrik Yaur;
- b. perkotaan Napan di Distrik Napan;
- c. perkotaan Samabusa di Distrik Teluk Kimi;
- d. perkotaan Bumi Raya di Distrik Nabire Barat;
- e. perkotaan Yeretuar di Distrik Teluk Umar;
- f. perkotaan Kamarisano di Distrik Wapoga;
- g. perkotaan Unipo di Distrik Siriwo;
- h. perkotaan Yaro Makmur di Distrik Yaro;
- i. perkotaan Dikia di Distrik Dipa;
- j. perkotaan Lokodimi di Distrik Menou; dan
- k. perkotaan Arui di Distrik Kepulauan Moora.

- (5) PKL, PKLp, dan PPK diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

- (6) Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Indikasi Sumber Dana
			Pemuda dan Olahraga	
b.	pengembangan sistem informasi/promosi pariwisata daerah	Kabupaten Nabire	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
c.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata			
2.9	Kawasan Peruntukan Permukiman			
a.	Penyusunan Studi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPDIP)	Kabupaten Nabire	Bappeda, Dinas PU	APBD Kab, sumber lain yang sah
b.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)			
b.	Pengembangan dan penataan kawasan permukiman			
c.	Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang permukiman			
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)			
1	Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi			
a.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis	a. Kawasan Perkotaan Nabire di Distrik Nabire;	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum	APBN, APBD Prov, APBD Kab, sumber lain yang sah
b.	Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis	b. Kawasan Agropolitan Wanggar di Distrik Wanggar;		
c.	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis	c. Kawasan Wisata Bahari di Distrik Kepulauan Moora;		
d.	Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan	d. Kawasan Pusat Pemerintahan di Distrik Wanggar;		
		e. Kawasan Perkotaan Unipo di Distrik Siriwo		
		f. Kawasan Perkotaan Topo di Distrik Uwapa		
		g. Kawasan Agropolitan Legari		

Sebagai Kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, berikut system pendukung untuk hal tersebut:

Sistem Jaringan Transportasi Darat Jalan Nasional terdiri atas:

a. Jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi:

1. Bedudipa – Batas Kota Nabire;
2. Jln. Jend. Sudirman (Nabire);
3. Jln. Perintis (Nabire);
4. Batas Kota Nabire – Wanggar;
5. Jln. Trikora (Nabire);
6. Jln. Siliwangi (Nabire);
7. Jln. Kristina Marta Tiahahu (Nabire);
8. Wanggar – Kwatisore (Batas Provinsi Papua Barat); dan
9. Lagari-Wapoga (Batas Kabupaten Waropen).

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) meliputi:

1. Batas Kota Nabire – Kimibay;
2. Jln. Sisingamangaraja (Nabire);
3. Jln. Yos Sudarso (Nabire);
4. Jln. R.E. Martadinata (Nabire);
5. Kimibay – Legare; dan
6. Lagari-Siriwo-Topo-Yaro.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpul;

- b. pelabuhan pengumpan;
- c. pelabuhan khusus;
- d. pelabuhan lokal; dan
- e. alur pelayaran.

(1) Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Samabusa di Distrik Teluk Kimi.

(2) Pelabuhan pengumpan terdiri atas:

- a. pelabuhan Pulau Moor di Distrik Kepulauan Moora;
- b. pelabuhan Pulau Mambor di Kepulauan Moora;
- c. pelabuhan Napan di Distrik Napan; dan
- d. pelabuhan Kwatisore di Distrik Yaur.

(3) Pelabuhan khusus terdiri atas:

- a. pembangunan pelabuhan kelapa sawit di Distrik Yaro;
- b. pembangunan pelabuhan plywood di Distrik Yaro;
- c. pembangunan pelabuhan logistik Pertamina di Nabarua, Distrik Nabire;
- d. pembangunan pelabuhan logistik PLN di Kalibobo, Distrik Nabire;
- e. pembangunan pelabuhan logging di Distrik Wanggar;
- f. pembangunan pelabuhan logging di Distrik Teluk Kimi; dan
- g. pembangunan pelabuhan logging di Distrik Makimi

(4) Pelabuhan lokal terdiri atas:

- a. pembangunan pelabuhan lokal di Distrik Teluk Umar; dan
- b. pembangunan pelabuhan lokal Samabusa di Distrik Teluk Kimi;

(5) Alur pelayaran terdiri atas:

- a. Nabire – Wasior – Manokwari; dan
- b. Nabire – Waren – Serui – Biak.

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas:

- a. tatanan kebandar-udaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan

(1) Tatanan kebandarudaraan meliputi:

- a. bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar; dan
- b. bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Nabire di Distrik Nabire.

(2) Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandarudara.

Jaringan prasarana air baku untuk air bersih

Jaringan prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas:

- a. peningkatan pelayanan air bersih;
- b. Bendungan Kalibumi di Distrik Nabire Barat;
- c. Bendung Biha di Distrik Makimi;
- d. Bendung Maidey di Distrik Makimi;
- e. Bendung Nuhoa di Distrik Makimi;
- f. Bendung Manunggal Jaya di Distrik Makimi;
- g. Bendung Wanggar di Distrik Wanggar;
- h. Bendung Sungai Lagari di Distrik Makimi;
- i. Bendung Kali Topo SP 4 Topo di Distrik Uwapa;
- j. Bendung Sungai Yaro SP 1 di Distrik Yaro;
- k. Bendung Kaladiri 1 di Distrik Wanggar; dan

1. Bendung Sungai Wami di Distrik Yaur.

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem pengelolaan limbah; dan
- c. sistem jaringan drainase.

Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas:

- a. pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- b. pola komunal konvensional dengan cara melakukan pengelolaan sampah yang terdiri atas pengumpulan secara kolektif dari sumber sampah ke tempat pembuangan;
- c. pola komunal dengan sistem mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang dengan cara melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga maupun di Tempat Penampungan Sementara serta melakukan pengolahan dan daur ulangsampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikembangkan di Wanggar Makmur, Distrik Wanggar dan Samabusa di Distrik Teluk Kimi dengan menggunakan metode Controlled Landfill;

- a. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikaji melalui penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten dan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangundangan terkait.
- b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 1. TPST Distrik Nabire;
 2. TPST Distrik Nabire Barat;
 3. TPST Distrik Wanggar; dan
 4. TPST Distrik Teluk Kimi.
- c. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
 1. TPS Distrik Nabire;
 2. TPS Distrik Nabire Barat;
 3. TPS Distrik Wanggar; dan
 4. TPS Distrik Teluk Kimi.
- d. Pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis masyarakat dengan cara 3R (reduce, reuse, dan recycle) secara terpadu dan mandiri.

Sistem pengelolaan air limbah terdiri atas:

- a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan pipanisasi dari sumber dikembangkan di kawasan Wanggar Makmur di Distrik Wanggar dan Samabusa di Distrik Teluk Kimi;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah dikembangkan di kawasan industri, rumah sakit, dan kawasan lain yang menghasilkan limbah cair.
- c. pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah permukiman perkotaan meliputi:
 1. Distrik Nabire;
 2. Distrik Nabire Barat;
 3. Distrik Wanggar;

4. Distrik Teluk Kimi;
5. Distrik Makimi;
6. Distrik Yaro;
7. Distrik Uwapa;
8. Distrik Napan; dan
9. Distrik Siriwo.

Selain sistem pendukung untuk kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, harus diperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi kendala atau potensi permasalahan :

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir; dan
- b. kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

a. WS Omba terdiri atas:

1. DAS Ayayege di Distrik Yaur;
2. DAS Bawei di Distrik Teluk Umar;
3. DAS Kamorawa di Distrik Yaur;
4. DAS Nanggubi di Distrik Teluk Umar;
5. DAS Sieba di Distrik Yaur;
6. DAS Waabu di Distrik Yaur;
7. DAS Wami mencakup Distrik Menou, Distrik Yaro, dan Distrik Yaur;
8. DAS Waroromi di Distrik Yaur;
9. DAS Watori di Distrik Teluk Umar; dan
10. DAS Yaratua di Distrik Teluk Umar.

b. WS Wapoga – Mimika terdiri atas:

1. DAS Awaar di Distrik Kepulauan Moora;
2. DAS Kimbo mencakup Distrik Makimi dan Distrik Teluk Kimi;
3. DAS Kimi mencakup Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi;
4. DAS Lagari di Distrik Makimi;
5. DAS Musairo di Distrik Makimi;
6. DAS Nabire mencakup Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Uwapa, dan Distrik Wanggar;
7. DAS Napan mencakup Distrik Makimi dan Distrik Napan;
8. DAS Olifants di Distrik Wapoga;
9. DAS Siriwo mencakup Distrik Dipa, Distrik Makimi, Distrik Siriwo, dan Distrik Uwapa;
10. DAS Utama di Distrik Kepulauan Moora;
11. DAS Wanggar mencakup Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, dan Distrik Yaro;
12. DAS Wesara mencakup Distrik Makimi dan Distrik Napan; dan
13. DAS Yuwar mencakup Distrik Makimi, Distrik Napan dan Distrik Wapoga.

(3) Kawasan rawan tanah longsor tersebar di Distrik Menou, Distrik Dipa, Distrik Siriwo, Distrik Uwapa, Distrik Yaro, Distrik Yaur, Distrik Nabire Barat, Distrik

Nabire, Distrik Makimi, dan Distrik Teluk Kimi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, yaitu:

Kawasan Lindung Geologi, terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:

- a. kawasan rawan tsunami di pesisir pantai utara Kabupaten; dan
- b. kawasan rawan gempa bumi tersebar di Distrik Nabire, Distrik Wanggar, Distrik Makimi, dan Distrik Yaro.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi :

- a. CAT Agamanan di Distrik Yaur dan Distrik Yaro;
- b. CAT Warem-Demta di Distrik Napan dan Distrik Wapoga;
- c. CAT Nabire di Distrik Wanggar, Distrik Nabire Barat, Distrik Nabire, Distrik Teluk Kimi;
- d. CAT Lagari di Distrik Makimi; dan
- e. CAT Ulawa di Distrik Uwapa.

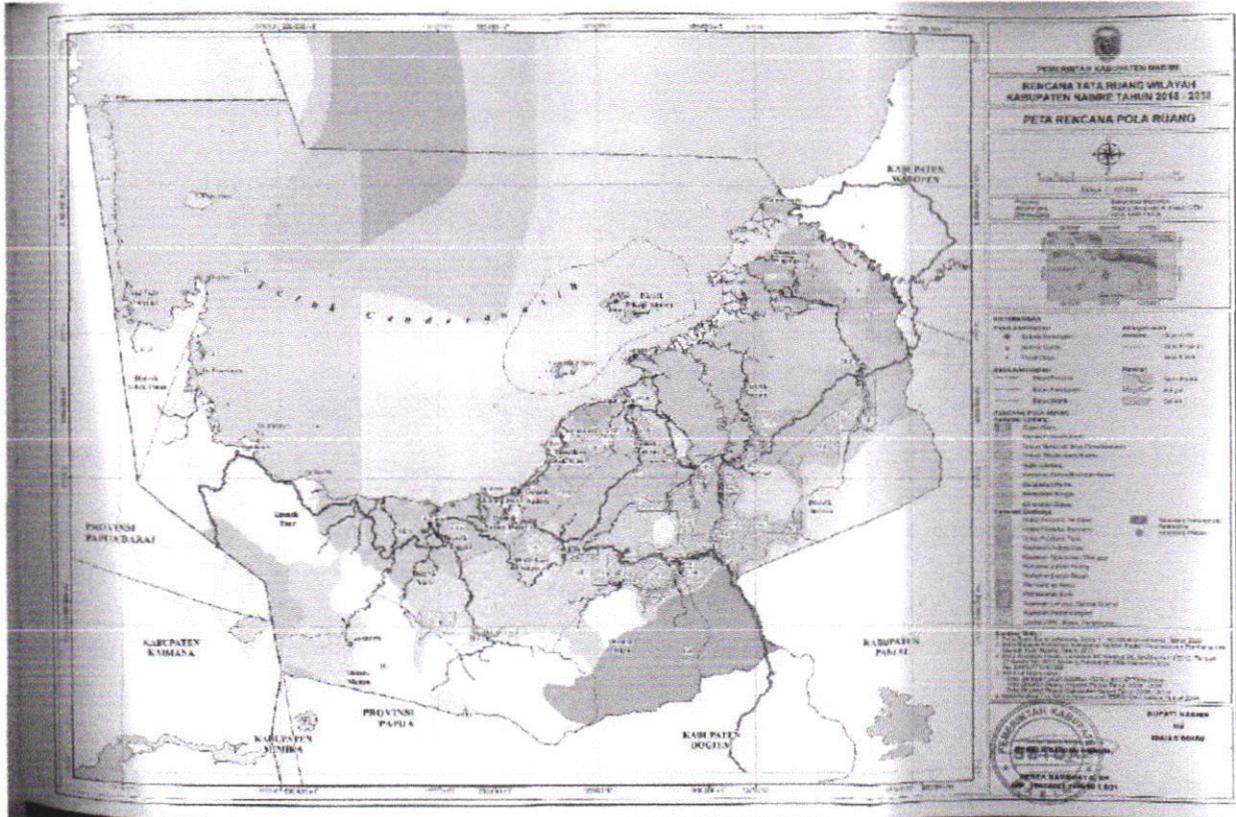
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- a. Hutan Produksi tetap (HP);
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
- c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan Produksi tetap (HP) dengan luas kurang lebih 160.100 (seratus enam puluh ribu seratus) hektar tersebar di Distrik Makimi, Distrik Napan, Distrik Siriwo, Distrik Teluk Kimi, Distrik Uwapa, Distrik Wapoga, Distrik Yaro, Distrik Yaur, dan Distrik Kepulauan Moora.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 332.900 (tiga ratus tiga puluh duaribu sembilan ratus) hektar tersebar di Distrik Dipa,



Distrik Makimi, Distrik Menou, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Napan, Distrik Siriwo, Distrik Teluk Umar, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Wapoga, Distrik Yaro, Distrik Yaur, dan Distrik Kepulauan Moora.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas kurang lebih 92.902 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua) hektar tersebar di Distrik Makimi, Distrik Menou, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Napan, Distrik Teluk Kimi, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Wapoga, Distrik Yaro, dan Distrik Yaur.

Berdasarkan hasil plot titik koordinat terhadap pola ruang Kabupaten Nabire bahwa lokasi yang dimaksud merupakan agriopolitan yang berada di Distrik Wanggar sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Nabire Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038

Berkaitan dengan hal tersebut, rekomendasi ini diberikan dengan mengacu pada ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, bahwa kegiatan tersebut diperbolehkan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas terhadap Kesesuaian Kegiatan Penanfaatan Ruang (KKPR) terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Nabire melalui surat No.600/109/DPUPR/2023 tanggal 14 Juni 2023 merekomendasikan lokasi sesuai dengan koordinat yang dimaksud untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Republik Indonesia sebagai Negara berkembang hingga saat ini masih tetap melanjutkan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah melakukan pembangunan berbagai infrastruktur di suatu wilayah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan untuk membuka keterisolasian di suatu wilayah.

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan Ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangkan ketimpangan antarwilayah.

Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan on grid dan off grid untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk multi-purpose dan irigasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, Internet of Things (IoT) maupun artificial intelligence (AI).

Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah.

Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

2.2.1 Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas jalan tidak hanya mendukung mobilitas manusia, tetapi juga sistem logistik nasional. Pembangunan jalan tol penting untuk menghubungkan kawasan industri dengan simpul-simpul transportasi, sehingga mendukung berkembangnya industri dan distribusi barang yang dihasilkan. Selain itu, perlu untuk mewujudkan konektivitas jalan utama yang memadai, dengan melihat keterhubungan jalan tol dengan non-tol yang telah terbangun. Salah satu contoh isu perlunya pengembangan jalan utama yaitu memaksimalkan fungsi jalan Trans Papua sepanjang 4.330 Km sehingga dapat mendorong mobilitas manusia, menurunkan biaya transportasi yang selama ini menggunakan moda pesawat, serta mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan baru.

Jaringan jalan sebagai pendukung utama sistem logistik nasional, mengalami ketimpangan dari aspek kualitas dan kapasitas antara jalan nasional dengan jalan daerah (jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota). Jalan nasional dengan total panjang 47.017 Km memiliki kondisi mantap sebesar 94 persen.

Sementara itu, jalan daerah yang mencapai lebih dari 400.000 Km, memiliki kondisikemantapan sebesar 67 persen untuk jalan provinsi, dan 57 persen untuk jalan kabupaten/kota. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang efektifnya konektivitas nasional. Jalan daerah dengan proporsi lebih dari 90 persen dari seluruh jaringan jalan yang ada, memiliki peran penting pada konektivitas antar daerah. Namun demikian, kondisi jalan daerah masih sangat rendah baik dari aspek kualitas maupun kapasitasnya. Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah daerah menjadi hambatan dalam pengelolaan jaringan jalan di daerah. Hal tersebut diperparah oleh tidak adanya standar yang jelas, terbatasnya kemampuan SDM, serta lemahnya pembinaan penyelenggaraan jalan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Keterhubungan jaringan jalan dengan kawasan-kawasan prioritas serta simpul transportasi menjadi tantangan dari aspek pemenuhannya. Keterbatasan kewenangan pemerintah pusat

Untuk menangani jalan-jalan yang bukan berstatus nasional, memerlukan terobosan payung kebijakan dan dukungan pendanaan inovatif dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur terbangun merupakan isu strategis dalam pengembangan konektivitas jalan dan wilayah.

2.2.2 Infrastruktur Jalan Perkotaan

Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai, akan mendorong kelancaran usaha pekerjaan masyarakat karena mudahnya akses sehingga dapat menambah tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan terbatasnya ketersediaan jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan.

Hal tersebut, sering kali mengakibatkan kemacetan kronis dan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan akibat polusi yang ditimbulkan. Sebagai contoh adalah rasio panjang jalan di Jakarta dengan luas wilayah hanya sebesar 6 persen, sementara angka minimal pembangunan jalan di kota-kota di dunia mencapai 15 persen. Kondisi ini juga diperparah dengan sistem drainase perkotaan yang buruk, kualitas jalan yang dibawah standar, masih banyaknya perlintasan sebidang dengan jalur KA, serta banyaknya kegiatan samping jalan sering kali menimbulkan konflik sosial, hingga menghambat arus lalu lintas. Pembangunan flyover/underpass sering kali terhambat oleh penyediaan lahan serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur diantaranya arah kebijakan dan strategi Infrastruktur Ekonomi di bidang Konektivitas Transportasi Jalan dalam rangka

memperkuat konektivitas transportasi jalan adalah:

- 1) membangun jaringan jalan tol di koridor utama logistik;
- 2) membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN), termasuk wilayah KKM dan KKJSM di Madura;
- 3) membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
- 4) preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung, melalui integrasi jaringan jalan tol dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, integrasi jaringan jalan dengan simpul transportasi, pembangunan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan daerah tertinggal, serta pemeliharaan jalan nasional dengan pendekatan koridor;
- 5) meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota);
- 6) menyelesaikan pembangunan jalan akses dan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua, serta wilayah 3T;
- 7) Sinkronisasi penanganan jalan nasional dan daerah di wilayah 3T, melalui penyelesaian pembangunan jalan akses dan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua; memperkuat akses jalan penghubung lintas dari wilayah 3T ke daerah yang lebih maju (Contoh: BengkuluSumsel); serta peningkatan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota) melalui dukungan pendanaan DAK Bidang Jalan dan memperluas pelaksanaan skemapendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola dalam pemeliharaan jalan daerah.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah:

- 1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistic; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan;
- 2) Mengurangi *bottleneck* pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Staf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkunjung ke Papua untuk meninjau kesiapan pelaksanaan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Rencana aksi dua tahun itu satu dari lima tahapan pelaksanaan rencana induk percepatan pembangunan sesuai amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk 20 tahun ke depan.

Jadi 20 tahun dibagi dalam lima tahap. Tahap satu dua tahun, tahap 2, 3, dan 4 ada yang empat dan lima tahunan, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang tahap akhir dua tahun

lagi. Yang hari ini kita bicara adalah yang 2023-2024. Ini disusun bersama dengan pemerintah daerah.

Diskusi dengan sejumlah pemerintah provinsi itu untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga pendanaan yang bersumber dari Otsus, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa (DD) bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Pada rencana ini telah terbentuk badan pengarah yang siap melakukan sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Sebagai Provinsi yang baru terbentuk beberapa bulan, Provinsi Papua Tengah saat ini belum memiliki RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), namun kami Menyusun dari berbagai sumber kaitannya dengan rencana pembangunan di Papua tengah, sebagai berikut: 7 Hal Fundamental Papua Tengah. Ada beberapa tantangan dan sekaligus harapan bersama yang sejalan dengan visidan misi kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Tujuh hal yang disampaikan Bupati Nabire:

1. Pertama, jaminan stabilitas keamanan daerah. Hal ini diwujudkan dengan menjaga keragaman suku, ras dan agama yang ada di Nabire dan di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. Semua aktivitas pemerintahan dan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila daerah aman. Mari kita bersatu dan membangun Provinsi Papua Tengah dalam keadaan aman dan penuh persaudaraan tanpa membedakan suku, ras dan agama.
2. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan masyarakat asli Papua serta ekspansi dan penguasaan sumber daya alam oleh korporasi harus dengan sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat pemilik hak ulayat serta tetap dengan menjung-junjung tinggi kepemilikan adat serta kelestarian lingkungan. Dengan adanya Provinsi Papua Tengah ini, tentu juga akan banyak membuka lapangan kerja di wilayah ini, termasuk para investor pasti akan masuk. Jika masyarakat Papua menuntut adanya keberpihakan, maka ini kesempatan. Karena Sidang Paripurna DPR RI telah membahas hal itu bahwa prioritas pada orang asli Papua yakni 80% OAP. Hal ini bukan berarti bahwa dengan adanya regulasi keberpihakan maka orang asli Papua secara otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Bagi yang memiliki lokasi tanah, mulai berkebun, mulai beternak, buka bengkel, jual-jual es atau bensin, atau buat pencucian motor, jangan menjadi penonton.
3. Ketiga, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kabupaten Nabire ke depan diharapkan menjadi pusat pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan diperlukan pembenahan secara serius RSUD Nabire sebagai pusat rujukan dan RSUD dari kabupaten-kabupaten lainnya. Di bidang kesehatan, penanganan HIV/AIDS secara kolaboratif adalah juga utama dan mendesak karena jumlah HIV terus meningkat di wilayah ini. Di bidang pendidikan, konsentrasi pada perbaikan layanan pendidikan dasar dan pendidikan di wilayah terisolir dan bagi suku-suku terasing. Kehadiran perguruan tinggi Negeri dengan fasilitas dan tenaga yang memadai adalah juga kebutuhan untuk mempersiapkan SDM Papua tengah di masa depan dan dukungan

pada universitas swasta yang telah ada di saat ini.

4. Keempat, konektivitas daerah baik dari infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Hal ini penting dalam rangka mendekatkan masyarakat pada layanan-layanan dasar pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan akses informasi dan komunikasi.
5. Kelima, minimalisasi marginalisasi terhadap orang asli Papua dengan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor, yakni pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik serta sektor swasta diupayakan sebesar-besarnya bagi masyarakat asli Papua. Hal ini penting agar tidak terjadi marginalisasi terhadap orang asli Papua.
6. Keenam, perbaikan sumber daya aparatur, sumber daya masyarakat, sumber daya organisasi perangkat, sarana dan prasarana dasar sehingga membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik (tidak dipenuhi dengan praktek KKN).
7. Ketujuh, harapan kita bersama bahwa kehadiran Provinsi Papua Tengah ini dapat memperkuat kohesi sosial dan politik masyarakat dan memperkuat empat pilar bangsa serta terbangun hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Bupati Nabire juga mengungkapkan bahwa dalam pembangunan Papua Tengah diharapkan terjadi perbaikan Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar sehingga membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik sehingga terwujud tujuan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Dalam konteks ketahanan nasional, lebih melihat peluang untuk menciptakan kohesi sosial dan politik masyarakat dan memperkuat empat pilar bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI ketimbang mengedepankan pendekatan keamanan.

1. Pertama, aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mudah tersalur.
2. Kedua, dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah agar terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
3. Ketiga, menyediakan jangkauan dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur.
4. Keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tengah Papua melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
5. Kelima, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.
6. Keenam, semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat dan memperkuat empat pilar bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Terjadi hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
7. Ketujuh, perbaikan Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar sehingga membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik (tidak dipenuhi dengan praktek KKN).

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN NABIRE

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 Kabupaten Nabire, sejumlah hal utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Nabire ke depan.

- a. Pertama, berkenaan dengan misi utama, yakni stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal utama.
- b. Kedua, berkenaan dengan peningkatan prekonomian di Kabupaten Nabire. Nabire memiliki potensi besar, baik perikanan, pertanian, pertambangan, dan lainnya. Maka dibagi tiga zona pemberdayaan prekonomian masyarakat. Tiga zona ini memiliki potensi kekayaan alam yang berbeda dan karakter masyarakat juga berbeda, yaitu zona pesisir dan kepulauan, zona perkotaan dan dataran rendah, serta zona lereng gunung/pegunungan.
- c. Ketiga, sektor pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dimaksimalkan ke depan.
- d. Keempat, penggunaan dana desa. Tolak ukur kemajuan kabupaten itu sebenarnya adalah kemajuan kampung dari semua aspek. Jadi, agar dana desa dikawal dengan baik agar dipergunakan sesuai dengan juknis dan sesuai dengan kondisi di kampung dan sejalan dengan visi dan misi. Dinas terkait dapat fasilitas kampung untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan zona pembangunan.

Sementara itu, ada 6 hal yang menjadi acuan dalam Musrenbang rkpdp tahun 2024 antara lain :

1. Program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang akan tercantum dalam RPJMD kabupaten nabire tahun 2021 – 2026.
2. RKPD tahun 2024 merupakan landasan kerja bagi perangkat daerah tahun 2024 yang tercantum dalam rencana kerja (renja) perangkat daerah dan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen rencana strategis (Renstra) perangkat daerah. Untuk itu perangkat daerah harus merencanakan program dan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan daerah dan bukan berdasarkan keinginan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
3. Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan harus sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu antara perencanaan dan penganggaran, menghindari terjadinya duplikasi program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta kebijakan penganggaran belanja yang lebih menekankan pada prinsip penganggaran mengikuti program prioritas dan bukan lagi penganggaran mengikuti fungsi.
4. Perencanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana pada APBD tahun anggaran 2024.
5. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan harus memperhatikan

amanat uu otonomi khusus yang berfokus pada keberpihakan orang asli papua secara khusus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Nabire. perencanaan difokuskan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan infrastruktur kampung yang di dukung dengan pembukaan wilayah terisolir untuk mendorong aksesibilitas pembangunan dengan tetap memperhatikan penataan ruang wilayah dan kesinambungan kelestarian lingkungan hidup.

6. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan harus mampu mendorong prakarsa masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dan lingkungannya guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat seperti keterisolasian, pengangguran, kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan dan lainnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan, 6 hal tersebut, perlu diintegrasikan secara terarah, terukur dan sistematis serta berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan tahun 2024 dapat didiskusikan, dikritisi secara konstruktif dan komprehensif sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang rasional dan realistis sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. untuk itu segenap peserta diharapkan dapat berperan untuk memberikan saran dan masukannya demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III ASPEK SOSIAL EKONOMI

3.1. ANALISIS SOSIAL WILAYAH TERDAMPAK

3.1.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Papua Tengah

Papua Tengah adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB) di Pulau Papua, Indonesia. Dimekarkan dari provinsi Papua dan diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2022. Ibukota Provinsi Papua Tengah berada di Nabire. Nabire menjadi daerah yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang tol laut bagi kabupaten lainnya yang ada di wilayah Mee Pago. Provinsi Papua Tengah terdiri dari delapan kabupaten, yakni meliputi wilayah administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

Sementara itu, luas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah 66.129 kilometer persegi. Provinsi Papua Tengah mencakup wilayah adat Mee Pago yang merujuk pada Suku Mee. Suku Mee adalah suku yang mendiami kawasan pegunungan tengah, di bagian barat. Wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.

Batas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah:

- Bagian Utara: Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan TelukCenderawasih.
- Bagian Timur: Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Asmat.
- Bagian Selatan: Laut Aru.
- Bagian Barat: Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

3.1.2. Suku di Provinsi Papua Tengah

Provinsi Papua Tengah mencakup wilayah adat Mee Pago yang merujuk pada Suku Mee. Suku Mee adalah suku yang mendiami kawasan pegunungan tengah, di bagian barat. Mee berarti orang-orang yang telah dipenuhi dengan akal budi yang sehat, dapat berpikir secara logis, dapat membedakan suku ini dari suku yang lain, dapat membedakan barang miliknya dengan milik orang lain, daerah garapannya dengan garapan milik orang lain, dan dapat mentaati amanat-amanat yang diwariskan oleh leluhur.

Wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika. Suku Mee mempercayai Ugatame yang menciptakan dunia dari 5 unsur, yakni roh, manusia, binatang, tumbuhan, dan benda benda tak berjiwa. Pola perkampungan masyarakat Mee tinggal dalam desa yang berdekatan satu sama lain membentuk suatu federasi yang dipimpin oleh salah seorang Tonowi

Mayoritas Suku Mee memusatkan sistem pencaharian mereka dengan bertani dan beternak. Namun, ada juga kegiatan lainnya seperti di bidang perikanan dan perdagangan.

Sedangkan dilokasi rencana pembangunan yaitu kabupaten Nabire dihuni oleh suku- suku di pesisir yang termasuk kedalam wilayah adat Saireri, diantaranya suku Wate, Mora, Yaur, Umari, Gwoa), dan Yerisiam. Yaur atau

Jaur adalah sebuah bahasa yang termasuk kedalam dalam rumpun bahasa cenderawasih (Teluk Geelvink) cabang dari keluarga Austronesia yang dituturkan di Propinsi Papua Tengah, Indonesia. Bahasa ini memiliki sekitar 300 penutur.

Nabire dahulu merupakan kota tertua dengan wilayah yang luas dan jumlah masyarakat sedikit. Dari Nabire pulalah kemudian dimekarkan beberapa wilayah seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, sampai ke puncak, Puncak Jaya. Dahulu Paniai adalah sebagai pusat pemerintahan. Masyarakat asli terutama berada di pesisir dan bekerja sebagai nelayan sekaligus sebagai ciri khasnya. Sedangkan masyarakat Distrik Wanggar umumnya sudah mengalami percampuran (masyarakat majemuk) dimana di distrik ini terdapat lokasi transmigrasi dan masyarakat pendatang lainnya.

Nabire berasal dari kata "Nawi". Pada zaman dahulu dipertimbangkan dengan kondisi alam nabire yang saat itu banyak binatang Jangkrik terutama di sepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata Nawi berubah penyebutannya menjadi Nawire dan akhirnya Nabire. Terdapat 6 (enam) suku ;

- Wate; Tanah besar di pesisir
- Gwoa Napan; berbatasan dengan Waropen (Pesisir)
- Mora; Kepulauan Harlem
- Yeresiam; Daerah Pesisir Barat
- Hegure; Daerah Pesisir Barat (Yaur)
- Umari; Berbatasan dengan Wasior

Ulasan detail tentang budaya di Nabire akan diulas dalam Bab 5 laporan ini. Namun berdasarkan wawancara dengan kepala suku dan sosialisasi rencana pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang berada di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dimana disekitar lokasi pembangunan yang berdampak langsung atas rencana pembangunan adalah suku Wate, dimana sebagian besar lahan yang akan dibebaskan merupakan lahan milik suku Wate dan surat pelepasan hak dari suku Wate.

3.2. GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

3.2.1. Kabupaten Nabire

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Nabire terletak antara 134°35' – 136°33' Bujur Timur dan 2° 25' – 3°56' Lintang Selatan. Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Nabire 0.50 km. Kabupaten Nabire dengan luas 12.075 km atau 16,70 persen dari luas Provinsi Papua. Kabupaten Nabire pada tahun 2022 dibagi menjadi 15 distrik dimana Distrik Uwapa merupakan distrik terluas (14,98 persen) dan Distrik Nabire Barat merupakan distrik terkecil di Kabupaten Nabire (0,65 persen dari luas Kabupaten Nabire).

Batas wilayah Kabupaten Nabire sebagai berikut:

- Bagian Utara: Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen
- Bagian Selatan: Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Kaimana.
- Bagian Barat: Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana
- Bagian Timur: Kabupaten Paniai dan Kabupaten Waropen

B. Pemerintahan

Kabupaten Nabire terdiri dari 15 Distrik dengan 72 kampung definitif, 9

kelurahan dan 8 kampung persiapan. Distrik Nabire memiliki jumlah kampung terbanyak yakni 9 kelurahan dan 4 kampung.

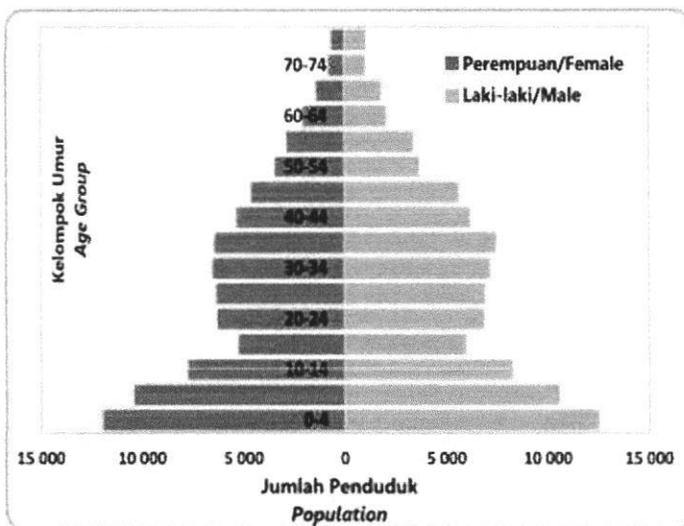
Tabel 3.1. Jumlah Kampung /Kelurahan Menurut Distrik di Kabupaten Nabire, 2018–2022

Distrik Subdistrik	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Uwapa	7	7	7	7	7
2. Menou	6	6	6	6	6
3. Dipa	7	7	7	7	7
4. Yaur	4	4	4	4	4
5. Teluk Umar	4	4	4	4	4
6. Wanggar	5	5	5	5	5
7. Nabire Barat	5	5	5	5	5
8. Nabire	13	13	13	13	13
9. Teluk Kimi	5	5	5	5	5
10. Napan	4	4	4	4	4
11. Makimi	6	6	6	6	6
12. Wapoga	5	5	5	5	5
13. Kepulauan Moora	5	5	5	5	5
14. Siriwo	6	6	6	6	6
15. Yaro	7	7	7	7	7
Nabire	89	89	89	89	89

Sumber: BPS Nabire

C. Kependudukan

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) SP2020 Longform, jumlah penduduk Kabupaten Nabire Tahun 2022 adalah 173.043 jiwa, terdiri dari 90.823 penduduk laki-laki (52,48 persen) dan 82.220 penduduk perempuan (47,52 persen). Dengan demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Nabire diatas 100, yaitu 110,46 poin. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nabire pada tahun 2022 mencapai 14 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terjadi di Distrik Nabire, yakni rata-rata 795 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Distrik Wapoga, yakni hanya 1 jiwa per km².



Sumber: BPS Nabire

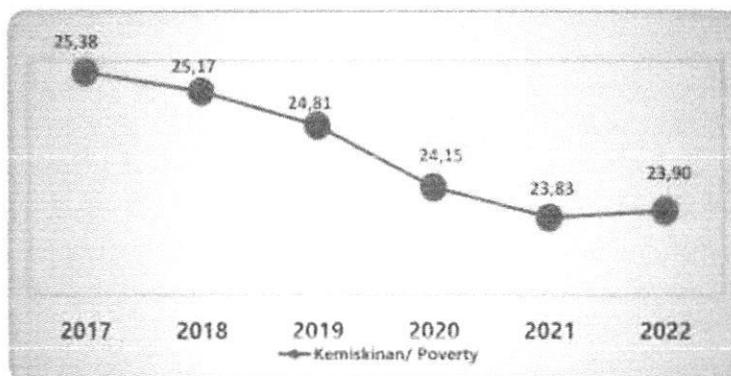
Gambar 3.1.

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nabire, 2022

Dapat diketahui penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda, piramida ekspansif/piramida penduduk muda (0-19 tahun). Di tahun 2022, penduduk usia kerja di Kabupaten Nabire sebanyak 113.207 jiwa. Secara lebih lanjut, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nabire adalah sebanyak 79.777 jiwa. Angka pengangguran di Kabupaten Nabire fluktuatif. Dibanding tahun 2021, pada tahun 2022 angka penganggur mengalami kenaikan dengan dari 3,04 persen ke angka hanya 3,45 persen.

D. Pendidikan

Tahun 2022, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Nabire yang masih bersekolah ada sebanyak 78,49 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 2,6 persen dan 18,92 persen adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Nabire untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 93,69 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 62,61 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 106,78 persen dan APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 101,48.



Sumber: BPS Nabire

Gambar 3.2. Angka Kemiskinan Kabupaten Nabire, 2017-2022

Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Nabire sebesar Rp. 705.953 /kapita/bulan yang artinya jika seorang individu yang tinggal di Nabire memiliki pendapatan selama sebulan di bawah Rp. 705.953 maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nabire pada tahun 2022 sebanyak 23,90 persen mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,07 persen.

E. Kesehatan

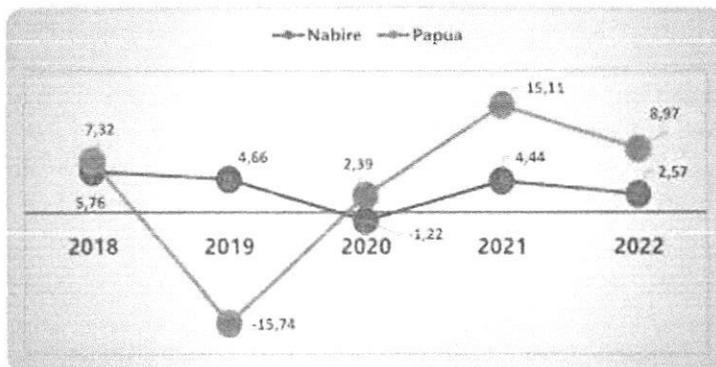
Pada tahun 2022, Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nabire didominasi oleh Puskesmas sebanyak 33 unit. Sedangkan, jumlah rumah sakit di Kabupaten Nabire hanya ada sebanyak 1 unit yang terletak ini Distrik Nabire. Selain itu, pada periode waktu yang sama, tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire pada tahun 2022 didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 291

orang.

F. Perekonomian

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 10.340,87 miliar rupiah (2018), 11.084,22 miliar rupiah (2019), 11.178,38 miliar rupiah (2020), 12.015,16 miliar rupiah (2021) dan 12.692,86 miliar rupiah tahun 2022. Sementara angka PDRB Nabire atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 7.124,94 miliar rupiah (2018), 7.457,29 miliar rupiah (2019), 7.355,88 miliar rupiah (2020), 7.684,56 miliar rupiah (2021) dan 7.882,34 miliar rupiah tahun 2022.

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2022 di Kabupaten Nabire pada kategori pertambangan dan Penggalian sebesar 19,05 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,73 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 16,74 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nabire tahun 2022 sebesar 2,57 persen, mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2021.



Sumber: BPS Nabire

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Pada Tahun 2018-2022

3.2.2. Kabupaten Puncak Jaya

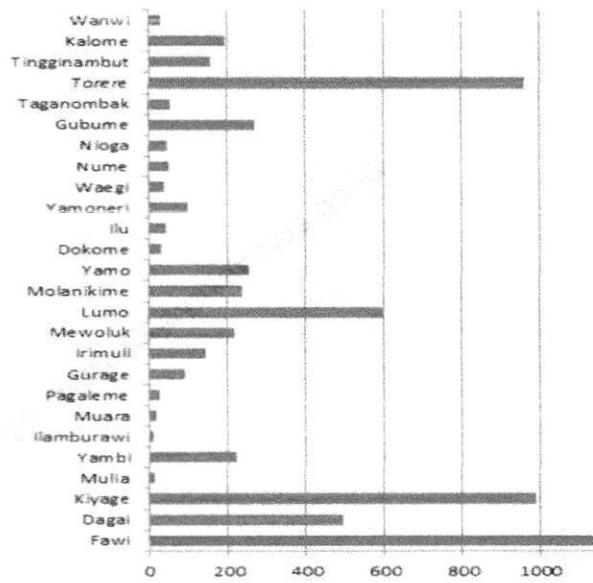
A. Kondisi Geografis

Kabupaten Puncak Jaya terletak antara 2° 0' - 3° 0' Lintang Selatan dan antara 136° 08' - 137° 38' Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya kabupaten Puncak Jaya memiliki batas-batas:

- Batas Utara : Kabupaten Mamberamo Raya
- Batas Selatan : Kabupaten Puncak dan Kabupaten Lanny Jaya
- Batas Barat : Kabupaten Puncak

- Batas Timur : Kabupaten Tolikara



Sumber: BPS Puncak Jaya. Gambar 3.4. Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2022

B. Pemerintahan

Kabupaten Puncak Jaya Terdiri dari 26 Distrik yaitu : Fawi, Dagai, Kiyage, Mulia, Yambi, Ilamburawi, Muara, Pagaleme, Gurage, Irimuli, Mewoluk, Lumo, Molanikime, Yamo, Dokome, Ilu, Yamoneri, Waegi, Nume, Nioga, Gubume, Taganombak, Torere, Tingginambut, Kalome, Wanwi.

Tabel 3.2. Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kecamatan, (2017-2022)

Kecamatan Subdistrict	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fawi	9	9	9	9	9
Dagai	10	10	10	10	10
Kiyage	8	8	8	8	8
Mulia	9	9	9	9	9
Yambi	9	9	9	9	9
Ilamburawi	5	5	5	5	5
Muara	8	8	8	8	8
Pagaleme	5	5	5	5	5
Gurage	11	11	11	11	11
Irimuli	9	9	9	9	9
Merwoluk	8	8	8	8	8
Lumo	9	9	9	9	9
Molanikime	5	5	5	5	5
Yamo	14	14	14	14	14
Dokome	9	9	9	9	9
Ilu	20	20	20	20	20

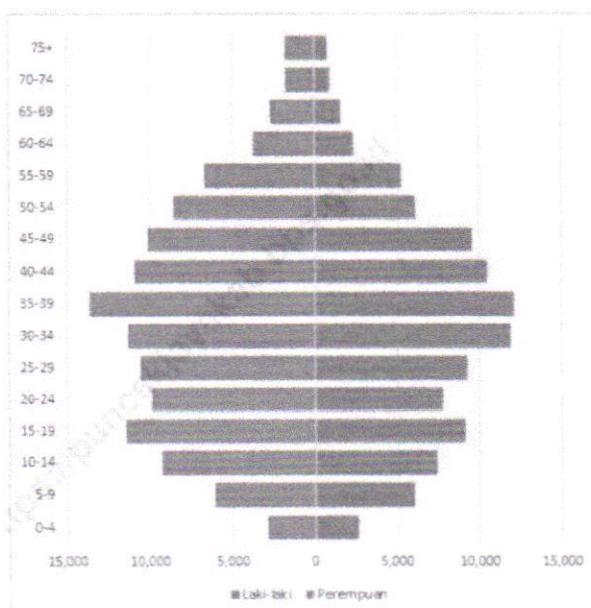
Kecamatan Subdistrict	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Yamoneri	16	16	16	16	16
Waegi	19	19	19	19	19
Nume	13	13	13	13	13
Nioga	11	11	11	11	11
Gubume	17	17	17	17	17
Taganombak	10	10	10	10	10
Torere	13	13	13	13	13
Tingginambut	22	22	22	22	22
Kalome	16	16	16	16	16
Wanwi	17	17	17	17	17
Puncak Jaya	302	302	302	302	302

Sumber: BPS PUNCAK JAYA

C. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia pekerja, piramida ekspansif/piramida penduduk usia pekerja (35-44 tahun) di tahun 2020. Secara lebih lanjut, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 86.509 jiwa. Angka pengangguran di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 1.508 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2020 yakni 73,65 persen, sebesar 224.527.000 jiwa. Selain itu Jumlah Penduduk Miskin mengalami kenaikan di

tahun 2020 sebesar 34,74% dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 35,71%.



Sumber: BPS PUNCAK JAYA

Gambar 3.5. Piramida Penduduk Kabupaten Puncak Jaya, 2020

D. Pendidikan

Penduduk dikabupaten Puncak Jaya dapat diketahui mengalami penurunan atas persentase penduduk melek huruf diumur 15 tahun keatas, pada tahun 2019 68,40% namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 58,16 %.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Puncak Jaya, 2019 dan 2020

Sumber: BPS PUNCAK JAYA

Kelompok Umur Age Group	2019	2020
(1)	(2)	(3)
15-19	86,32	79,03
20-24	88,10	58,89
25-29	68,84	59,90
30-34	68,46	66,45
35-39	65,32	63,91
40-44	57,05	44,89
45-49	66,84	59,36
50+	49,15	44,99
Jumlah/Total	68,40	58,16

E. Kesehatan

Sedangkan Kampung Mulia merupakan salah satu yang mempunyai sarana kesehatan berupa rumah sakit. Untuk puskesmas memiliki 5 pada tahun 2021 yang mengalami penurunan ditahun sebelumnya yakni 6. Sedangkan untuk Puskesmas pembantu mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 21 jika dibandingkan dengan tahun 2020,2019 sebanyak 19 dan 18.

F. Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa pandemic Covid-19 yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2020. Hal ini terlihat dari PDRB yang meningkat di Sebagian besar pengeluaran serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Puncak Jaya (adh Berlaku) selama periode tahun 2018 s.d 2022 menunjukkan peningkatan signifikan walaupun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Puncak Jaya sebesar 1,450 triliun rupiah, meningkat sebesar 11,47 persen dari tahun 2018. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.173.259,48	1.254.384,74	1.262.661,79	1.278.190,40	1.383.526,82
2. Konsumsi LNPR	39.715,81	45.197,05	43.483,40	45.819,37	50.196,37
3. Konsumsi Pemerintah	588.044,21	615.913,29	638.680,92	639.928,38	650.677,42
4. PMTB	556.733,73	597.487,40	596.146,36	660.285,23	711.300,11
5. Perubahan Inventori	3.939,69	4.171,54	-11.328,34	3.889,66	-18.154,55
6. Ekspor	64.700,63	68.839,91	66.771,85	68.923,07	69.010,17
7. Impor	1.125.398,89	1.181.366,65	1.209.181,87	1.289.964,14	1.396.347,52
Total PDRB	1.300.994,67	1.404.627,28	1.387.234,12	1.407.071,97	1.450.208,82

Sumber: BPS PUNCAK JAYA

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022, produk yang dikonsumsi (konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPR, konsumsi pemerintah) di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Impor masih mempunyai peran yang amat besar, karena sekitar 84,11 s.d 96,29 persen permintaan domestik Puncak Jaya masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 89,30 s.d 95,40 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 43,85 s.d 45,48 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan rumah tangga dalam menyerap produk domestik juga cukup besar.

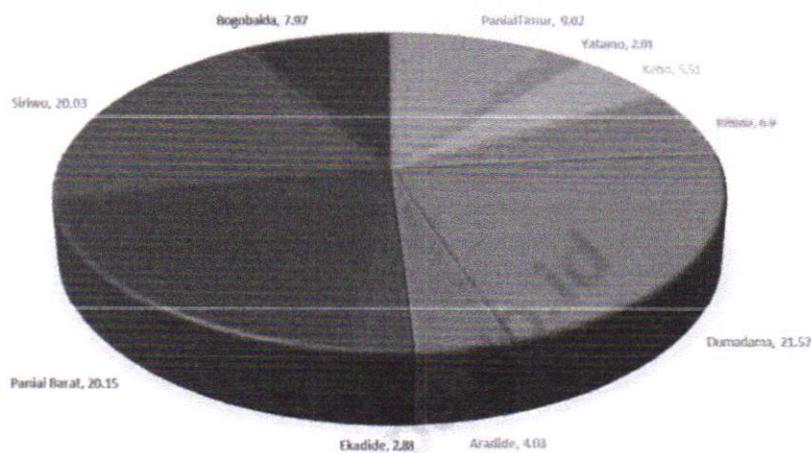
3.2.3. Kabupaten Paniai

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Paniai merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata +1700 meter di atas permukaan laut, antara 135°.25' Bujur Timur dan 030°.53' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Paniai, adalah berupa daratan seluas 6.525,32 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Paniai memiliki batas-batas sebagai berikut ini:

- Batas Utara: Kabupaten Nabire dan Kabupaten Intan Jaya
- Batas Selatan: Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai
- Batas Barat: Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai
- Batas Timur: Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mimika



Sumber: BPS Paniai

Gambar 3.6.

Luas Daerah Kabupaten Paniai menurut Kecamatan (%), 2021 Kecamatan terluas berada di Dumadama sebesar 21.52% sedangkan luas terkecil di Kecamatan Yatamo 2,01%.

B. Pemerintahan

Kabupaten Paniai sebelumnya terdiri atas 10 distrik yang pada tahun 2020 mekar menjadi 24 distrik yang terdiri dari 208 kampung pada tahun 2022. Kabupaten Paniai memiliki 25 anggota DPRD yang terdiri seluruhnya adalah laki-laki Jumlah PNS di Kabupaten Paniai mencapai 2.538, terdiri dari 1.667 laki-laki dan 751 perempuan.

Tabel 3.5. Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Distrik di Kabupaten Paniai, 2018–2022

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paniai Timur	17	17	17	17	17
Yatamo	8	8	8	8	8
Kebo	13	13	13	13	13
Pugo Dagi	8	8	8	8	8
Wege Muka	15	15	15	15	15
Wegee Bino	9	9	9	9	9
Yagai	11	11	11	11	11
Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fajar Timur	6	6	6	6	6
Topiyai	10	10	10	10	10
Paniai Barat	15	15	15	15	15
Siriwo	12	12	12	12	12
Muye	7	7	7	7	7
Nakama	7	7	7	7	7
Teluk Deya	8	8	8	8	8
Bogobaida	5	5	5	5	5
Youtadi	6	6	6	6	6
Baya Biru	9	9	9	9	9
Paniai	208	208	208	208	208

Sumber: BPS Paniai

C. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok usia pekerja. Secara lebih lanjut, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 86.509 jiwa. Angka pengangguran di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 1.508 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2020 yakni 73,65 persen, sebesar 224.527.000 jiwa. Selain itu Jumlah Penduduk Miskin mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 34,74% dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 35,71%.

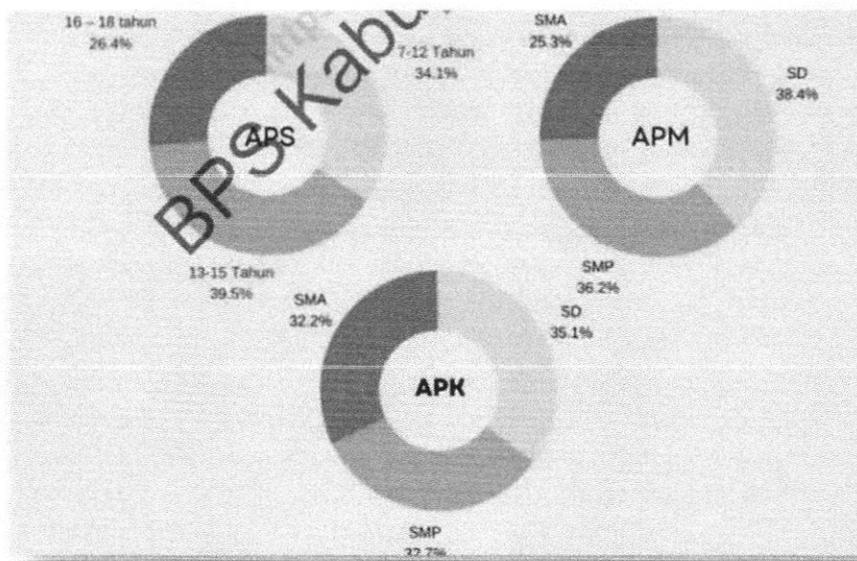
Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamindi Kabupaten Paniai, 2022

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8 018	7 278	25 297
5-9	8 405	7 616	16 021
10-14	8 555	7 033	15 588
15-19	10 902	8 794	19 696
20-24	14 324	11 450	25 774
25-29	15 723	12 709	28 432
30-34	11 788	10 565	22 353
35-39	11 259	10 747	22 006
40-44	9 780	9 142	18 922
45-49	8 148	6 698	14 846
50-54	6 976	4 900	11 876
55-59	3 942	2 635	6 577
60-64	3 511	1 622	5 133
65-69	1 375	764	2 139
70-74	970	734	1 704
75+	584	306	890
Nama Provinsi	124 260	102 994	227 254

Sumber: BPS Paniai

D. Pendidikan

Tahun 2023, penduduk di Kabupaten Paniai yang masih bersekolah ada sebanyak 33,18 persen sedangkan yang tidak bersekolah sebesar 0,89 persen. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Paniai untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 38,4 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat sebesar 25,3 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 35,1 persen dan APK SMA/ SMK/MA/sederajat sebesar 32.2 persen.



Sumber: BPS Paniai

Gambar 3.7. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Formal dan Non Formal berdasarkan jenis kelamin

E. Kesehatan

Kabupaten Paniai memiliki 1 Rumah Sakit yang berada di Paniai Timur. Mempunyai Poliklinik berjumlah 3, dan memiliki Puskesmas yang mengalami penurunan ditahun 2021 sebanyak 14 tempat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020-2019 memiliki sebanyak 17 puskesmas.

F. Perekonomian

Nilai PDRB Paniai atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 4,70 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sekitar 258 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4,44 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3,08 trilyun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,19 trilyun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Paniai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,56 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Tabel 3.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Paniai Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

Kategori Category	Lapangan Usaha Industry	2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	1.29	0.68	-0.42	0.47	1.15
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	7.38	2.00	1.77	1.90	3.43
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4.75	0.92	0.08	0.55	2.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	2.27	6.50	0.40	3.44	3.60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	5.96	2.75	0.49	1.21	3.29
F	Konstruksi/Construction	8.90	7.80	0.05	2.28	4.37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	4.92	4.35	0.05	2.12	3.42
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	5.32	5.23	-8.92	2.15	6.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	5.48	5.68	0.82	2.18	3.96
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	6.61	5.90	4.82	4.19	4.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	5.13	2.53	-5.59	0.55	1.45
L	Real Estat/Real Estate Activities	6.05	6.12	0.56	2.03	4.34
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7.18	5.12	2.27	1.14	4.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	3.90	3.19	-1.83	-0.03	1.74
P	Jasa Pendidikan/Education	4.51	4.25	2.26	0.28	3.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	6.06	5.76	5.79	2.40	4.85
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	6.57	5.83	3.78	2.27	3.04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT		6.49	3.84	0.46	1.65	3.37

Sumber: BPS Paniai

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Paniai pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 33,75 persen (persentase ini menurun dari 34,14 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Kontruksi sebesar 30,77 persen (meningkat dari 30,25 persen di tahun 2021). Peranan terbesar ketiga adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 12,39 persen (menurun dari 12,60 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,33 persen (turun dari 9,56 persen di tahun 2021).

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Paniai tahun 2022 sebesar 3,37 persen, lebih cepat dari tahun sebelumnya dengan laju 1,65 persen. Artinya nilai tambah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas

daripenanganan pemerintah dan respon masyarakat atas pandemik COVID-19, sehingga lapangan usaha secara keseluruhan dapat pulih. Pada tahun 2022 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,15 persen. Kemudian secara berurutan, lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 4,87 persen, Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya perekonomian di Kabupaten Paniai.

3.2.4. Kabupaten Mimika

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°031' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,4% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agiuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik - distrik selain kelima distrik tersebut merupakan distrik distrik yang memiliki topografi dataran rendah.

Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

B. Pemerintahan

Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik. Secara lebih lanjut, pada tahun 2021 Kabupaten Mimika tercatat memiliki 133 Desa dan 19 Kelurahan, dan memiliki 152 desa.

Tabel 3.8. Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Distrik di Kabupaten Mimika, 2018–2022 (Wilayah Administrasi)

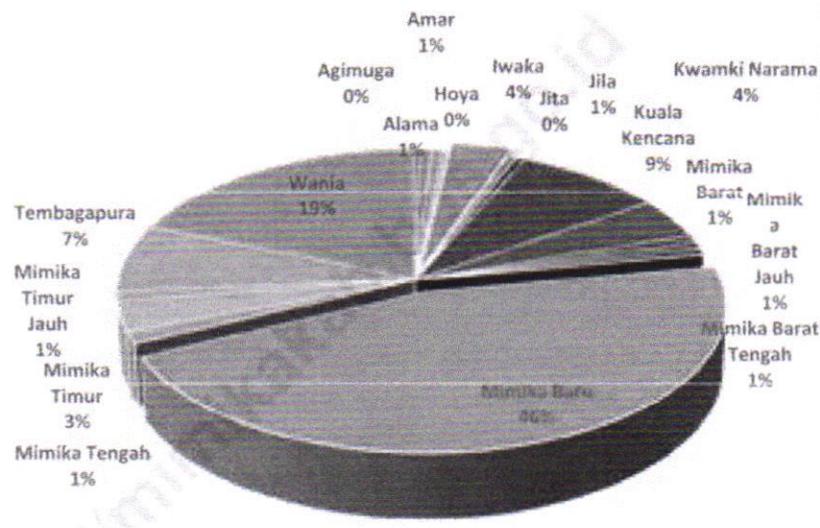
Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Agimuga	8	8	8	8	8
Amar	6	6	6	6	6
Alama	11	11	11	11	11
Hoya	6	6	6	6	6
Iwaka	7	7	7	7	7
Jila	12	12	12	12	12
Jita	10	10	10	10	10
Kuala Kencana	10	10	10	10	10
Kwamki Narama	10	10	10	10	10
Mimika Barat	7	7	7	7	7
Mimika Barat Jauh	5	5	5	5	5
Mimika Barat Tengah	9	9	9	9	9
Mimika Baru	14	14	14	14	14
Mimika Tengah	5	5	5	5	5
Mimika Timur	6	6	6	6	6
Mimika Timur Jauh	5	5	5	5	5
Tembagapura	14	14	14	14	14
Wania	7	7	7	7	7
Mimika	152	152	152	152	152

Sumber: BPS MIMIKA

C. Kependudukan

Pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika ada sebanyak 316.295 jiwa. Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.969 jiwa.

Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km, kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 – 15 jiwa per km².



Sumber: BPS MIMIKA

Gambar 3.8. Distribusi Penduduk Menurut Distrik (persen), 2022

D. Pendidikan

Pada Tahun 2020, jumlah unit sekolah per jenjang Pendidikan memiliki 104 unit Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/Bustanus Athfal, 134 Unit SD dan 69 Unit SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mimika untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 91,53 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 64,96 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 102,91 persen dan APK SMA/ SMK/MA/sederajat sebesar 122,82 persen.

Tabel 3.9. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mimika, 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2019	2020	2019	2020
	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	91,41	91,53	100,86	102,91
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	77,11	77,01	92,18	92,32
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	66,97	64,96	143,48	122,82

Sumber: BPS MIMIKA

E. Kesehatan

Satu-satunya fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah di Mimika yakni RSUD Mimika. Sedangkan banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2020 sebanyak 70 puskesmas/Puskesmas Pembantu. Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Mimika sebanyak 96 orang, Dokter gigi sebanyak 38 orang serta tenaga medis lainnya sebanyak 1.263 orang. Sementara itu jumlah penderita Malaria pada tahun 2020 sebanyak 46.936 kasus, tertinggi diantara sepuluh besar penyakit lainnya. Diurutan kedua ada Infeksi Akut Lain pada saluran pernapasan Bagian Atas sebesar 35.700 kasus dan di urutan ketiga ada Penyakit Lain pada saluran pernapasan bagian atas sebanyak 13.119 kasus. Sedangkan kasus HIV/AIDS tercatat hanya sebesar 301 kasus di kabupaten Mimika.

F. Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Mimika selama periode 2018-2022 terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menunjukkan arah positif. Nilai PDRB Kabupaten Mimika (ADH Berlaku) tahun 2022 sebesar 110,41 triliun rupiah meningkat sebesar 15,95 persen dari tahun 2021. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Berdasarkan gambar C.16 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh net ekspor. Sebanyak 39-64 persen PDRB Kabupaten Mimika selama tahun 2018- 2022 adalah net ekspor. Pada tahun 2022 persentase net ekspor kembali naik 4,59 persen dibanding tahun 2021. Selain untuk net ekspor, pengeluaran terbesar digunakan untuk PMTB, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah. Pengeluaran paling kecil ada pada komponen konsumsi LNPRRT dan perubahan inventori dimana masing-masing bernilai 0,21 dan 1,30 persen pada tahun 2022.

Tabel 3.10. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Mimika Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran / Expenditure Component (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Household consumption Expenditures	6,02	2,61	-6,15	2,02	4,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT / LNPRRT Consumption Expenditures	4,51	9,78	-35,80	8,67	8,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / Government Consumption Expenditures	0,17	0,73	-3,30	3,74	0,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	7,29	5,33	-3,46	15,18	3,29
5. Perubahan Inventori / Changes in Inventory	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor / Net Export	10,33	-53,74	25,09	53,83	25,12
PDRB / GRDP	10,27	-38,52	11,44	36,85	15,31

Sumber: BPS MIMIKA

3.2.5. Kabupaten Puncak

A. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Puncak terletak antara 3°00'–4°03' Lintang Selatan dan 136°40'–138°05' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Puncak terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Luas wilayah Kabupaten Puncak adalah 8.055 km² atau 2,54 persen dari total luas wilayah Papua.

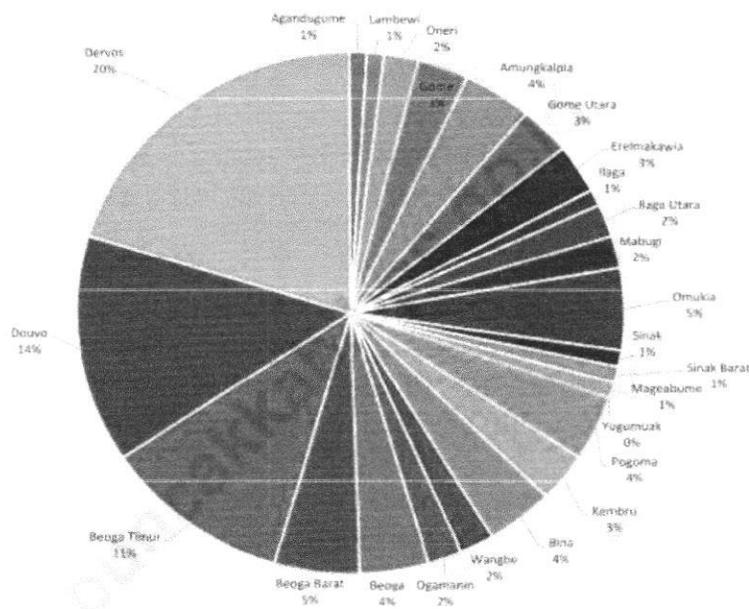
Kabupaten Puncak memiliki batas-batas berikut ini:

- Batas Utara : Kabupaten Membramo Raya
- Batas Selatan : Kabupaten Mimika
- Batas Barat : Kabupaten Intan Jaya
- Batas Timur : Kabupaten Puncak Jaya

B. Pemerintahan

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Puncak terdiri dari 8 wilayah Distrik Induk, yaitu: Agadugume (200 km²), Gome (1.117km²), Ilaga (886 km²), Sinak (1.079 km²), Pogoma (862 km²), Wangbe (768 km²), Beoga (1.488 km²), serta Doufo (1.655 km²). Dan luas daerah terbesar yaitu Derfoussebesar 1.494,153 km² atau 20% dari total.

Sumber: BPS PUNCAK



Gambar 3.9. Luas Daerah menurut Distrik (%), 2022

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Puncak pada tahun 2020 adalah 114.741 yang terdiri dari 60.845 laki-laki dan 53.896 perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13% ditahunj 2022 dengan kepadatan penduduk 15,87 perkm².

Berdasarkan dambar dibawah dapat diketahui jika Kabupaten Puncak memilikijumlah Angkatan Kerja sebanyak 80.446 jiwa. Sehingga presentase pendudukbekerja bersarkan Angkatan kerja sebesar 99,81%.

Tabel 3.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Puncak, 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	42406	38040	80446
1. Bekerja/Working	42270	38021	80291
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	136	19	155
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	622	1477	2099
1. Sekolah/Attending School	0	15	15
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	125	1206	1331
3. Lainnya/Others	497	256	753
Jumlah/Total	43028	39517	82545

Sumber: BPS PUNCAK

D. Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Puncak untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 57,45 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 17,38 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 59,65 persen dan APK SMA/ SMK/MA/sederajat sebesar 18,27 persen.

Tabel 3.12. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Puncak, 2021 dan 2022

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	51.61	57.45	56.92	59.65
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	26.65	29.72	41.15	41.01
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	13.54	17.38	13.54	18.27

Sumber: BPS PUNCAK

E. Kesehatan

Kabupaten memiliki Persentase penduduk yang menderita sakit terhadap jumlah penduduk dalam sehari-sehari pada tahun 2022 sebesar 0,30 persen yang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, ataupun kegiatan sehari-hari

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	0.29
Perempuan	0.32
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	0.00
40 Persen Tengah	0.15
20 Persen Teratas	1.21
Puncak	0.30

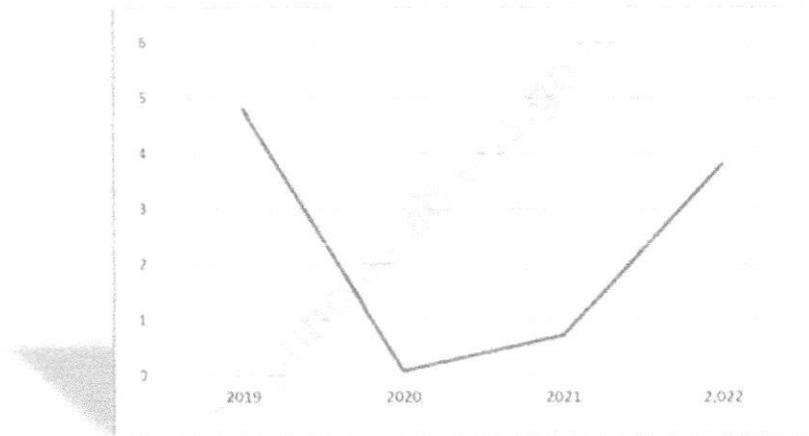
Tabel 3.13. Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2022

Sumber: BPS Puncak

F. Perekonomian

Nilai total PDRB setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Pada PDRB lapangan usaha, dihitung nilai tambah bruto pada 17 lapangan usaha. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB Rp.1.441.490.000.000 (Satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan Rupiah) dan ADHK Rp.827.073.701.000 (Delapan ratus dua puluh tujuh milyartujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu Rupiah), naik 2,84 persen dari tahun lalu. Sektor pemerintahan, konstruksi, dan pertanian masih mendominasi PDRB 2020 dengan proporsi masing-masing 37,70 persen, 35,14 persen, dan 14,99 persen. Pada tahun 2020, sektor transportasi dan pergudangan mengalami koreksi yang cukup dalam dibandingkan tahun 2019 (turun 25,22%). Hal ini disebabkan karena berkurangnya aktivitas penerbangan di Kabupaten Puncak akibat dampak

pandemi virus Covid-19. Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai 12,56 juta rupiah. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Puncak sebesar 1,5 persen.



Gambar 3.10.

Sumber: BPS PUNCAK

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Puncak (persen), 2016–2020

3.2.6. Kabupaten Dogiyai

A. Kondisi Geografis

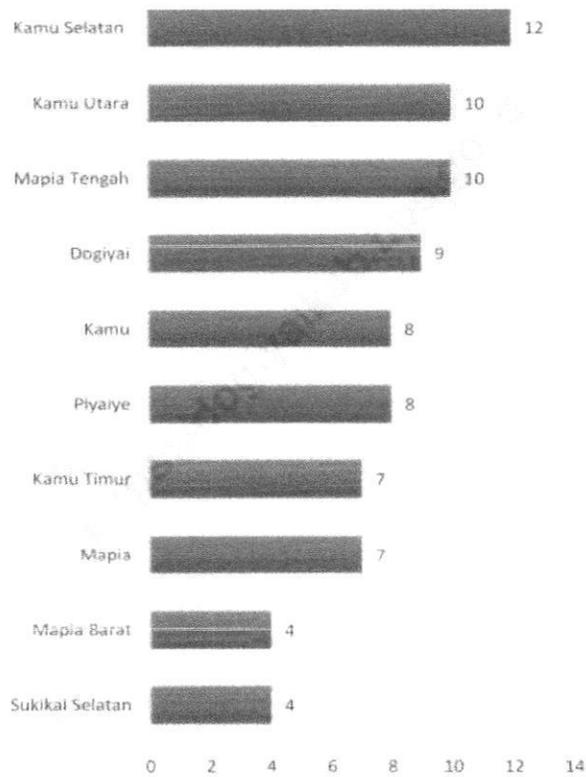
Kabupaten Dogiyai terletak antara 135°20' – 136°37' Bujur Timur dan 3° 57' –4°15' Lintang Selatan. Kabupaten Dogiyai memiliki luas 7.052,92 km atau 2,24persen dari luas Provinsi Papua. Kabupaten Dogiyai dibagi menjadi 10 distrik dimana Distrik Mapia Tengah merupakan distrik terluas (28,56 persen) dan Distrik Kamu merupakan distrik terkecil di Kabupaten Dogiyai (1,10 persen dari luas Kabupaten Dogiyai).

Kabupaten Dogiyai memiliki batas-batas berikut ini:

- Dibagian utara: Kabupaten Nabire
- Dibagian selatan: Kabupaten Mimika
- Dibagian barat: Kabupaten Nabire
- Sebelah timur: Kabupaten Paniai

B. Pemerintahan

Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 Distrik dengan 79 kampung definitif. Distrik Dogiyai memiliki jumlah kampung terbanyak yakni 9 kelurahan dan 4 kampung.



Gambar 3.11.

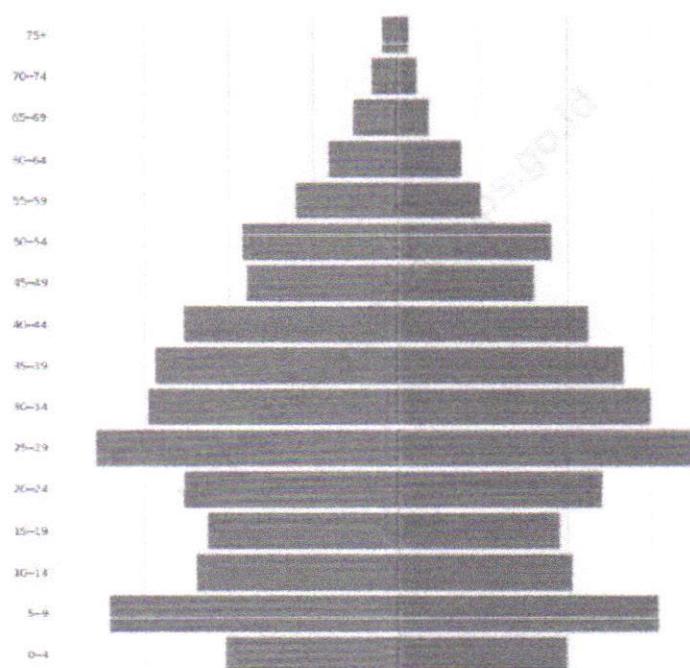
Sumber: BPS Dogiyai

Banyaknya Kampung berdasarkan Distrik di Kabupaten Dogiyai, 2022

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 adalah 117.818 jiwa, terdiri dari 61.427 penduduk laki-laki (52,14 persen) dan 56.391 penduduk perempuan (47,86 persen). Dengan demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Dogiyai diatas 100, yaitu 108,93. Dengan luas wilayah 7.052 km, kepadatan penduduk di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2021 hanya 1617 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Distrik Kamu, yakni rata-rata 216 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Distrik Mapia Barat, yakni hanya 4 hingga 5 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Dogiyai berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda, piramida ekspansif/ piramida penduduk muda (0-29 tahun).

Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 56.291 jiwa (81,87 persen) yang didominasi oleh perempuan (29.245 jiwa). Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 53.735 jiwa yang juga didominasi oleh perempuan (53,99 persen). Sementara itu, pendidikan tertinggi pada penduduk bekerja yang didominasi pada level pendidikan sekolah dasar (40.737 jiwa).



Sumber: BPS DOGIYAI

Gambar 3.12. Piramida Penduduk Kabupaten Dogiyai, 2022

D. Pendidikan

Tahun 2021, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Dogiyai yang masih bersekolah ada sebanyak persen 69,99. Sedangkan, sisanya sebanyak 21,09 persen dan 8,92 persen adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Dogiyai untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/ sederajat adalah sebesar 85,07 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 37,07 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 93,95 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 55,84 persen.

Tabel 3.14. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Dogiyai, 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	84,31	85,03	94,40	92,59
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	68,43	68,44	89,88	88,21
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	38,40	36,69	55,44	51,84

Sumber: BPS DOGIYAI

E. Kesehatan

Pada tahun 2021, Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dogiyai didominasi oleh Puskesmas sebanyak 9 unit. Selain itu, pada periode waktu yang sama, tenaga kesehatan di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2021 didominasi oleh tenaga keperawatan sebanyak 99 orang. Tahun 2021, sebanyak 31,12 persen perempuan pernah kawin berumur 15- 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dibantu proses kelahirannya oleh Dukun Beranak. Jumlah ibu hamil di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2020 ada sebanyak 78.157 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

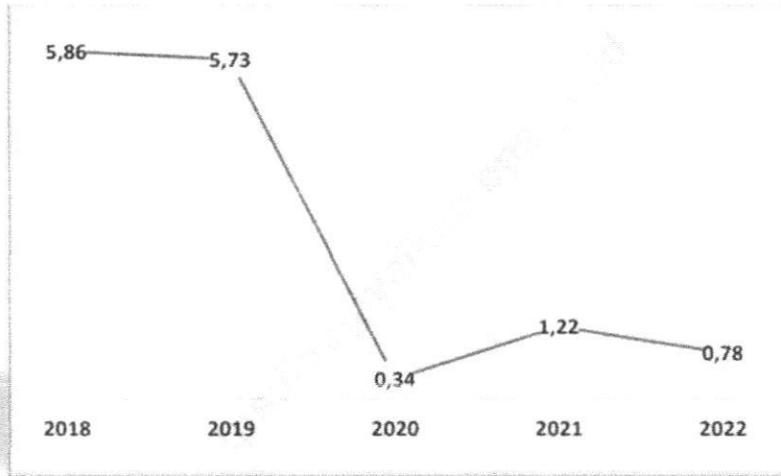
Terkait dengan kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan, sebanyak 65,66 persen ibu hamil melakukan kunjungan K1 namun persentase ini menurun di kunjungan K4 menjadi 38,06 persen. Sebanyak 7,34 persen ibu hamil dinyatakan Kurang Energi Kronis (KEK) dan 26,88 persen mendapatkan asupan zat besi. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Dogiyai pada tahun 2021 ada sebanyak 14.403 pasangan. Secara lebih lanjut, jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif ada sebanyak 3.302 orang dimana sebagian besar peserta KB menggunakan alat suntikan yaitu sebanyak 2.542 orang

F. Perekonomian

Selama Lima tahun terakhir (2017- 2022), total nilai tambah yang dihasilkan oleh aktifitas sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayah Kabupaten Dogiyai baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 1.098,78 miliar rupiah. Nilai ini terus bertambah hingga pada tahun 2022 mencapai 1.445,34 miliar rupiah.

PDRB Dogiyai selalu menunjukkan angka positif namun cenderung mengalami perlambatan. Artinya, produksi riil yang dihasilkan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Perlambatan laju pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2022 dimana pada tahun tersebut terjadi kerusuhan sepanjang tahun yang menyebabkan laju pertumbuhan hanya sebesar 0,78 persen. Laju tersebut mengalami perlambatan jika dibanding dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 1,22 persen.



Sumber: BPS Dogiyai

Gambar 3.13. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dogiyai (persen), 2018–2022

3.2.7. Kabupaten Intan Jaya

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Intan Jaya merupakan sebuah kabupaten di pegunungan tengah Provinsi Papua yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai. Letak geografis Intan Jaya adalah antara 1370,57' dan 1360,58' Bujur Timur dan antara 40,58' dan 40,49' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Intan Jaya, adalah berupa daratan seluas 3.922 km². Kabupaten Intan Jaya terdiri atas delapan distrik/kecamatan, yakni Homeyo, Sugapa, Ugimba, Hitadipa, Agisiga, Tomosiga, Biandoga, dan Wandai. Distrik yang memiliki luas wilayah terluas adalah Homeyo dengan luas 23,9 persen dari luas Intan Jaya atau setara dengan 938 km², sedangkan terkecil adalah Tomosiga dengan persentase luas distrik terhadap kabupaten adalah sebesar 5,3 persen atau setara dengan luas sebesar 208 km².

Kabupaten Intan Jaya memiliki letak yang berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya,
- Sebelah Barat: Kabupaten Nabire dan Paniai,
- Sebelah timur: Kabupaten Puncak,
- Sebelah selatan: Kabupaten Mimika dan Paniai.

B. Pemerintahan

Pada tahun 2022 Kabupaten Intan Jaya terdiri atas 8 distrik, diantaranya adalah Homeyo, Sugapa, Ugimba, Hitadipa, Agisiga, Tomosiga, Biandoga, dan Wandai, dengan total kampung adalah sebanyak 97 kampung.

Tabel 3.15. Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Distrik di Kabupaten Intan Jaya, 2018–2022

Kecamatan Subdistrik	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Homeyo	21	21	21	21	21
Sugapa	17	17	17	17	17
Ugimba	6	6	6	6	6
Hitadipa	9	9	9	9	9
Agisiga	10	10	10	10	10
Tomosiga	9	9	9	9	9
Biandoga	16	16	16	16	16
Wandai	9	9	9	9	9
Intan Jaya	97	97	97	97	97

Sumber: BPS INTAN JAYA

B. Kependudukan

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Intan Jaya adalah sekitar 51.149 jiwa, dimana terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 3,77 persen dari tahun 2020. Dari 8 distrik di Kabupaten Intan Jaya, total penduduk terbanyak berada di Distrik Homeyo, yaitu sebesar 14.309 orang, sementara penduduk palingsedikit berada di Distrik Wandai, yaitu sebanyak 4.442 orang. Distrik Sugapa sebagai distrik ibukota memiliki penduduk sebanyak 12.033 orang.

C. Pendidikan

Kabupaten Intan Jaya, di Kabupaten Intan Jaya terdapat sebanyak 47 sekolah, dimana terdiri atas 3 unit TK, 36 unit SD, 7 unit SMP, dan 1 unit SMA, dimana tingkat SD memiliki unit yang paling banyak. Diketahui terdapat 222 guru yang terdiri atas 6 orang guru TK, 138 orang guru SD, 67 orang guru SMP, dan 11 orang guru SMA.

Dari gambar dibawah dapat diketahui APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat sebesar 21,96 persen dibandingkan dengan SD/MI/ sederajat 62,93 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/ sederajat adalah sebesar 66,88 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 41,33 persen.

Tabel 3.16. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	74.05	49.04	62.93
13 – 15 tahun	67.18	38.92	52.06
16 – 18 tahun	28.49	39.70	33.02
APM			
SD	74.05	49.04	62.93
SMP	56.88	36.72	46.09
SMA	19.28	25.61	21.96
APK			
SD	79.58	51.02	66.88
SMP	68.67	47.72	57.46
SMA	36.84	47.44	41.33

Sumber: BPS INTAN JAYA

D. Kesehatan

Pada tahun 2021, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, diketahui bahwa terdapat 24 fasilitas kesehatan di Kabupaten Intan Jaya, dimana fasilitas kesehatan (faskes) yang mendominasi adalah puskesmas pembantu, yaitu sebanyak 13 unit. Unit tersebut paling banyak terdapat di Homeyo dan Wandai. Namun faskes ini tidak tersedia di Ugimba dan Tomosiga. Sementara faskes yang tersedia diseluruh distrik adalah puskesmas sebanyak 8 unit. Balai pengobatan tersedia sebanyak 2 unit.

E. Perekonomian

PDRB Intan Jaya atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 1,36 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sekitar 59 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1,3 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 767 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 787 milyar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Intan Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,64 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh ekonomi kabupaten yang sudah membaik dari pandemi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Intan Jaya pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Kontruksi, yaitu mencapai 37,60 persen (angka ini naik dari 36,59 persen di tahun 2021).

Perekonomian Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2022 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Intan Jaya tahun 2021 mencapai 1,07

persen, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2,64 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,47 persen.

Tabel 3.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Intan Jaya Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	0.98	0.17	-1.67	1.82	1.23
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6.70	3.16	2.20	1.14	2.93
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.91	1.62	-2.91	-1.31	1.04
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>					
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.76	1.40	-0.63	2.50	4.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5.45	5.85	-1.66	-0.21	3.23
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3.10	5.05	-1.33	-0.76	6.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2.19	4.57	-0.85	-0.22	3.16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5.32	5.61	4.91	1.98	4.62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>					
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3.87	4.16	0.34	2.11	3.17
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2.20	2.62	1.22	1.63	1.82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5.13	5.55	0.80	-0.75	1.56
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3.22	5.02	1.43	0.76	1.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.74	2.68	3.80	0.90	0.81
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2.03	2.25	2.03	1.34	2.62
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		2.79	2.72	-0.38	1.09	2,64

Sumber: BPS Intan Jaya

3.2.8. Kabupaten Deiyai

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak pada koordinat 135° 57' sampai 136° 54' bujur timur dan 3° 57' sampai 4° 29' lintang selatan. Ibukota Kabupaten Deiyai terletak pada distrik Tigi, berada di pegunungan tengah Papua. Luas Kabupaten Deiyai adalah 1,2 % dari total luas Provinsi Papua. Kabupaten Deiyai memiliki luas wilayah 1.012,67 Km². Kabupaten Deiyai terdiri dari 5 kecamatan/distrik yaitu: Distrik Kapiroya, Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi TImur, dan Distrik Bowobado.

Kabupaten Deiyai memiliki batas-batas sebagai berikut ini:

- Batas sebelah utara: Kabupaten Paniai
- Batas sebelah timur: Kabupaten Paniai
- Batas sebelah selatan: Kabupaten Timika
- Batas sebelah barat: Kabupaten Dogiyai.

B. Pemerintahan

Pada tahun 2001, Kabupaten Deiyai telah menjadi kabupaten baru setelah mekar dari Kabupaten Paniai secara legal di tahun 2008. Pada tahun 2022 jumlah distrik sebanyak 5 distrik dan jumlah kampung sebanyak 67. Dari jumlah kampung yang ada seluruhnya berstatus sebagai perkampungan.

Tabel 3.18. Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di

KabupatenDeiyai, 2018–2022

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapiraya	5	5	5	5	5
Tigi Barat	22	22	22	22	22
Tigi	20	20	20	20	20
Tigi Timur	14	14	14	14	14
Bowobado	6	6	6	6	6
Deiyai	67	67	67	67	67

Sumber: BPS Deiyai

C. Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kabupaten Deiyai pada tahun 2022 sebanyak 102.168 jiwa dengan 48.086 jiwa untuk perempuan dan untuk laki-laki 54.082 jiwa. Berdasarkan gambar dibawah dapat diketahui penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 40,31 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 40,59 persen ditahun 2019.

Tabel 3.19. Persentase Kemiskinan tahun 2015-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	14. Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	483 206	31,53	45,74
2016	503 898	31,72	45,11
2017	556 281	31,33	43,63
2018	561 857	31,50	43,49
2019	579 263	31,87	43,65
2020	608 868	30,98	41,76
2021	627 742	30,83	40,59
2022	647 902	31,04	40,31

Sumber: BPS Deiyai

D. Pendidikan

Persentase penduduk diatas 15 yang dapat membaca huruf katin sebesar 85,44 persen. Kabupaten Deiyai memiliki 50 unit SD, 10 Unit SMP, 3 Unit SMA dan 3 unit SMK. Berdasarkan gambar dibawah dapat diketahui jika persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat sebesar 40,63 persen dibandingkan jika dengan SD/MI/ sederajat sebesar 59,19 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/ sederajat adalah sebesar 70,83 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 50,29 persen.

Tabel 3.20. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	55.58	59.18	57.11
13 – 15 tahun	63.77	53.62	58.47
16 – 18 tahun	31.63	69.85	46.75
APM			
SD	55.00	57.79	56.19
SMP	44.49	47.13	45.87
SMA	27.87	60.11	40.63
APK			
SD	69.23	72.99	70.83
SMP	54.70	59.32	57.11
SMA	39.22	67.22	50.29

Sumber: BPS DEIYAI

E. Kesehatan

Kabupaten Deiyai memiliki 1 unit Rumah Sakit, masing-masing 11 unit Puskesmas utama dan pembantu. Persentase penduduk yang menderita sakit terhadap jumlah penduduk dalam sehari-sehari pada tahun 2022 sebesar 0,14persen yang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, ataupun kegiatan sehari-hari.

Tabel 3.21. Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	0.10
Perempuan	0.18
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	NA
40 Persen Tengah	NA
20 Persen Teratas	NA
Deiyai	0.14

Sumber: BPS Deiyai

F. Perekonomian

Nilai PDRB Deiyai atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 1,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami

kenaikan sekitar 64 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1,49 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 841 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 873 milyar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Deiyai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,81 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Deiyai pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Kontruksi, yaitu mencapai 37,36 persen (angka ini meningkat dari 36,69 persen di tahun 2021).

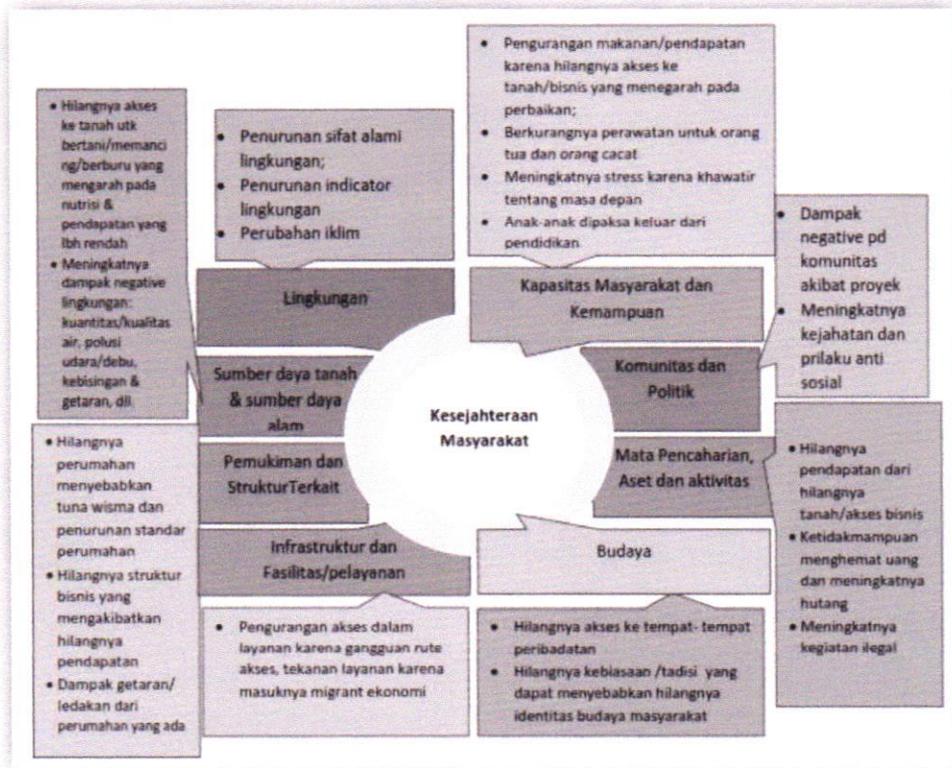
Tabel 3.22. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Deiyai Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1,76	0,65	-1,63	0,16	1,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,57	3,91	2,90	1,67	2,61
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,25	3,63	1,52	0,98	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>		3,44	0,55	2,63	3,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	11,28	3,91	-0,04	4,35	4,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,10	7,32	-2,87	0,49	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,97	7,08	-6,63	0,91	6,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,03	6,41	-0,30	0,99	2,63
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,08	1,21	1,00	4,12	4,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,11	2,17	-3,38	0,31	0,32
L	Real Estat/Real Estate Activities	12,42	8,13	0,95	2,31	3,73
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,23	5,93	1,26	1,18	2,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	10,36	3,56	0,38	-1,29	6,24
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,01	7,64	0,49	0,22	1,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,81	8,73	4,90	0,87	0,94
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,56	5,12	0,91	2,38	2,84
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		3,43	3,74	-0,35	1,27	3,81

Sumber: BPS Deiyai

G. Analisis Ekonomi Wilayah Terdampak

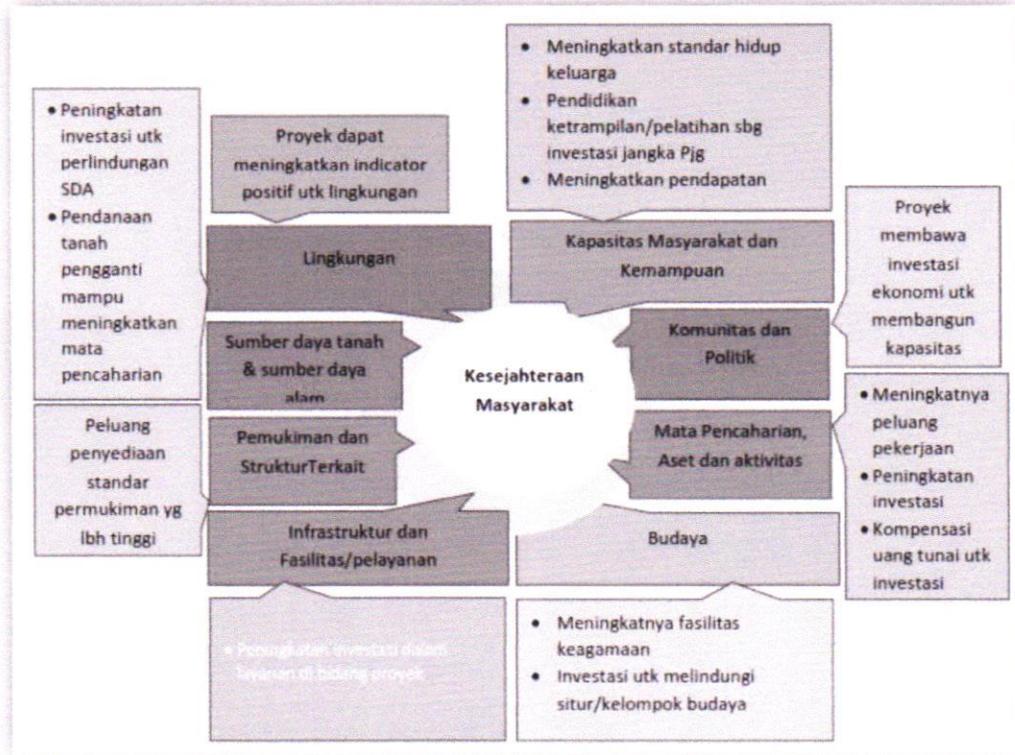
Mitigasi terhadap masyarakat yang akan terdampak pengadaan tanah perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Pemetaan yang dilakukan pada tahap awal rencana penentuan lokasi proyek sangat diperlukan mencakup aspek sosial, budaya, fisik, lingkungan, ekonomi, ancaman bencana, dsb. Untuk memberikan gambaran terhadap dampak apa saja yang kemungkinan dapat terjadi karena proyek pengadaan tanah, maka berikut ini disajikan kerangka sosial untuk menguraikan dampak yang dapat terjadi akibat pengadaan tanah. Upaya pemetaan dan kemampuan instansi/pihak yang berkepentingan dalam memperoleh kedetailan data terkait sosial-ekonomifisik-budaya, kondisi permukiman, lingkungan hidup, modal dan kapasitas masyarakat sebagaimana tersaji pada gambar berikut dapat menjadikan upaya mitigasi agar masyarakat yang terkena pengadaan tanah mampu mewujudkan hidup yang lebih sejahtera.



Sumber : *International Council on Mining & Metals, 2019)*
Gambar 3.14. Kerangka Sosial Untuk Menguraikan Dampak Terhadap Kesejahteraan Manusia

Kerangka pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya untuk mencapai masyarakat sejahtera setidaknya diperlukan 8 variabel untuk dipetakan dan dilakukan assessment dalam pengadaan tanah. Delapan variabel berupa layanan infrastruktur, permukiman dan struktur terkait, tanah-ekosistem dan sumberdaya alam, lingkungan hidup, modal dan kemampuan masyarakat, komunitas, aset – mata pencaharian dan budaya merupakan satu kesatuan variabel yang tidak terpisahkan. Semakin dalam dan detail proses assement yang dilakukan untuk memetakan dampak negatif yang kemungkinan dapat ditimbulkan karena adanya proyek pengadaan tanah, tentunya akan semakin dini upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan mitigasi yang tepat untuk pengurangan dampak. Pemetaan dan analisis dampak yang dilakukan sejak awal ini tentunya menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan anggaran dan memetakan keterlibatan pemangku kepentingan yang turut andil dalam pelaksanaan pengadaan tanah, permukiman kembali dan pemulihan kehidupan masyarakat. Poin penting yang ditekankan dalam skema ini yakni pengadaan tanah bukan hanya semata menyangkut aspek fisik semata, akan tetapi aspek non fisik

yang tidak tampak seperti kapasitas masyarakat, jaringan/relasi sosial, potensi sosial-ekonomi, kondisi sosial budaya menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat.

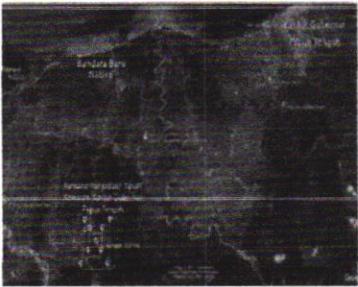
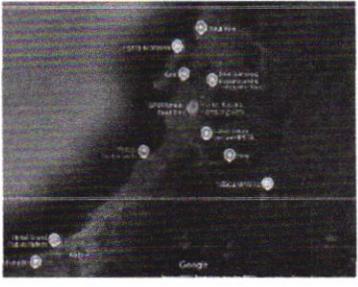


Sumber: Internasional Council on Mining and Metals, 2019
Gambar 3.15. Kerangka Sosial Untuk Menguraikan Dampak Terhadap Kesejahteraan Manusia

Selain memetakan dampak negatif, beberapa kemungkinan dampak positif yang dapat dibangun sebagai efek pengadaan tanah juga perlu diidentifikasi di lapangan, agar kemungkinan dampak positif tersebut dapat diimplementasikan dan dikembangkan. Gambar berikut mendeskripsikan bagaimana memetakan dampak positif dan memberikan kemungkinan upaya yang dapat dikembangkan oleh adanya proyek pengadaan tanah.

BAB IV
ASPEK TEKNIS

4.1 ANALISIS LOKASI

No.	Variabel	Lokasi 1 Distrik Wanggar Kampung Wanggar Makmur	Lokasi 2 Kampung Kimi Distrik Teluk Kimi
1	Site Lokasi		
2	ASPEK LEGAL	<p>Lokasi berada di Distrik Wanggaryang ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018- 2038, namun Kabupaten Nabire belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).</p>	<p>Lokasi berada dalam kawasan hutan</p>
3	ASPEK ADMINISTRASI	<p>Lokasi berada di kampung wanggar Makmur, distrik Wanggar, Kabupaten Nabire 30 km dari pusat kota Nabire/Bandara Daouw Aturure 19 km dari rencana Bandara baru.</p>	<p>Lokasi berada di kampung kimi, distrik teluk kimi, Kabupaten Nabire 17.6 km dari pusat kota Nabire dan 41.4 km dari Bandara Daouw</p>
4	ASPEK FUNGSIONAL	<p>Lokasi lahan telah memiliki akses jalan, namun dalam pengembangan kawasan dibutuhkan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan hotmix. Fasilitas umum seperti Sekolah telah tersedia didekat rencana pembangunan. Berdasarkan hasil survey</p>	<p>Lokasi ke kampung kimi telah memiliki akses jalan poros, namun lokasi menuju lahan pembangunan belum memiliki akses Terdapat fasilitas umum seperti Sekolah (2 SD, 2 SMP dan 1 SMA) telah tersedia didekat rencana pembangunan,</p>

		lapangan, terdapat sekolah SD, SMP dan SLTA. Jarak sekolah SD dan SMP berkisar 1,8 km dari lokasi pengadaan tanah dan lokasi sekolah SLTA berjarak 5,4 km dari lokasi	
5	ASPEK GEOGRAFIS	Kampung Wanggar Makmur merupakan desa terluas di distrik wanggar. Rencana lokasi pembangunan merupakan lahan dataran rendah dengan ketinggian 10-12 MDPL dengan topografi umumnya datar dan bergelombang.	Kampung kimi merupakan desa terluas kedua yaitu 26.37% dari luas wilayah distrik teluk kimi Rencana lokasi pembangunan merupakan lahan berbukit dan berada di Kawasan huta
6	ASPEK PROSPEK PENGEMBANGAN WILAYAH	Secara prinsip dalam pengembangan kawasan perubahan peruntukan dari kawasan agropolitan ke kawasan perkantoran pemerintah tidak bertentangan, namun pemerintah perlu melakukan relokasi kawasan agropolitan atau lahan pertanian ke daerah lainnya sebagai antisipasi ataupun perencanaan ketahanan pangan	Lokasi berada pada pusat pertumbuhan yang strategis dan cepat tumbuh berkembang serta potensial menjadi pusat pertumbuhan baru, dekat dengan pantai Boratei, Morin dan Monalisa. Berada pada area yang dekat dengan kawasan permukiman dan kawasan publik lainnya.
7	ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA	Berdasarkan data BPS 2015, Distrik wanggar termasuk dalam Satuan Permukiman transmigrasi, dengan pendatang dari Jawa dan Sulawesi jumlah penduduk kampung wanggar makmur (2020-2021) 1365 jiwa merupakan penduduk terbanyak di distrik wanggar namun dengan kepadatan penduduk terendah (23,88 jiwa/km ²) (BPS 2022)	Berdasarkan Data BPS 2023 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin menurut kampung/kelurahan di Distrik Teluk Kimi yaitu 3.808 Penduduk dan laju pertumbuhan 0,22%. persentase penduduk di desa kimi sebesar 22,00% dan kepadatan penduduk 66,02 per km ² .

7	ASPEK EKONOMI	Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pertanian dengan produk unggulan kakao dan palawija serta hortikultura Distrik wanggar terdapat 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 5 toko tidak terdapat Bank namun ada koperasi	Mata pencaharian penduduk adalah nelayan dan petani dengan mengelola kebun dan mengambil hasil hutan. Terdapat 1 pasar tanpa bangunan Belum ada bank dan koperasi
8	ASPEK KEBENCANAAN	zona rawan tinggi gempa zona rawan tinggi tsunami	zona rawan tinggi gempa zona rawan tinggi longsor zona rawan tinggi banjir
9	Aspek Pembiayaan	Lokasi berada pada daerah rawan banjir sehingga perlu ada biaya yang tinggi untuk penanganan banjir dan pengurukan tanah	Lokasi berada pada daerah longsor bencana sehingga perlu ada biaya yang tinggi untuk penanganan longsor dan pengurukan tanah

4.2 ANALISIS PEMILIHAN LOKASI MENGGUNAKAN METODE SWOT

Dalam pemilihan lokasi kawasan perkantoran Papua Tengah digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, yakni Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan, Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman. Berikut uraian kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di masing-masing usulan lokasi.

Tabel 0.1 Analisa SWOT Kekuatan dan kelemahan masing-masing usulan lokasi kawasan Perkantoran Papua Tengah

Lokasi	Kekuatan	Kelemahan
Lokasi Alt 1 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - lokasi pembangunan merupakan lahan dataran rendah dengan ketinggian 10-12 MDPL dengan topografi umumnya datar dan bergelombang; - Lokasi berada di kampung wanggar Makmur, distrik Wanggar, Kabupaten Nabire; - 30 km dari pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait lahan, informasi yang didapat bahwa sertifikat lahan masih milik perorangan, sehingga diperlukan proses balik nama menjadi milik Pemprov. - zona rawan tinggi gempa Kawasan rawan banjir

	<p>kota Nabire/Bandara Daouw Aturure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 km dari rencana Bandara baru; - Lokasi lahan telah memiliki akses jalan, namun dalam pengembangan kawasan dibutuhkan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan hotmix. Fasilitas umum seperti Sekolah telah tersedia didekat rencana pembangunan. <p>Berdasarkan hasil survey lapangan, terdapat sekolah SD, SMP dan SLTA. Jarak sekolah SD dan SMP berkisar 1,8 km dari lokasi pengadaan tanah dan lokasi sekolah SLTA berjarak 5,4 km dari lokasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dikategorikan aman karena lokasi yang dipilih jauh dari pantai 	
<p>Lokasi Alternatif 2 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kampung kimi ke pusat kota nabire kurang lebih 17.6 km. - Jumlah Wilayah Administrasi Kampung Kimi terdiri dari 3 Dusun, 3RW, dan 15 RT (BPS2023). - Fasilitas umum seperti Sekolah telah tersedia didekat rencana pembangunan: 2 Sekolah Dasar, 2 SMP dan 1 SMA (BPS 2023). 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses menuju lokasi pembangunan belum tersedia; - Masih berada dalam kawasan hutan (menggangu ekosistem flora dan fauna); - Lokasi pembangunan memiliki lahan dengan topografi berbukit; - Belum ada sarana dan prasarana ekonomi di Kelurahan Kimi; - zona rawan tinggi

		gempa; - zona rawan tinggi longsor; - zona rawan tinggi banjir;
--	--	---

Tabel 0.2 Analisa SWOT Peluang dan Tantangan masing-masing usulan lokasikawasan Perkantoran Papua Tengah

Lokasi	Peluang	Tantangan
Lokasi Alt 1 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah	Secara prinsip dalam pengembangan kawasan perubahan peruntukan dari kawasan agropolitan ke kawasan perkantoran pemerintah tidak bertentangan, namun pemerintah perlu melakukan relokasi kawasan agropolitan atau lahan pertanian ke daerah lainnya sebagai antisipasi ataupun perencanaan ketahanan pangan Lokasi berada pada pusat pertumbuhan yang strategis dan cepat tumbuh berkembang serta potensial menjadi pusat pertumbuhan baru Terintegrasi dengan jaringan prasarana lainnya (jaringan listrik, air minum) Potensi penggunaan air sungai di bendung wanggar sebagai sumber air bersih sangat dimungkinkan karena hanya berjarak + 6 km dan debit air yang cukup besar. Hanya saja untuk kebutuhan air bersih diperlukan pengelolaan kembali sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari	Sabagian Rencana kawasan DOB Papua tengah beradapada zonasi hutan sehingga perlu konfirmasi kepastian ke KLHK Lokasi berada pada daerah rawan banjir sehingga perlu ada biaya yang tinggi untuk penanganan banjir dan pengurukan tanah
Lokasi Alt 2	- Lokasi Kampung Kimi mempunyai potensi	- Rencana kawasan DOB Papua tengah

Kampung Karadiri, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire	untuk mengembangkan pariwisata, dimana batas sebelah utara berbatasan dengan pantai Boratei, Pantai Morin dan Pantai Monalisa - Lokasi kampung kimi dekat dengan Pelabuhan Samabusa Nabire - Lokasi sudah terintegrasi dengan jaringan listrik (PLN)	berada pada zonasi hutan sehingga perlu konfirmasi kepastian ke KLHK - Perlu menjaga ekosistem flora dan fauna
--	--	---

4.3 Matriks Kelemahan dan Kelebihan Masing-masing Alternatif Lokasi

Matriks kelemahan dan kelebihan masing-masing alternatif lokasi dengan berbagai indikator penilaian dan dilengkapi dengan range nilainya (aspek geografis, fungsional, keencanaan, biaya, potensi pengembangan, keamanan, infrastruktur eksisting, dll).

Berdasarkan matriks kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekurangan, peluang dan tantangan di masing-masing usulan lokasi, maka dilakukan analisis penilaian pada masing-masing aspek. Berikut lebih detailnya :

Tabel 0.3 Analisis Penilaian lokasi pada kelebihan dan kekurangan usulan lokasikawasan Perkantoran

NO.	VARIABEL	Lokasi Alt 1 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah	Bobot	Lokasi Alt 2 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah	Bobot
1	SITE LOKASI				

2	ASPEK LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi berada di Distrik Wanggar yang ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, namun Kabupaten Nabire belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) - Status lahan agar segera disertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan untuk percepatannya agar dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Status Lahan : Masyarakat Adat yang berada dalam Kawasan hutan 	1
3	ASPEK ADMINIS TRASI	<ul style="list-style-type: none"> - Status kepemilikan: Sertifikat (47.18%), Tanah Pelepasan adat (43.79%), Tanah Fasilitas Umum (6.5%), Tanah Restant Pelepasan (2.53%). - Jumlah RT 20 dan RW 6. (BPS, 2022) - Banyaknya keluarga pengguna listrik : 386, supply listrik hanya dari PLN. (BPS, 2023) 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Status kepemilikan: Masyarakat Adat - Jumlah RT 15 dan RW 3. (BPS, 2023) - Banyaknya keluarga pengguna listrik : 754, supply listrik hanya dari PLN. (BPS, 2023) 	0

4	ASPEK FUNGSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi lahan telah memiliki akses jalan, namun dalam pengembangan kawasan dibutuhkan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan hotmix ▪ Berdasarkan hasil survey lapangan, terdapat sekolah SD, SMP dan SLTA. Jarak sekolah SD dan SMP berkisar 1,8 km dari lokasi pengadaan tanah dan lokasi sekolah SLTA berjarak 5,4 km dari lokasi. Lokasi berada 30 km dari pusat kota Nabire/Bandara Daouw Aturure dan 19 km dari rencana Bandara baru 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke lokasi pembangunan belum tersedia - Terdapat beberapa sarana pendidikan :2 SD, 2 SMP dan 1 SMA - Lokasi berada 17.6 km dari pusat kota Nabire dan 41.4 km dari Bandara Daouw 	0
5	ASPEK GEOGRAFI	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Wanggar Makmur merupakan desa terluas di distrik wanggar. - Rencana lokasi pembangunan merupakan lahan dataran rendah dengan ketinggian 10-12 mdpl dengan topografi umumnya datar dan bergelombang. - Batas - batas tapak: <ul style="list-style-type: none"> o Utara: Hutan o Timur: Hutan o Barat: Perumahan Warga, Jalan Poros Wanggar Sari o Selatan: Hutan 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Desa kimi merupakan desa terluas kedua yaitu 26.37% dari luas wilayah distrik teluk kimi - Lokasi berkisar antara 1-7 mdpl - Batas - batas tapak: <ul style="list-style-type: none"> o Utara: Sungai Kimi, Pemukiman Kampung Kimi Nusantara o Timur: Kawasan 	1

				<p>Hutan Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> o Barat: Sungai Kimi o Selatan: Gunung mamae dan Telaga Mamae. 	
6	ASPEK PROSPEK PENGEMBANGAN WILAYAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara prinsip dalam pengembangan kawasan perubahan peruntukan dari kawasan agropolitan ke kawasan perkantoran pemerintah tidak bertentangan, - Pemerintah perlu melakukan relokasi kawasan agropolitan atau lahan pertanian ke daerah lainnya sebagai antisipasi ataupun perencanaan ketahanan pangan 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi berada pada pusat pertumbuhan yang strategis dan cepat tumbuh berkembang serta potensial menjadi pusat pertumbuhan baru, dekat dengan pantai Boratei, Morin, Monalisa, dan Pelabuhan Samabusa Nabire - Berada pada area yang dekat dengan kawasan permukiman dan kawasan publik lainnya (SPBU Kimi, Kompi C Batalion dan SatBrimob). 	1
7	ASPEK SOSIAL, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah angkatan kerja: 78.857 orang. (BPS, 2023) ▪ Jumlah Penduduk kelurahan setempat : 9.747 orang. (BPS, 2022) ▪ Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dengan produk 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah angkatan kerja: 78.857 orang. (BPS, 2023); - Jumlah Penduduk kelurahan setempat: 3.808 orang. (BPS, 2023); - Mata 	1

	<p>unggulan kakao dan palawija serta hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah ASN eksisting Kabupaten Nabire : 4.433 orang. (BPS Nabire 2024) ▪ Stabilitas keamanan konflik sosial: aman dan bertoleransi. ▪ Pariwisata: dekat dengan Air Terjun PT.JDIPI (10.5 km) ▪ Kesehatan/sanitasi: terdapat 2 puskesmas, 3 puskesmas pembantu, 3 apotek, 1 poskesdes, (BPS, 2024) ▪ Pendidikan : terdapat 4 TK, 10 SD, 4 SMP, 1 SMA, 1 SMK, dan tidak ada Institut/Universitas). Tempat ibadah : terdapat 7 masjid, 36 mushola, 30 gereja protestan, 6 gereja katolik dan 2 Pura. (BPS Kabupaten Wanggar, 2024) ▪ Transportasi : akses menuju dari/dan ke lokasi melalui jalur darat dan dapat dilalui kendaraan sepanjang tahun. ▪ Fasilitas lainnya : 	<p>pencarian: nelayan dan petani dengan mengelola kebun dan mengambil hasil hutan;</p> <p>Jumlah ASN eksisting Kabupaten Nabire : 4.433 orang. (BPS Nabire 2024);</p> <p>Stabilitas keamanan konflik sosial: Ada potensi permasalahan;</p> <p>Pariwisata: dekat dengan pantai Boratei, Morin dan Monalisa;</p> <p>Kesehatan/sanitasi: terdapat 1 puskesmas pembantu dan kemudahan mencapai sarana kesehatan: Rumah sakit (mudah), Rumah Sakit Bersalin (sangat sulit), Poliklinik (Mudah). (BPS, 2023);</p> <p>Pendidikan : terdapat 2 SD, 2 SMP dan 1 SMA;</p> <p>Tempat ibadah : terdapat 8 masjid, 3</p>	
--	---	---	--

		<p>terdapat 1 pos pembantu, kekuatan sinyal sangat kuat dengan 4G/LTE. (BPS, 2024)</p>		<p>mushola, 29 gereja protestan dan 1 gereja katolik (BPS Kabupaten Teluk Kimi, 2024); Transportasi : akses menuju dari/dan ke lokasi melalui jalur darat dan dapat dilalui kendaraan sepanjang tahun dan terdapat angkutan tanpa trayek tetap. (BPS, 2023); Fasilitas lainnya : tidak terdapat kantor pos/pos keliling/agen ekspedisi swasta, kekuatan sinyal sangat kuat dengan 4G/LTE. (BPS Kabupaten Nabire, 2024)</p>	
8	ASPEK EKONOMI	<p>Terdapat 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 5 unit toko dan 1 warung/kedai makanan. (BPS, 2022) Tidak terdapat Bank Umum/Swasta/Kredit Rakyat. (BPS, 2022) Terdapat 1 unit koperasi unir desa</p>	0	<p>Terdapat 1 pasar swadaya/pondok jualan Tidak terdapat Bank Umum/Swasta/Kredit Rakyat. (BPS Kecamatan Teluk Kimi, 2023) Tidak terdapat koperasi unit desa/simpan</p>	0

		dan 2 unit koperasi simpan pinjam. (BPS, 2022)		pinjam/lainnya. (BPS Kecamatan Teluk Kimi, 2023)	
9	ASPEK KEBENCANAAN	<p>Sebagian wilayah merupakan rawan banjir sehingga akan memerlukan biaya yang tinggi untuk penanganan banjir dan urugan tanah.</p> <p>Belum memiliki sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini khusus tsunami, dan perlengkapan keselamatan bencana. (BPS, 2023)</p> <p>Belum memiliki rambu dan jalur evakuasi bencana.</p> <p>Kategori kebencanaan: Banjir: risiko (Sedang-Tinggi)</p> <p>Gempa Bumi: risiko (Sedang-Tinggi)</p> <p>Likuifaksi : risiko (Sedang-Tinggi)</p>	0	<p>Belum memiliki sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini khusus tsunami, dan perlengkapan keselamatan bencana.</p> <p>Belum memiliki rambu dan jalur evakuasi bencana.</p> <p>Kategori kebencanaan: Banjir : Sisi utara distrik kimi risiko (Sedang-Tinggi), sumber: inaRiskBNPB</p> <p>Gempa Bumi: risiko (Sedang-Tinggi), sumber: inaRiskBNPB</p> <p>Longsor: risiko (Sedang-Tinggi), sumber: inaRiskBNPB</p> <p>Likuifaksi : sisi utara distrik kimi risiko (Sedang-Tinggi), sumber: inaRiskBNPB</p>	0
10	ASPEK PEMBIAYAAN	Lokasi berada pada daerah rawan banjir sehingga perlu ada biaya yang tinggi untuk penanganan banjir dan pengurukan tanah	0	Lokasi berada pada daerah longsor bencana sehingga perlu ada biaya yang tinggi untuk penanganan longsor, pengurukan tanah dan talud	0
	TOTAL BOBOT		6		4

Berdasarkan tabel penilaian di atas, maka nilai terbesar yaitu pada lokasi hasil akhir penilaian didapatkan kesimpulan bahwa Lokasi Alt 1 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Lokasi 1 ini sangat direkomendasikan untuk rencana pengembangan Kawasan Perkantoran Provinsi Papua Tengah.

4.4 ANALISIS SPESIFIK LOKASI TERPILIH

Lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah berada di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah sesuai Surat Rekomendasi No. 522/72/DLHKP/IV/2023 tanggal 12 April 2023. Distrik Wanggar sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, sebagai kawasan Agropolitan:



Gambar 4.1. Peta Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

4.5 ANALISIS MIKRO TERHADAP LOKASI TERPILIH

A. Rekomendasi tangki septik komunal yang tercantum pada dokumen

FS perlu diganti menjadi Sewage Treatment Plan (STP)

Jaringan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah merupakan infrastruktur yang cukup penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena kawasan merupakan kawasan baru, maka pengembangan jaringan air limbah di wilayah perencanaan direncanakan dengan sistem pembuangan air limbah terpusat (*offsite*). Sistem pembuangan air limbah terpusat (*offsite*) terdiri dari:

1. Seluruh saluran pembuangan; dan
2. Bangunan pengolahan air limbah.

Instalasi pengolahan lumpur tinja perlu dilakukan secara terpadu dalam Kawasan. Rencana saluran pembuangan limbah diarahkan untuk sistem penyaluran terpisah seluruhnya untuk air limbah baik domestik maupun non domestik. Untuk realisasinya diperlukan adanya pengkajian untuk melaksanakan studi kelayakan manajemen pengelolaan tinja terpadu. Indikator utama dalam menghitung air limbah adalah dengan menggunakan indikator jumlah penduduk dimana,

$$\begin{aligned} & \text{Timbulan Air Limbah per orang per hari} \\ & = 80\% \times \text{jumlah penggunaan air bersih per hari} \\ & = 80\% \times 120 \text{ L/hari} \\ & = 96 \text{ L/orang perhari} \end{aligned}$$

Dengan proporsi non domestik:

Kantor : 10% domestik

Fasilitas umum : 10%

domestik

Fasilitas hidran umum : 5% domestik

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan produksi limbah limbah di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah:

Tabel 3.28 Debit Rata-Rata Air Limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

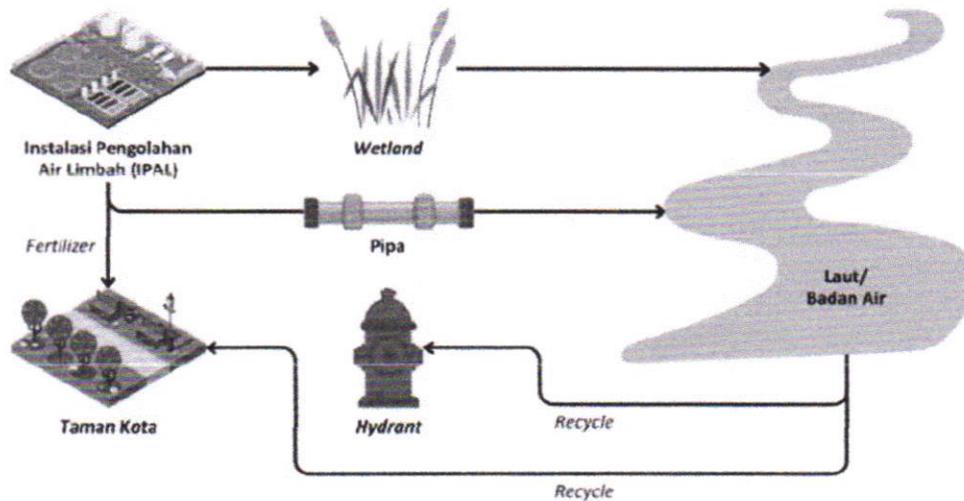
Perkiraan Penduduk (Jiwa)	Limbah Domestik L/Hr	Non Domestik			Total Produksi Limbah (L/Hr)
		Kantor 10% x domestik (L/Hr)	Fasilitas umum 5% x domestik (L/Hr)	Fasilitas hidran umum 5% x domestik (L/Hr)	
14.767	1.417.608	141.761	70.880	70.880	1.701.130

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah memiliki total produksi air limbah yaitu 1.701.130 L/hari dengan limbah domestik 1.415.608 L/Hari dan 28.969 L non domestik pada jenis perkantoran.

A. Justifikasi teknis terkait penentuan lokasi IPAL maupun STP pada dokumen FS

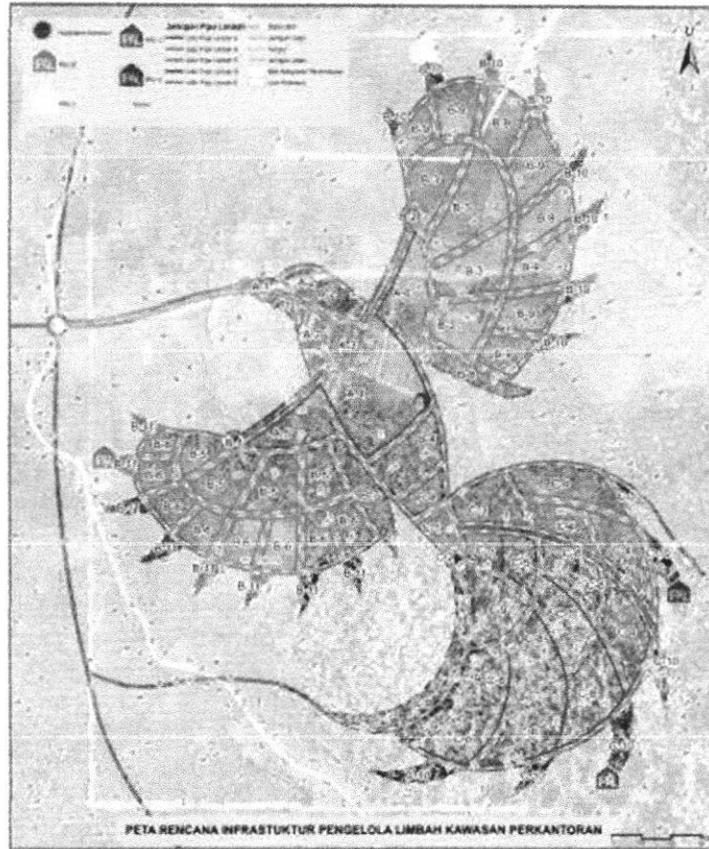
Konsep pengelolaan air limbah dirancang untuk dapat menghasilkan air yang aman untuk lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan limbah cair dengan sistem pengolahan yang tepat sesuai dengan fungsi bangunan. Pengolahan limbah diarahkan pada penggunaan ulang (*recycle*) air limbah yang sudah diolah untuk *hydrant* maupun penyiraman tanaman di taman kota. Konsep perencanaan pengelolaan air limbah di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.17 Konsep Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Secara umum, sistem pengelolaan limbah baik rumah tangga ataupun limbah aktivitas komersial di sekitar kawasan masih menggunakan sistem pengelolaan individu dan masih menggunakan sistem limbah *septic tank*. Dengan adanya perencanaan pengembangan Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah sebagai kawasan perkantoran diperlukan sistem pengelolaan limbah terpusat seperti IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman maupun *septic tank* komunal. Penanganan air limbah skala kawasan agar meringankan biaya investasi dan mempermudah dalam penanganannya. Berikut ini merupakan peta rencana pengelolaan limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.18 Peta Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

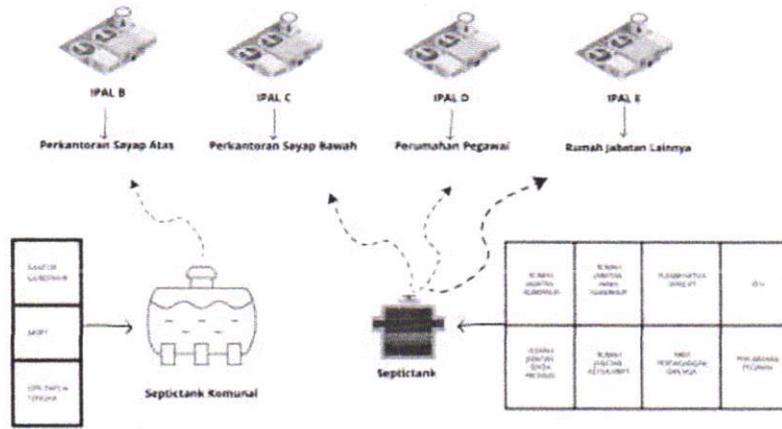
Tabel 5.16 Titik Koordinat Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

No	Keterangan	X	Y	Z
1	Septictank Komunal	543004,523	9616056,495	101,862
2	IPAL B	542578,942	9615801,512	105,200
3	IPAL C	543008,078	9616923,667	95,359
4	IPAL D	543462,175	9615125,625	101,085
5	IPAL E	543641,299	9615586,592	82,321

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Penentuan Lokasi IPA Skala Kawasan dapat diletakkan dengan memperhatikan kontur terendah pada site. *Septic tank* komunal direncanakan melayani gedung perkantoran utama, yakni kantor Gubernur, kantor MRPT, dan kantor DPRD Provinsi Papua Tengah. Ilustrasi sistem pengolahan air limbah di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Selain rencana pengembangan tersebut, terdapat alternatif lain berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPALD-T sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

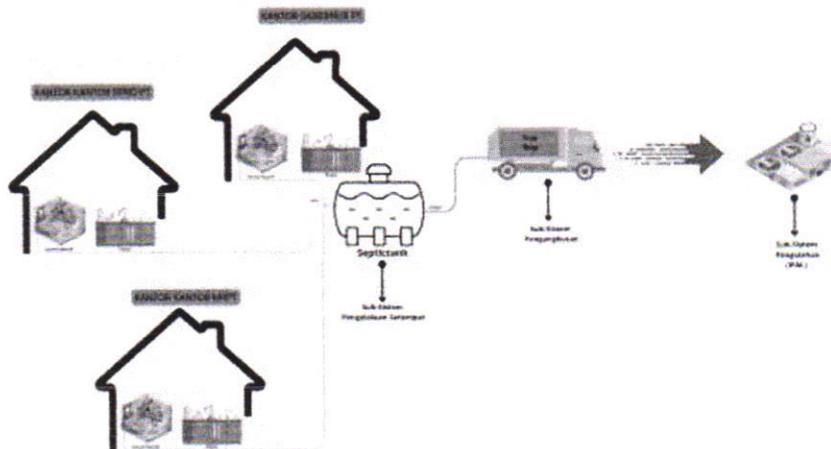
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akan tetapi, pembangunan SPALD-T tersebut cukup sulit dan memerlukan investasi yang cukup besar.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.19 Alur Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Limbah air kotor dan tinja yang berasal dari kantor gubernur, kantor MRPT, dan kantor DPRD Provinsi Papua Tengah akan ditampung oleh *septic tank* komunal. Air kotor selanjutnya masuk dalam IPAL B untuk dilakukan pengolahan. Skema pengolahan air limbah pada *septic tank* komunal dapat dilihat di Gambar.

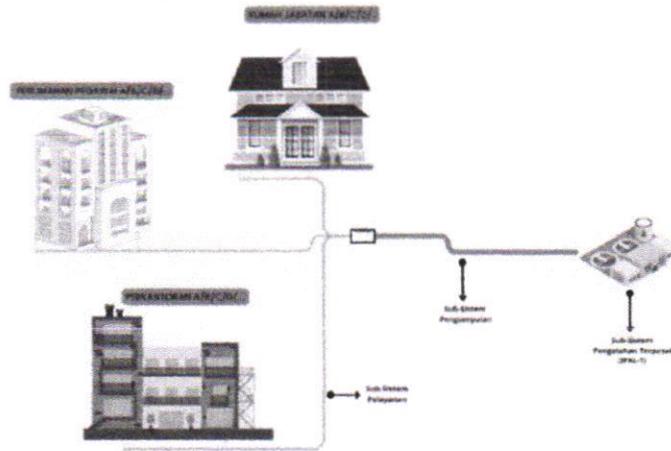


Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.20 Skema Pengolahan Air Limbah Septictank Komunal

Sementara itu, limbah air kotor dan tinja yang berasal dari kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa akan ditampung oleh *septic tank* di masing-masing bangunan. Limbah air kotor selanjutnya diteruskan pada IPAL C, D, dan IPAL E. Untuk limbah tinja selanjutnya dapat diproses pada IPLT eksisting yang berada di area TPA Wanggar. Oleh karena itu, diperlukan adanya program

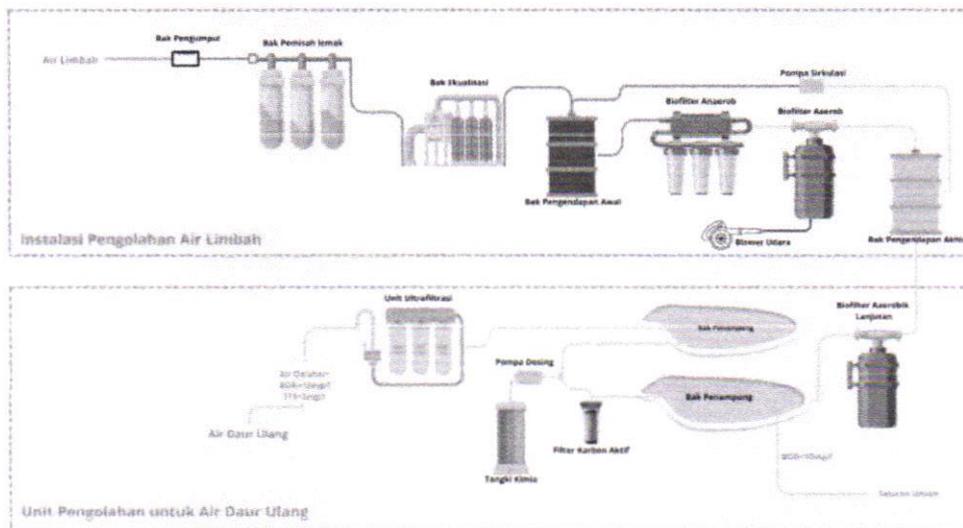
reaktivasi IPLT Wanggar oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dengan bantuan dari BPPW Papua.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.21 Skema Pengolahan Air Limbah IPAL Terpusat

Seperti yang telah dijelaskan dalam Gambar 5.17, bahwa pengolahan limbahselanjutnya akan ditujukan untuk penggunaan ulang (*recycle*) air pada *hydrant* maupun untuk penyiraman tanaman di taman kota, oleh karena itu diperlukan adanya unit pengolahan lanjutan seperti yang tergambar dalam skema berikut ini.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.22 Unit Pengolahan Lanjutan untuk Daur Ulang Air

Pengolahan lanjutan untuk daur ulang air menggunakan skema IPAL Biofilter. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob dan aerob adalah proses pengolahan air limbah yang menggabungkan proses anaerob dan aerob untuk menurunkan zat organik (BOD dan COD), amonia, deterjen, padatan tersuspensi (SS), fosfat dan lainnya. Biofilter anaerob-aerob memiliki beberapa kelebihan, antara lain: biaya operasi yang rendah, lumpur yang dihasilkan relatif sedikit, dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor, suplai

udara untuk aerasi relatif kecil, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar, dan dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan baik (Pratiwi, 2017).

B. Perlu di detailkan terhadap analisis *water demand* dan pengelolaannya

Pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Nabire masih belum menjangkau ke seluruh distrik. Hanya Distrik Nabire yang sudah terlayani dengan jumlah pelanggan sebanyak 1.483 orang dengan air yang disalurkan sebanyak 583.659 m³. Penyedia air bersih di Kabupaten Nabire yaitu PDAM Tirta Adrian. Kapasitas dan produksi air minum terbesar berada pada sumber air minum sumur dangkal sebesar 48,29% diikuti sumber air minum sungai/air permukaan sebesar 41,41% dan 10,30% dari sumber air minum artesis/bor. Pelayanan air bersih sistem perpipaan di Kawasan Perkotaan Nabire dikelola oleh PDAM Kabupaten Nabire. Tingkat pelayanan sekitar 21% dari jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Nabire. Pemakaian air rata-rata 130 l/orang/h.

Rencana pengelolaan sumber daya air pada dasarnya berupa pemanfaatan, perlindungan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan yang bersifat spesifik dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh (hulu hilir), dan berkelanjutan (antar generasi). Rencana sistem jaringan sumber daya air di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berupa sistem jaringan Perpipaan untuk distribusi air bersih. Kebutuhan akan air bersih Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah diproyeksikan akan terus bertambah seiring perkembangan kawasan, perdagangan dan jasa dan kegiatan lainnya. Sumber air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah adalah jaringan distribusi dan sumur pompa Pamsimas. Perhitungan proyeksi kebutuhan air baku digunakan standar 80 L/dt dengan target pelayanan untuk Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar 100% penduduk dapat terlayani jaringan air bersih perpipaan. Secara garis besar standar kebutuhan penyediaan air bersih adalah:

1. Kebutuhan penyediaan air bersih di wilayah perencanaan dengan asumsi Kapasitas
2. Kebutuhan air bersih domestik adalah sebesar 80 liter/orang/perhari (berdasarkan kategori tingkat pelayanan menurut jumlah penduduk).
3. Nilai kebutuhan jaringan air minum untuk industri sebesar 10% dari kebutuhan domestik;
4. Nilai kebutuhan jaringan air minum untuk fasilitas sosial dan umum sebesar 5% dari kebutuhan domestik;
5. Nilai kebutuhan akan hidran air umum, diambil 5% dari kebutuhan domestik;
6. Faktor kehilangan atau kebocoran diperkirakan sebesar 20%.

Perhitungan rencana pemenuhan kebutuhan air bersih Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Perkiraan Penduduk (Jiwa)	Domestik 80lt/jiwa (lt)	Non Domestik			Kebocoran 20%xdomestik (lt)	Jumlah Kebutuhan (lt)
		Kantor 10%xdomestik (lt)	Fasilitas sosum 5%xdomestik (lt)	Fasilitas hidran umum 5%xdomestik (lt)		
14.767	1.181.340	118.134	59.067	59.067	236.268	1.653.876

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Dari hasil analisis pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa di masa mendatang, kebutuhan air minum di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah sebesar 1.181.340 lt untuk kebutuhan domestik, 118.134 lt untuk kebutuhan perkantoran, 59.067 lt untuk kebutuhan fasilitas umum, 59.067 untuk hidran umum, dan 236.268 sebagai antisipasi kebocoran. Sehingga diperoleh jumlah kebutuhan air sebesar 1.653.876 lt.

C. Teknologi pengelolaan Air minum yang paling murah serta mempertimbangkan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

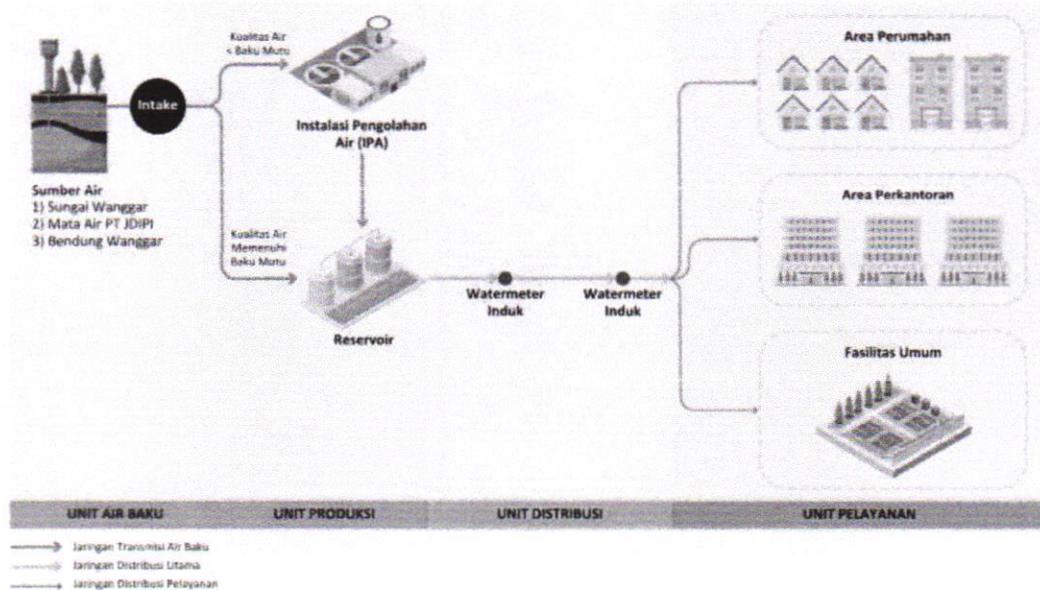
Sistem jaringan air minum atau air bersih di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah bersumber dari air permukaan (Sungai Wanggar), mata air PT JDIPI, dan Bendung Wanggar. Kawasan ini memiliki potensi air tanah sekitar 150-200 meter di bawah permukaan. Pendistribusian air bersih di masa mendatang disalurkan dengan menggunakan sistem pompa. Oleh karena itu diperlukan adanya rencana pengembangan jaringan air minum berupa rencana jaringan perpipaan, pengadaan bangunan penampungan air, dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air.

a. Bangunan Penampungan Air

Bangunan ini berupa reservoir. Reservoir merupakan bangunan penampungan air minum sebelum dilakukan pendistribusian ke pelanggan atau masyarakat.

b. Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Instalasi Pengolahan Air (IPA) merupakan sistem yang berfungsi untuk mengolah kualitas air baku sesuai standar mutu sehingga siap untuk di konsumsi. Pengembangan IPA ini disesuaikan dengan hasil uji laboratorium kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi terhadap sumber air, khususnya yang berasal dari Sungai Wanggar. Hal ini dikarenakan keberadaan pertambangan emas di Sungai Wanggar memunculkan adanya potensi kontaminasi logam berat dalam air sungai tersebut.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.10 Skema Sistem Penyediaan Air Bersih Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Rencana pemenuhan kebutuhan akan air bersih dilakukan dengan menyediakan air bersih bagi seluruh wilayah dan peningkatan jaringan sampai ke seluruh area di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Alur pendistribusiannya dimulai dari sumber air. Rencana lokasi sumber air baku, berada pada 7-8 km sisi selatan kawasan. Baku mutu air yang baik akan disalurkan menuju reservoir, sedangkan baku mutu air yang buruk diarahkan masuk ke Instalasi Pengolahan Air Bersih terlebih dahulu. Air dengan kualitas baik merupakan air yang telah memenuhi parameter wajib dan parameter khusus air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (lihat tabel Tabel 5.10 dan Tabel 5.11). Proses selanjutnya yaitu pendistribusian kepada sambungan pelanggan melalui pipa distribusi. Alur pendistribusian air dapat dilihat pada Gambar 5.10.

Tabel 5.10 Parameter Wajib Air Minum

No	Jenis Parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode Pengujian
Mikrobiologi				
1	<i>Escherichia coli</i>	0	CFU/100ml	SNI/APHA
2	Total Coliform	0	CFU/100ml	SNI/APHA
Fisik				
3	Suhu	Suhu udara ± 3	°C	SNI/APHA
4	Total Dissolve Solid	< 300	mg/L	SNI/APHA
5	Kekeruhan	< 3	NTU	SNI atau yang setara
6	Warna	10	TCU	SNI/APHA
7	Bau	Tidak berbau	-	APHA
Kimia				
8	pH	6,5 – 8,5	-	SNI/APHA
9	Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻) (terlarut)	20	mg/L	SNI/APHA
10	Nitrit (sebagai NO ₂ ⁻) (terlarut)	3	mg/L	SNI/APHA
11	Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺) (terlarut)	0,01	mg/L	SNI/APHA
12	Besi (Fe) (terlarut)	0,2	mg/L	SNI/APHA
13	Mangan (Mn) (terlarut)	0,1	mg/L	SNI/APHA
14	Sisa klor (terlarut)	0,2 – 0,5 dengan waktu kontak 30 menit	mg/L	SNI/APHA
15	Arsen (As) (terlarut)	0,01	mg/L	SNI/APHA
16	Kadmium (Cd) (terlarut)	0,003	mg/L	SNI/APHA
17	Timbal (Pb) (terlarut)	0,01	mg/L	SNI/APHA
18	Flouride (F) (terlarut)	1,5	mg/L	SNI/APHA
19	Aluminium (Al) (terlarut)	0,2	mg/L	SNI/APHA

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Tabel 5.11 Parameter Khusus Air Minum Wilayah Pertambangan Minyak, Gas, Panas Bumi, Sumber Daya Mineral

No	Jenis Parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode Pengujian
1	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) (terlarut)	0,05 – 0,1	mg/L	SNI/APHA
2	Merkuri (Hg)	0,001	mg/L	SNI/APHA
3	Tembaga (Cu)	2	mg/L	SNI/APHA
Radioaktif				
4	Gross alpha activity	0,1	Bq/L	SNI/APHA
5	Gross beta activity	1	Bq/L	SNI/APHA
6	Hidrokarbon poliaromatis	0,0007	mg/L	SNI/APHA
7	Nikel (Ni)	0,07	mg/L	SNI/APHA
8	Timbal	0,01	mg/L	SNI/APHA
9	Amonia (NH ₃) (terlarut)	1,5	mg/L	SNI/APHA
10	Fenol (C ₆ H ₆ O) (C ₆ H ₅ OH)			SNI/APHA

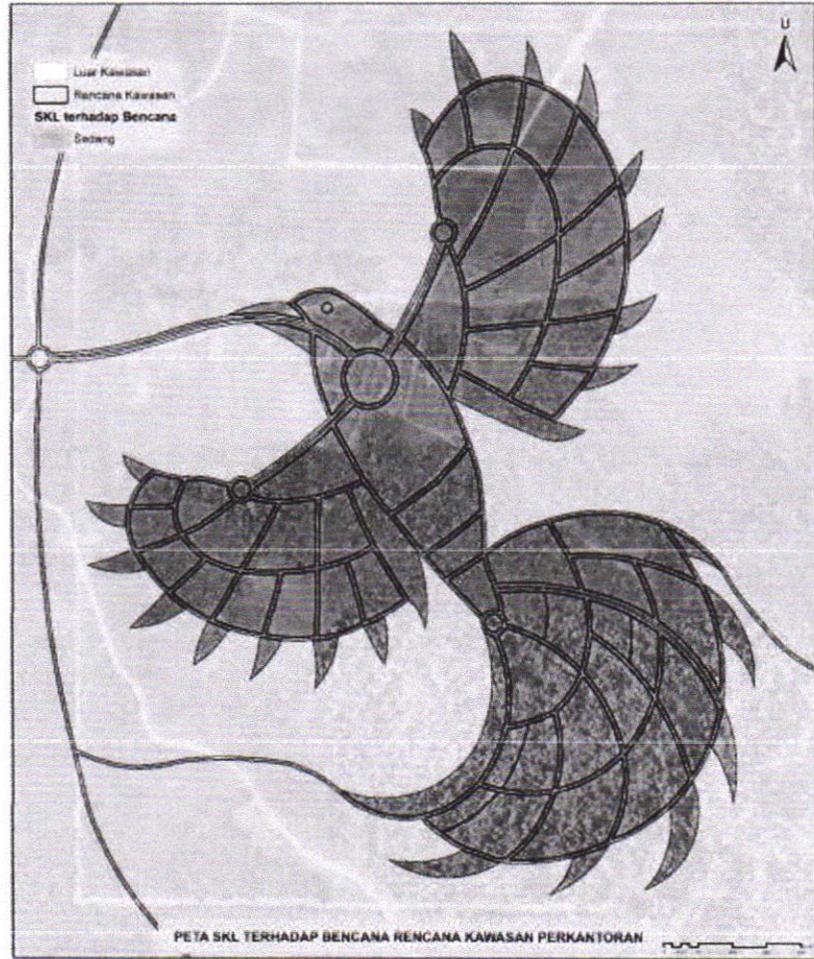
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Kajian kebencanaan dan daya dukung tanah pada lokasi, antara lain

A. Kajian Kebencanaan Geologi

SKL terhadap bencana ditujukan untuk mengetahui tingkat kebencanaankhususnya dari aspek geologi untuk menghindari adanya kerugian.

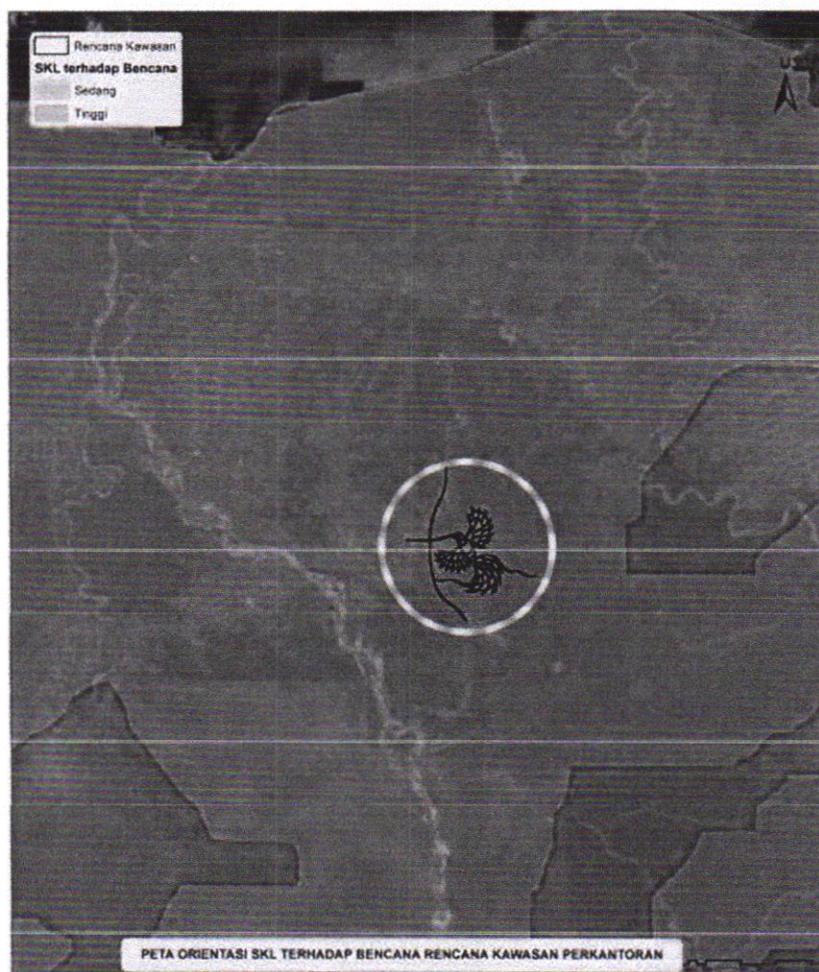
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Kawasan Ibu Kota



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 3.16 Peta SKL terhadap Bencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Provinsi Papua Tengah memiliki SKL terhadap bencana dengan klasifikasi sedang di seluruh kawasan. Peta tersebut didasarkan pada data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait peta rawan bencana geologis. Berikut ini merupakan hasil SKL terhadap bencana di wilayah yang lebih luas.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

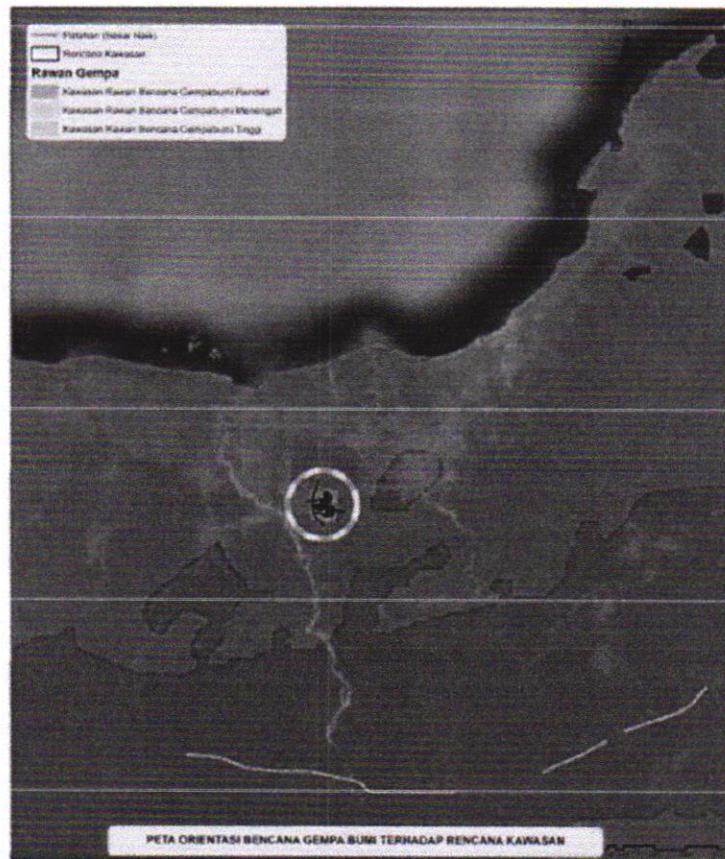
Gambar 3.17 Peta Orientasi SKL terhadap Bencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Hal tersebut berhubungan dengan kondisi kerawanan bencana di skala regional yang menunjukkan bahwa Kabupaten Nabire berada di atas 3 (tiga) lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan akan terjadinya bencana gempa bumi (Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, 2023a). Pada 26 November 2004, terjadi gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter di kabupaten ini. Bahkan menurut Badan Geologi Amerika Serikat, gempa tersebut berkekuatan 7,1 SR. Lembaga observasi gempa di Hongkong dan Australia pun mencatat kekuatan gempa tersebut mencapai 7,2 SR. Menurut informasi dari Pusat Gempa Nasional, gempa itu terjadi pukul 09.25.04 WIB. Pusat gempa terletak pada 3.52 LS-135.47 BT, kedalaman 35 km (detikNews, 2004). Menurut Kepala Bidang Gempa Bumi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Pusat, terjadi sekitar 59 gempa susulan terhitung sejak 26 November 2004.

Gempa yang pernah terjadi di tahun 2004 mengakibatkan Kabupaten Nabire kehilangan daya listrik dan telepon secara total. Bandara Nabire pun mengalami kerusakan. Besarnya dampak yang diakibatkan dari gempa ini

menyebabkan seluruh kota lumpuh (Reba, 2022). Selain menimbulkan banyak korban jiwa, gempa Nabire juga merusak rumah warga, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Kurang lebih 178 rumah warga terbakar dan 150 rumah lainnya roboh (Rozie, 2020). Dengan melihat kondisi ini, mitigasi bencana di masa mendatang perlu menjadi fokus dalam pembangunan. Penentuan rencana lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi perlu diikuti dalam proses perencanaan. Tidak hanya itu, kekokohan struktural bangunan juga perlu diperhatikan karena dapat meminimalisir kemungkinan kecelakaan akibat robohnya bangunan (Gayatri & Purwanto, 2007).

Orientasi Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah terhadap lokasi patahandaan kerawanan bencana skala regional dapat dilihat pada peta berikut ini.



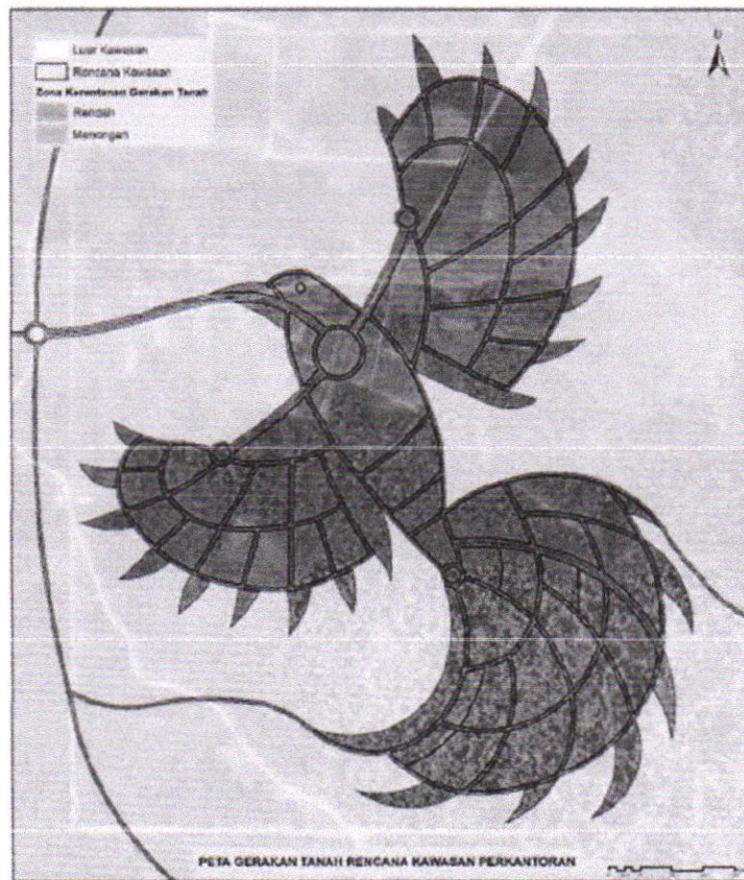
Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 3.18 Peta Orientasi Bencana Gempa Bumi Terhadap Lokasi Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

B. Kajian Kebencanaan Geoteknik

Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah memiliki ancaman dari beberapa bencana, antara lain: banjir, gerakan tanah, dan gempa. Kabupaten Nabire juga memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap terjadinya bencana banjir karena memiliki curah hujan yang tinggi (Mustafa, 2023). Berkaitan dengan hal tersebut, pada September Tahun 2022, tercatat ada 11 kampung di empat distrik dilanda banjir, yakni Nabire Barat, Wanggar, Makimi, dan Uwapa (Costa, 2022). Berikut ini merupakan pembahasan terkait kondisi kerentanan gerakan tanah di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

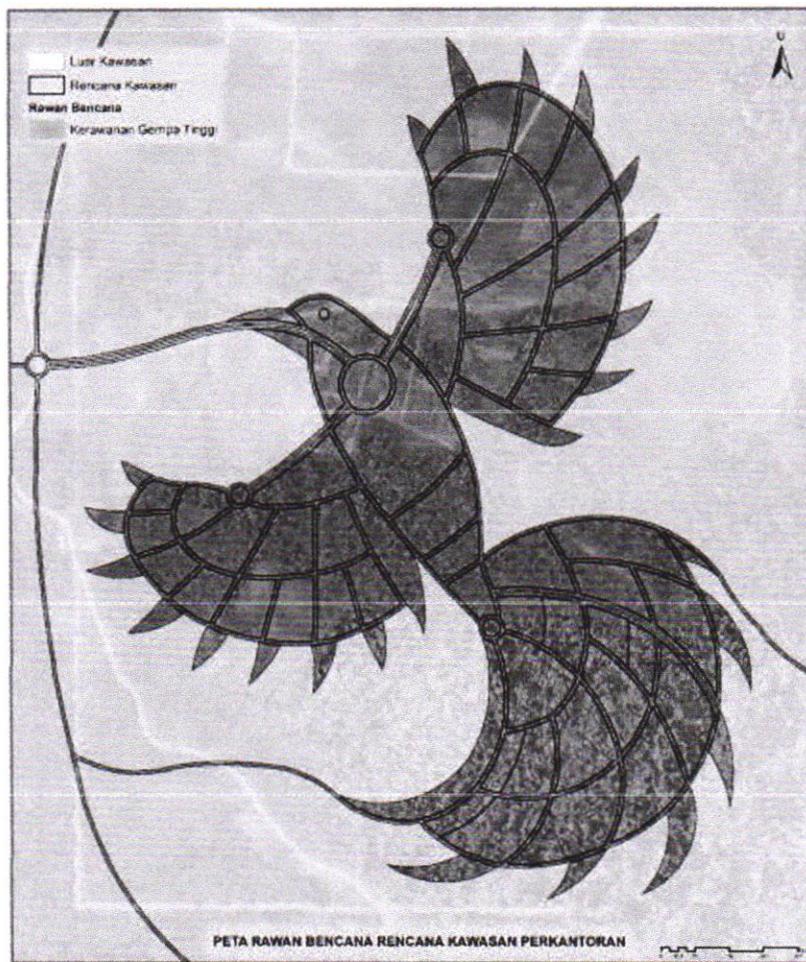
Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah termasuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah. Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.16. Zona kerentanan gerakan tanah rendah memiliki luas sebesar 4,63 hektare atau 4,06 persen. Zona ini dapat ditemukan pada bagian sayap kanan burung. Sementara itu, zona kerentanan gerakan tanah menengah dapat ditemui hampir diseluruh kawasan. Luas dari zona kerentanan gerakan tanah menengah adalah 109,54 hektare atau 95,94 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pada saat pembangunan.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

**Gambar 2.16 Peta Kerentanan Gerakan Tanah
Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah**

Selain termasuk zona dengan kerentanan gerakan tanah, Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah juga termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa tinggi (lihat Gambar 2.17 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah). Dengan demikian, mitigasi bencana perlu dipersiapkan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 2.17 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

2. Kajian Hidrologi

Tutupan lahan di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berupa hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering bercampur semak. Berdasarkan hasil observasi lapangan, didapatkan temuan bahwa kawasan ini masih berupa lahan non-terbangun.

Debit limpasan aliran permukaan (*run off*) adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau dan lautan. Rumus perhitungan run-off adalah sebagai berikut.

Koefisien air larian merupakan perbandingan antara jumlah air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah dengan jumlah air hujan yang jatuh dari atmosfer. Nilai koefisien pengaliran berkisar antara 0 - 1 bergantung dari jenis tanah, vegetasi, karakteristik tata guna lahan dan konstruksi permukaan tanah. Berikut merupakan tabel koefisien aliran air.

Tabel 3.20 Koefisien Air Limpasan Menurut Tipe Daerah Aliran

Tipe Daerah Aliran	Kondisi	Koefisien
Rerumputan	Tanah pasir, datar, 2%	0,05 – 0,1
	Tanah pasir, rata-rata, 2-7%	0,10 – 0,15
	Tanah pasir, curam, 7%	0,15 – 0,20
	Tanah gemuk, datar 2%	0,13 – 0,17
	Tanah gemuk, rata-rata, 2-7%	0,18 – 0,22
	Tanah gemuk, curam, 7%	0,25 – 0,35
Business	Daerah kota	0,75 – 0,95
	Daerah pinggiran	0,50 – 0,70
Perumahan	Daerah "single family"	0,30 – 0,50
	"Multi units" terpisah-pisah	0,40 – 0,60
	"Multi units" tertutup	0,60 – 0,75
	"Suburban"	0,25 – 0,40
	Daerah rumah <i>apartment</i>	0,50 – 0,70
Industri	Daerah ringan	0,50 – 0,80
	Daerah berat	0,60 – 0,90
Pertamanan, kuburan	-	0,10 – 0,25
Tempat bermain	-	0,20 – 0,35
Halaman kereta api	-	0,20 – 0,40
Daerah yang tidak terbangun	-	0,10 – 0,30
Jalan	Beraspal	0,70 – 0,95
	Beton	0,80 – 0,95
	Batu	0,70 – 0,85
Jalanan naik	-	0,70 – 0,85
Atap	-	0,70 – 0,95

Sumber: Wesli, 2008 dalam Atmaja & Irianto, 2021

Kondisi tutupan lahan di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah eksisting berupa hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering bercampur semak. Oleh karena itu, koefisien air limpasan yang digunakan adalah koefisien daerah yang tidak terbangun dengan nilai antara 0,10 sampai 0,30.

Tabel 3.21 Hasil Perhitungan Run-Off Eksisting Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

No	Jenis Tutupan Lahan	C	I (mm/jam)	A (ha)	A*C	C Kawasan= Jumlah A*C/ Jumlah A	Q (m ³ /detik)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,10	0,468	62,98	6,298	0,190	0,028
2	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	0,30		51,19	15,357		
Jumlah				114,17	21,655		

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai run-off yang didapatkan adalah 0,028 m³/detik. Nilai tersebut termasuk rendah mengingat kondisi eksisting yang masih berupa daerah tidak terbangun. Akan tetapi, dapat dilakukan upaya konservasi air dengan sumur resapan dan kolam retensi pada permukiman wilayah hulu maupun hilir daerah aliran sungai di masa mendatang agar dapat menurunkan debit banjir sehingga meminimalisir peluang terjadinya

bencana banjir.



Sumber: Tim Penyusun, 2023

**Gambar 3.37 Peta Aliran Air Kawasan Ibu Kota
Provinsi Papua Tengah**

Arah aliran air pada rencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah merupakan hasil analisis untuk melihat laju atau arah aliran air yang mengalir pada kawasan tersebut. Analisis ini dapat menjadi tahap identifikasi awal dalam perencanaan sistem drainase di masa mendatang. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 3.37 Peta Aliran Air Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Tabel 3.22 Hasil Perhitungan Run-Off Rencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

No	Jenis Tutupan Lahan	C	I (mm/jam)	A (ha)	A*C	C Kawasan = Jumlah A*C/ Jumlah A	Q (m ³ /detik)
1	LAPANGAN	0,10	0,468	0,95	0,095	0,639	0,095
2	AREA PERDAGANGAN DAN JASA	0,75		7,10	5,322		
3	DPR PAPUA TENGAH	0,95		1,75	1,666		
4	JALAN	0,80		21,84	17,471		
5	KANTOR GUBERNUR	0,95		4,79	4,551		
6	KANTOR OPD PROVINSI PT	0,75		12,00	8,997		
7	KANTOR VERTIKAL	0,75		14,82	11,114		
8	MONUMEN PAPUA TENGAH	0,80		0,04	0,031		
9	MRPT	0,95		1,46	1,392		
10	PEDESTRIAN	0,70		15,81	11,070		
11	PERUMAHAN PEGAWAI	0,60		8,48	5,089		
12	RTH	0,10		11,62	1,162		
13	RUMAH JABATAN GUBERNUR	0,40		1,48	0,590		
14	RUMAH JABATAN KETUA MRPT	0,40		0,50	0,202		
15	RUMAH JABATAN LAINNYA	0,40		6,03	2,414		
16	RUMAH JABATAN SEKDA PROVINSI	0,40		0,61	0,244		
17	RUMAH JABATAN WAKIL GUBERNUR	0,40		0,87	0,347		
18	RUMAH KETUA DPRD PT	0,40		0,53	0,211		
19	SPORT CENTER	0,35		1,33	0,467		
20	TAMAN KOTA	0,25		2,15	0,538		
Jumlah				114,17	72,973		

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Arah aliran air di gambarkan dengan panah yang berwarna biru, sesuai arahnya jalannya air kemana di gambarkan oleh panah tersebut, selain itu terdapat lokasi-lokasi mana saja yang menjadi titik tinggi dan titik rendah pada rencana kawasan. Data tersebut di olah berdasarkan data elevasi dari data kontur dengan kedetailan 1 meter yang di ekstraksi dan di olah menjadi *flow direction* Salah satu kunci untuk memperoleh karakteristik hidrologi suatu permukaan adalah kemampuan menentukan arah aliran dari setiap piksel dalam raster. Fungsi raster arah aliran mengambil permukaan sebagai masukan dan membuat raster arah aliran dari setiap piksel ke lereng bawah yang paling curam. Fungsi arah aliran mendukung tiga metode pemodelan aliran: D8 (delapan arah) (Esri, 2023).

Arah aliran air pada rencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah merupakan hasil analisis untuk melihat laju atau arah aliran air yang mengalir pada kawasan tersebut. Secara umum, arah aliran air berasal dari titik tertinggi menuju titik yang paling rendah. Analisis ini

dapat menjadi tahap identifikasi awal dalam perencanaan sistem drainase di masa mendatang. Berikut ini merupakan hasil perhitungan *run-off* terhadap jenis tutupan lahan rencana di Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

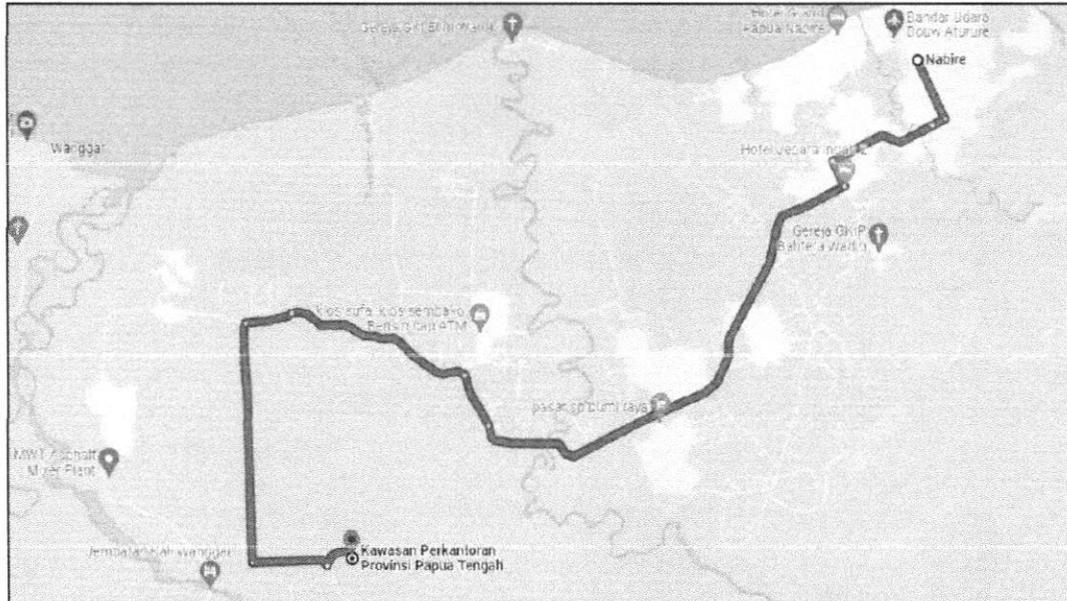
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai *run-off* pada saat kondisi Rencana Kawasan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah yang didapatkan adalah 0,095 m³ /detik. Dengan mengetahui adanya penambahan nilai limpasan air dari kondisi eksisting ke kondisi rencana maka perlu dilakukan upaya konservasi air dengan sumur resapan dan jaringan drainase pada permukiman wilayah hulu maupun hilir daerah aliran sungai di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan agar dapat menurunkan debit banjir sehingga meminimalisir peluang terjadinya bencana banjir.

Nilai *run-off* tersebut bisa dijadikan gambaran sebagai tahap dalam merencanakan jaringan drainase yang merupakan saluran yang menampung aliran air hujan serta air buangan. Selain fungsinya sebagai tempat menampung drainase juga sebagai bangunan yang dapat berguna untuk mengalirkan dan memindahkan air. Drainase perlu dibangun pada kawasan yang minim resapan air karena ketika hujan turun tanah tidak mampu merembeskan air hujan ke dalam tanah secara alamiah yang kemudian menghasilkan limpasan air. Konsep yang harus dikembangkan pada pengembangan drainase adalah mampu mengalirkan air secepat mungkin. Pentingnya perencanaan jaringan drainase pada suatu kawasan adalah mengurangi resiko terjadinya genangan hingga banjir (*flood control*).

4.6 AKSESIBILITAS

Lokasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah dapat dicapai dari Kota Nabire menuju ke arah barat melalui Jalan Lintas Nabire – Wanggar setelah ± 21 km, kemudian berbelok ke arah selatan tepatnya pada simpang Jalan Loging memasuki Jalan Loging sejauh ± 7 km. Kondisi jalan dari pusat kota Nabire ke simpang jalan loging merupakan jalan asphalt dengan lebar jalan 6 m. Namun memasuki jalan loging merupakan jalan akses perusahaan kayu dengan perkerasan sirtu dengan lebar jalan 8 m. Melalui rute ini maka akan langsung mencapai titik A rencana lokasi pembangunan. Akses ke lokasi rencana pembangunan dapat juga melalui rute dari Kota Nabire menuju ke arah barat melalui Jalan Lintas Nabire – Wanggar setelah ± 23,5 km mendapati Simpang Kampung Wanggar Makmur kemudian belok ke

arahselatan menuju Jalan Kampung Wanggar Makmur dengan jarak \pm 5,3 km, dari Desa Wanggar berbelok ke arah timur menuju lokasi pembangunan Kawasan Perkantoran Propinsi Papua Tengah dengan jarak \pm 2.5 km.



(Sumber: maps.google.com)

Gambar 4.2. Peta Pencapaian Lokasi Aset

Akses jalan Desa Wanggar merupakan jalan desa yang sudah di Asphalt dengan lebar 4 m, kemudian akses jalan desa ke lokasi pembangunan merupakan jalan tanah yang sudah dipadatkan dengan sirtu dengan lebar jalan 6 m. Melalui rute ini bangunan di dekat lokasi yang mudah dikenal adalah bangunan sekolah SD dan SMP Negeri 5 Satap Wanggar yang berada disebelah barat dengan jarak \pm 2, 3 km dari lokasi pembangunan. Melalui rute ini maka kita akan langsung mencapai titik tengah lokasi pembangunan.

Lingkungan di sekitar lokasi objek sepanjang Desa Wanggar merupakan pemukiman penduduk dan pertanian. Pertanian yang ada disekitar lokasi objek adalah milik masyarakat setempat. Daerah tersebut merupakan daerah dengan risiko banjir rendah. Saluran air tersedia di tepi jalan, sementara saluran induk yang dapat menampung pembuangan air dari daerah sekitar berada di sebelah timur dengan jarak \pm 2,7 kilometer.

Sarana prasarana umum seperti listrik belum tersedia secara merata di daerah tersebut, instalasi listrik tersedia di lokasi pemukiman dan pusat Desa Wanggar Makmur. Demikian juga air bersih belum tersedia merata, hanya di lokasi pemukiman saja. Fasilitas air dan listrik belum tersambung lokasi aset. Topografi dan kontur tanah di sepanjang jalan umumnya datar, kondisi tanah berupa tanah darat. Fasilitas transportasi angkutan umum belum tersedia, sehingga hanya dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan pribadi.

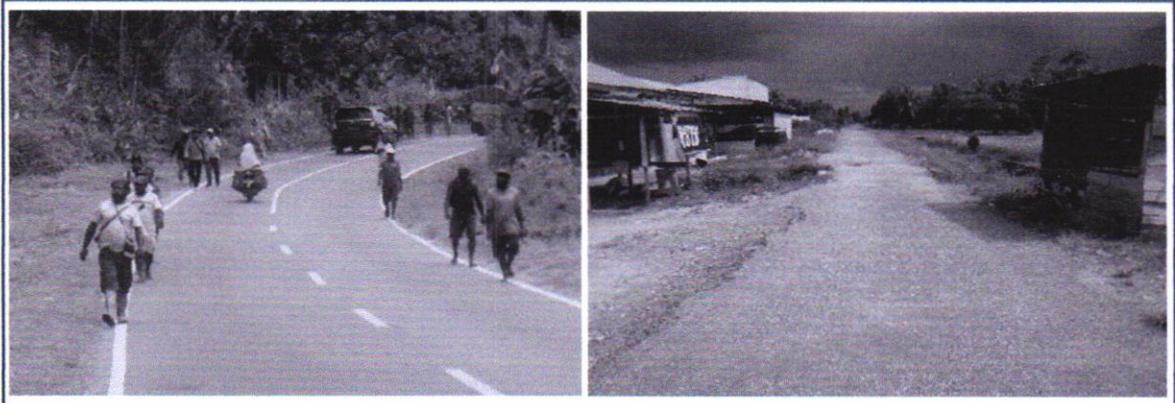
4.7 ANALISIS INFRASTRUKTUR

Dalam rencana pembangunan perkantoran pemerintah, maka infrastruktur merupakan salah satu pertimbangan untuk memutuskan pilihan lokasi. Namun dalam konsep pengembangan dan pemerataan pembangunan maka infrastruktur bukan menjadi pertimbangan utama. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, maka pilihan pemerataan pembangunan dan pemekaran wilayah perkotaan menjadi pertimbangan yang harus diprioritaskan pemerintah.

4.7.1. Jalan

Berdasarkan hasil survey lapangan di rencana lokasi pembangunan belum tersedia infrastruktur memadai sebagaimana akan dibangunnya kawasan perkantoran. Akses jalan di depan lokasi lahan merupakan jalan milik perusahaan Logging dengan perkerasan Sirtu. Di sisi lain lahan terdapat jalan desa dengan kondisi yang sama. Oleh karena itu pemerintah provinsi Papua tengah harus merencanakan peningkatan jalan baik pelebaran jalan maupun pengaspalan jalan agar akses jalan lebih baik dan akan meningkatkan efektifitas pegawai dalam bekerja ataupun peningkatan layanan publik.

Jalan provinsi telah tersedia dengan jarak berkisar 7 km dari lokasi objek. Sehingga pembangunan jalan kedepan yang dibutuhkan



Belum termasuk jalan didalam komplek area perkantoran nantinya. Rencana pembangunan

mendesak sekitar

Gambar 4.3. Jalan Akses Utama Nabire Wanggar dan Jalan Distrik Wanggar

10 km, namun jalan di dalam area kawasan sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan jangkapanjang pembangunan kawasan.



Gambar 4.4. Akses menuju lokasi - Jalan Desa Wanggar dan Jalan Logging

4.7.2. Listrik

Listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi rencana pembangunan kawasan. Listrik dibutuhkan dalam segala hal baik untuk penerangan, sirkulasi udara ruangan, sumber energi untuk barang elektronik dan peralatan kerja dan lainnya. Untuk itu listrik

menjadi salah satu prioritas pertimbangan. Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh, meningkatnya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan pemerintah dapat tersedia. Masyarakat diminta bersabar karena meningkatkan pasokan daya listrik tidak dapat dilakukan secara instan. "Semua memerlukan listrik, rumah tangga, instansi-instansi pemerintah, perkantoran dan industri memerlukan listrik, artinya untuk kehidupan masyarakat agar lebih baik dan ekonomi yang sedang tumbuh ketersediaan pasokan listrik menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil survey lapangan di wilayah desa Wanggar Makmur telah tersedia jaringan listrik namun saat ini belum sampai di lokasi pembangunan. Untuk itu dengan adanya pembangunan ini tentunya PT PLN sebagai satu-satunya BUMN yang menanganit tenaga kelistrikan di Indonesia akan melakukan pemasangan jaringan ke lokasi pembangunan. Untuk itu setelah pembebsan lahan sebaiknya pemerintah provinsi Papua Tengah segera berkoordinasi dengan PT PLN agar PLN dapan segera melakukan pemasangan jaringan tepat di lokasi pembangunan. Sesuai dengan rencana pembangunan kawasan maka setidaknya dibutuhkan daya listrik sebesar 2 MW untuk pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk kebutuhan perkantoran, penerangan kawasan, kebutuhan listrik rumah dinas, fasilitas publik dan lainnya.

4.7.3. Air Bersih

Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada di bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas ekosistemnya. Dalam suatu sistem sungai, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, air juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sungai dengan kemampuan untuk membawa dan mengendapkan sedimen, untuk menjaga kualitas lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu keberadaan

air dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu sangat diharapkan guna menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidak-seimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi *runoff* (aliran permukaan), karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan air. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan musim kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan kekeringan bagi kita semua. Selain itu, sebagian dari kita mulai tidak peduli akan kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga beberapa sumber air (sungai, waduk, danau) dikotori dengan limbah rumah tangga, industri dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhlukhidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan pengertian ini, didalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan terminology pengusahaan air, yang kemudian dijamin lewat pemberian hak guna usaha air.

Kebutuhan air masyarakat rata-rata berkisar 100 liter/orang/hari, sedangkan di Negara maju hanya 200 liter/orang/hari. Katakan dalam satu KK terdapat 5 orang, maka kebutuhan air untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari satu KK hanya $5 \times 30 \times 100 \text{ liter} = 15.000 \text{ liter/bulan/kk} = 15 \text{ m}^3/\text{bulan/kk}$. Sesuai dengan perencanaan bahwa pembangunan kompleks pemerintahan Papua Tengah berada di Kabupten Nabire. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Nabire berkisar 173.043 jiwa. Jika dengan terbentuknya provinsi Papua Tengah dan khususnya pembangunan pusat pemerintahan di wilayah Wanggar Kabupaten Papua Tengah akan meningkatkan jumlah penduduk pendatang dan turis lokal dalam perjalanan bisnis atau kerja sebesar 10% maka diperkirakan jumlah masyarakat di Nabire menjadi 190.347 jiwa. Dengan kebutuhan air sebesar 15 m^3 per bulan maka estimasi kebutuhan air di Kabupaten Nabire adalah $34.262.460 \text{ m}^3$. Kebutuhan air bersih sebaiknya tidak mengandalkan air dalam namun lebih pada air permukaan untuk menjaga kelestarian alam.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut dan kebutuhan untuk lahan pertanian, kementerian PUPR telah melakukan pembangunan bendung di distrik Wanggar. Wanggar merupakan salah satu distrik di Kabupaten Nabire dengan areal potensi pertanian belum tersentuh secara maksimal oleh sistem irigasi, pemanfaatan lahan saat ini mengandalkan musim hujan. Lokasi Bendung Wanggar berjarak sekitar 42 kilometer dari pusat Kota Nabire dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit atau hanya berkisar 6 km jarak garis lurus dari lokasi rencana pembangunan kawasan. Potensi penggunaan air sungai di bendung wanggar sebagai sumber air bersih sangat dimungkinkan karena hanya berjarak $\pm 6 \text{ km}$ dan debit air yang cukup besar. Hanya saja untuk kebutuhan air bersih diperlukan pengelolaan kembali sehingga air tersebut layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk pemenuhan perkantoran, perdagangan maupun rumah tangga.

Bendung Wanggar sendiri telah mulai dilakukan pembangunan

sejak tahun 2019, dan walaupun sempat terhenti di 2021, sejak April 2022 pembangunan bendung ini telah dilanjutkan kembali.



Gambar 4.5. Aktivitas Pembangunan Bendung Wanggar

4.7.4. Transportasi Umum

Transportasi umum belum tersedia di rencana lokasi pembangunan. Namun Bandara baru Kabupaten Nabire terletak di sebelah utara dengan jarak \pm 6,5 km dari lokasi pembangunan, sehingga jarak bandara sangat dekat dengan aktivitas kegiatan pemerintahan kedepan dan akan memudahkan jalur transportasi udara.

Dengan dibangunnya kawasan ini kedepan agar pemerintah membangun fasilitas terminal kecil untuk pengangkutan umum dan di tahap awal sebelum berkembang aktivitas ekonomi disarankan agar pemerintah menyediakan angkutan umum berupa bus ke berbagai lokasi terutama ke arah bandara dan kota Nabire.

Sebagai daerah yang cukup berkembang di pulau Papua khususnya setelah terbentuknya Provinsi Papua Tengah, Nabire telah memiliki fasilitas bandar udara dan Pelabuhan bahkan saat ini Kabupaten Nabire memiliki 2 Bandara yaitu Bandara Douw Aturure atau Bandara Nabire yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Bandara ini terletak di pusat ibukota

kabupaten Nabire. Bandara ini tergolong bandara domestik kelas II, dimana bandara ini hanya dapat digunakan oleh pesawat ATR dan sekelasnya atau di bawahnya. Selanjutnya saat ini pemerintah juga telah membangun bandara baru yang berjarak berkisar 20 km dari bandara lama dan berkisar 6,5 km dari lokasi pembangunan kawasan.

Pembangunan Bandara Nabire yang baru berada berada di lokasi Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. “Progres pembangunan Bandara Nabire ini sudah mencapai 100 persen dan sudah dianggap rampung. Saat ini, di Bandara Nabire yang baru hanya dilakukan pekerjaan ringan, seperti perawatan dan evaluasi bagian apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sampai peresmian yang ditargetkan pada Juni 2023 nanti,” ujar dia.

Pembangunan Bandara Nabire mulai dilakukan pada 2019. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19, maka pembangunan bandara baru ini sempat tertunda dan baru dilanjutkan kembali secara bertahap pada awal 2020 hingga 2021. “Akibat terbatasannya anggaran maka pembangunan bandara sempat kembali terhenti di akhir 2021. Pembangunan dapat dilanjutkan kembali setelah mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan bandara di 2022.

Saat ini, Bandara Nabire yang baru dibangun secara operasional sudah dapat difungsikan, tetapi dari sisi penunjang pelayanan, bandara ini belum di support dari sisi infrastruktur akses jalan masuk menuju bandara sepanjang 5 Km. “Akses jalan masuk dari dan menuju Bandara Nabire Baru menjadi tanggungjawab Pemda.



Gambar 4.6. Bandara Nabire dan Bandara Baru Nabire

Selain Bandar Udara, karena letak geografis Nabire yang memiliki garis pantai atau laut, Nabire memiliki Pelabuhan yang cukup baik di tanah Papua, yaitu pelabuhan Samabusa. Pelabuhan Samabusa telah beroperasi dibawah kendali PT Pelabuhan Indonesia IV, dimana tersedia pelabuhan penumpang dan Pelabuhan barang baik curah maupun kargo atau peti kemas. Pelabuhan Samabusa terletak di Desa Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten *Nabire*.



Gambar 4.7. Pelabuhan Samabusa Nabire

4.8. LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN

Kebutuhan luas lahan untuk rencana pembangunan kawasan tentunya disesuaikan dengan rencana ataupun desain pembangunan. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan berdasarkan desain atau master plan pembangunan, kebutuhan luas lahan rencana pembangunan adalah 300 Ha atau 3.000.000 m². Namun setelah dilakukan pengukuran detail dengan menggunakan alat ukur geodetic dan pendataan awal tanah milik masyarakat terdampak adalah sebagai berikut:

Total Luas Lahan	: 2.992.013,05 M2
1) Lahan SHM	: 1411.702,93 m2
2) Lahan Pelepasan	: 1.310.098,81 m2
3) Tanah Restan	: 75.754,28 m2
4) Tanah Fasilitas Umum	: 194.457 m2
Jumlah Persil	: 325 Persil
1) Persil SHM	: 255 Persil
2) Persil Pelepasan Adat	: 51 Persil
3) Tanah Restan	: 19 Persil



Gambar 4.8. Peta Persil Tanah Rencana Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

Pembangunan gedung kantor ataupun rumah dinas serta kebutuhan luas tanah dalam perencanaan pembangunan gedung pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 tahun 2006 yang ditetapkan pada 20 Maret 2006. Berdasarkan Permen tersebut berikut adalah lampiran tentang standar kebutuhan tanah dan luas bangunan gedung pemerintahan dan rumah dinas pejabat:

4.8.1. Ruangan Kantor

A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 60 M²
2. ruang tamu 40 M²
3. ruang rapat 48 M²
4. ruang rapat utama 100 M²
5. ruang tunggu 20 M²
6. ruang staf/adc 25 M²
7. ruang istirahat 20 m²;
8. ruang kamar mandi/toilet 9 M².

B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuranmaksimal:

1. ruang kerja 40 M²;
2. ruang tamu 25 m²;
3. ruang rapat 40 M²;
4. ruang tunggu 15 m²;
5. ruang staf/adc 20 M²;
6. ruang istirahat 15 M²;
7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².

C. Ruangan kantor Bupati/Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuranmaksimal:

1. ruang kerja 40 M²;
2. ruang tamu 30 m²;
3. ruang rapat 40 M²;
4. ruang rapat utama 80 m²;
5. ruang tunggu 15 m²;
6. ruang staf/adc 20 m²;
7. ruang istirahat 15 m²;
8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².

D. Ruangan kantor Wakil Bupati/Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruangdengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M²;
2. ruang tamu 25 M²;
3. ruang rapat 36 M²;
4. ruang tunggu 15 M²;
5. ruang staf/adc 15 M²;
6. ruang istirahat 13 M²;

7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- E. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 20 M²;
 3. ruang rapat 36 M²;
 4. ruang tunggu 15 M²;
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 9 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 M².
- F. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 30 M²;
 4. ruang tunggu 9 M²;
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- G. Ruangan kantor Sekda Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 35 M²;
 2. ruang tamu 20 M²;
 3. ruang rapat 40 M²;
 4. ruang tunggu 15 M²;
 5. ruang staf/adc 10 M²;
 6. ruang kamar mandi/istirahat 9 M²;
 7. ruang toilet 6 M².
- H. Ruangan kantor Sekda Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 35 M²;
 4. ruang tunggu 10 M²;
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- I. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 30 M²;
 3. ruang tamu 12 M²;
 4. ruang toilet 4 M².
- J. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M²;

2. ruang rapat 12 m^2 ;
 3. ruang tamu 10 M^2 .
- K. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuranmaksimal:
1. ruang kerja 9 M^2 .
 2. ruang tamu 10 m^2 .
- L. Ruangan kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m^2 ; M. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M^2 per pegawai.

4.8.2. Rumah Dinas

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 600 M^2 ;
 - b. luas tanah 5.000 M^2 ; dan
 - c. luas pendopo 300 M^2 .
2. Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 M^2 ;
 - b. luas tanah 2.000 M^2 ; dan
 - c. luas pendopo 200 M^2 .
3. Rumah jabatan untuk Bupati/Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M^2 ;
 - b. luas tanah 3.000 M^2 ; dan
 - c. luas pendopo 250 M^2 .
4. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M^2 ;
 - b. luas tanah 1.500 M ; dan
 - c. luas pendopo 175 M^2 .
5. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M^2 ;
 - b. luas tanah 1.000 M^2 .
6. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M^2 ;
 - b. luas tanah 750 M^2 .
7. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M^2 ;
 - b. luas tanah 750 M^2 .
8. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuranmaksimal:
 - a. luas bangunan 250 M^2 ;
 - b. luas tanah 500 M^2 .
9. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 M^2 ;
 - b. luas tanah 1.000 M^2 .

10. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

Standar luas bangunan tersebut menjadi rujukan dalam rencana pembangunan gedung perkantoran dan rumah dinas. Selain itu bangunan tersebut tentunya akan dilengkapi fasilitas umum dan bangunan pendukung seperti gudang, rumah mesin, pos jaga, kantin, rumah ibadah dan lainnya. Sesuai dengan peraturan tata kota maka umumnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di wilayah pedesaan atau

wilayah yang belum berkembang adalah 60% dari luas tanah. Artinya dalam 1000 m² lahan, hanya 600 m² yang dapat dibangun. Selain itu dalam konsep green building dan menjaga kelestarian alam, maka setidaknya minimal 20% lahan harus disiapkan untuk kawasan hijau atau RTH. Berdasarkan Master Plan rencana pembangunan kawasan, berikut rencana kebutuhan lahan efektif untuk pembangunan gedung kantor, gedung fasilitas umum, jalan, jembatan, drainase, rumah dinas dan bangunan pendukung lainnya yaitu:

Tabel 4.1 Rencana Kebutuhan Lahan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

NO.	URAIAN	SATUAN		TOTAL LUAS (m ²)
I.	LAHAN			
1	PENGADAAN LAHAN	300.00 Ha		3.000.000
II.	PEMBANGUNAN PERKANTORAN PROVINSI			
1	PEMBANGUNAN JALAN PRIMER (2 jalur)	11.20 km	30	336.000
2	PEMBANGUNAN JALAN SEKUNDER	15.00 km	18	270.000
3	PEMBANGUNAN JEMBATAN 2x20 M'	40.00 M'		
4	PEMBANGUNAN FASILITAS DAN AKSESORIS JALAN	26.20 km	5	131.000
5	PEMBANGUNAN FASILITAS ENERGI LISTRIK	26.20 km		
6	PEMBANGUNAN FASILITAS JARINGAN SMART CITY	26.20 km		
7	PEMBANGUNAN DRAINASE PERKANTORAN	52.40 km	6	314.400
8	PEMBANGUNAN MONUMEN PAPUA TENGAH	1.00 LS		
9	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GUBERNUR	1.00 UNIT	25.000	25.000
10	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPRPT	1.00 UNIT	8.000	8.000
11	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR MRPT	1.00 UNIT	8.000	8.000
12	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS DAN BADAN	22.00 UNIT	2.000	44.000
13	PEMBANGUNAN RTH DAN PENGHIJAUAN KEMBALI	1.00 LS	600.000	600.000

III.	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN			
1	GUBERNUR	1.00 UNIT	800	800
2	WAKIL GUBERNUR	1.00 UNIT	400	400
3	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	1.00 UNIT	250	250
4	KETUA DPR PT	1.00 UNIT	250	250
5	KETUA MR PT	1.00 UNIT	250	250
6	RUMAH JABATAN LAINNYA	22.00 UNIT	120	2.640
7	PERUMAHAN PEGAWAI	85.00 UNIT	70	5.950
IV.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR VERTIKAL			
1	GEDUNG KANTOR KEUANGAN	1.00 UNIT	2.000	2.000
2	GEDUNG KANTOR PAJAK	1.00 UNIT	2.000	2.000
3	GEDUNG KANTOR BEA CUKAI	1.00 UNIT	2.000	2.000
4	GEDUNG KANTOR IMIGRASI	1.00 UNIT	2.000	2.000
5	GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI	1.00 UNIT	2.000	2.000
6	GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI	1.00 UNIT	2.000	2.000
7	GEDUNG KANTOR POLDA	1.00 UNIT	2.000	2.000
8	GEDUNG KANTOR KODAM	1.00 UNIT	2.000	2.000
9	GEDUNG KANTOR BRIMOB	1.00 UNIT	2.000	2.000
10	GEDUNG KANTOR BPS	1.00 UNIT	2.000	2.000
11	GEDUNG KANTOR PLN	1.00 UNIT	2.000	2.000
12	GEDUNG KANTOR TELKOM	1.00 UNIT	2.000	2.000
	TOTAL KEBUTUHAN LAHAN			1.770.940
	KDB 60%			2.951.567

NO.	URAIAN	SATUAN		TOTAL LUAS (m ²)
	RASIO LUAS LAHAN EFEKTIF KAWASAN 59%			3.000.000

4.9. ANALISIS TAPAK

Dalam Rencana Pembangunan suatu kawasan analisis tapak ditentukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah :

- a. Analisis Legalitas dan Tata Ruang
- b. Analisis fisik tanah atau lahan dan ketersediaan lahan
- c. Ketersediaan Infrastruktur
- d. Ketersediaan Fasilitas Umum
- e. Mitigasi Risiko Bencana Alam

Secara detail analisis tersebut telah diuraikan pada bagian lain dalam laporan ini, sehingga dalam bagian ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan sebelumnya.

4.9.1. Analisis Legalitas dan Tata Ruang

Dalam Bab 2 telah dibahas terkait tata ruang rencana lokasi rencana pembangunan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, lokasi rencana pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kawasan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah berada di desa Wanggar Makmur, Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018- 2038, Distrik Wanggar ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, namun karena Kabupaten Nabire belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka dipilihnya Distrik Wanggar sebagai kawasan perkantoran perlu rekomendasi dari Bupati terkait penetapan rencana pembangunan. Secara prinsip dalam pengembangan kawasan perubahan peruntukan dari kawasan agropolitan ke kawasan perkantoran pemerintah tidak bertentangan, namun pemerintah perlu melakukan relokasi kawasan agropolitan atau lahan pertanian ke daerah lainnya sebagai antisipasi ataupun perencanaan ketahanan pangan.

Rencana lokasi pembangunan kawasan pusat pemerintahan provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah sesuai Surat Rekomendasi No. 522/72/DLHKP/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

4.9.2. Analisis Fisik Tanah dan Ketersediaan Lahan

Berdasarkan hasil survey lapangan, rencana lokasi pembangunan merupakan lahan dengan topografi umumnya datar dan bergelombang. Lokasi lahan saat ini merupakan lahan pertanian milik trans dan masyarakat dan sebagian besar merupakan lahan kosong berupa semak belukar atau lahan hutan yang sudah diambil kayunya. Lingkungan lokasi lahan juga merupakan lahan pertanian dan lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Sehingga ketersediaan lahan untuk pembangunan ataupun cadangan lahan pengembangan masih tersedia dengan sangat

cukup. Sesuai rencana, lahan untuk rencana pembangunan adalah \pm 300 Ha. Luas lahan yang dibutuhkan ini cukup tersedia, bahkan untuk pengembangan juga cukup tersedia, karena disekitar lokasi atau lahan yang berbatasan dengan lokasi pembangunan umumnya lahan kosong atau lahan pertanian.

4.9.3. Ketersediaan Infrastruktur

Berdasarkan hasil survey lapangan, lokasi lahan telah memiliki akses jalan, namun dalam pengembangan kawasan dibutuhkan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan hotmix. Dalam beberapa referensi rencana pengembangan kawasan dan standar dari kementerian Pekerjaan umum, maka setidaknya disiapkan ROW 50 untuk akses jalan masuk, agar dalam 20 tahun kedepan, ROW jalan masih cukup memadai untuk ditingkatkan. Akses jalan yang digunakan saat ini adalah jalan loging dan jalan desa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Selain jalan maka dibutuhkan saluran air kotor atau saluran pembuangan agar kawasan bebas banjir. Melihat kondisi geografis lahan rencana pengembangan, untuk saluran air utama adalah 5 m dengan kedalaman 2 m, sedangkan untuk saluran sekunder adalah lebar 1 m dengan kedalaman 1,2 m. Saluran air saat ini belum tersedia dilokasi pembangunan, sehingga pemerintah perlu merencanakan pembangunan saluran air tersebut.

4.9.4 Ketersediaan Fasilitas Umum

Fasilitas umum seperti Sekolah telah tersedia didekat rencana pembangunan. Berdasarkan hasil survey lapangan dan pengecekan ke kantor pemerintahan, terdapat sekolah SD, SMP dan SLTA. Jarak sekolah SD dan SMP berkisar 1,8 km dari lokasi pengadaaan tanah dan lokasi sekolah SLTA berjarak 5,4 km dari lokasi, sehingga bagi anak-anak pegawai telah tersedia sarana Pendidikan.



Gambar 4.9. Sekolah SD dan SMP Disekitar Lokasi Pembangunan

Untuk fasilitas kesehatan hanya tersedia klinik sehingga dibutuhkan perencanaan pembangunan Rumah Sakit yang memadai. Pasar tradisional dan pasar modern belum tersedia, namun sesuai dengan hukum ekonomi penawaran dan permintaan, dengan dibangunnya kawasan perkantoran otomatis kedepan masyarakat akan berlomba-lomba membangun kawasan perdagangan untuk kebutuhan pegawai.

4.9.5. Mitigasi Risiko Bencana Alam

Dipilihnya Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah adalah atas pertimbangan letak geografis yang berada di wilayah yang berdekatan dengan beberapa kabupaten yang masuk provinsi Papua Tengah. Ketersediaan jalur transportasi Darat dan laut juga menjadi penentu pertimbangan. Kabupaten Nabire secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat $134^{\circ}35' - 136^{\circ}33'$ Bujur Timur dan antara $2^{\circ}25' - 3^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Dibagian Utara Kabupaten Nabire berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, sedangkan dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Kaimana. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaiaman, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Waropen.

Topografi Kabupaten Nabire sangat bervariasi mulai dari datar, bergelombang, hingga pegunungan. Wilayah pantai sebagian besar merupakan dataran dengan luas 47% dari seluruh wilayah Nabire sementara sisanya (57%) merupakan wilayah perbukitan yang umumnya terletak di wilayah pedalaman. Wilayah Kabupaten Nabire berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dapat dikelompokkan ke dalam 3 zona, yaitu:

- 1) Zona dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut.

- 2) Zona ketinggian sedang, ketinggian 600 - 1.500 meter di atas permukaan laut.
- 3) Zona dataran tinggi, yaitu wilayah dengan ketinggian di atas 1.500 meter.

Struktur geologi Kabupaten Nabire terletak ditepi utara kraton Australia yang ditandai oleh jalur batuan termalihan dan terlipatkan dengan lebar mencapai 50 km. Daerah lipatan ini mencakup peralihan antara struktur leher burung yang mempunyai arah Utara - Barat Laut.

Struktur geologi Kabupaten Nabire terletak ditepi utara kraton Australia yang ditandai oleh jalur batuan termalihan dan terlipatkan dengan lebar mencapai 50 km. Daerah lipatan ini mencakup peralihan antara struktur leher burung yang mempunyai arah Utara-Barat Laut

Karakteristik geologi wilayah Nabire yang berada di atas 3 lempengan bumi yakni sesar Sungkup Weyland, Sesar Siriwo, dan Sesar Derewo menyebabkan wilayah Nabire termasuk wilayah rawan bencana gempa bumi, sehingga pengembangan wilayahnya harus berbasis mitigasi bencana. Potensi geologi Nabire antara lain berupa penambangan emas dimana di lokasi penambangan emasnya terdapat endapan-endapan aluvial muda dan aluvial tua yang secara umum terdiri dari fragmen- fragmen kuarsa putih susu, batuan ultramafik, batuan malihan, dan batuan sedimen.

Seperti Kabupaten lainnya di Papua, Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Selama tahun 2020, hujan terjadi setiap bulan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Nabire 448,8 mm. Banyaknya hari hujan di Kabupaten Nabire berkisar antara 17-27 hari. Hari hujan tertinggi adalah pada bulan Juli dengan 28 Hari Hujan. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2020, suhu udara di Kabupaten Nabire rata-rata berkisar antara 27,20 °smpai 28 °C. Suhu tertinggi adalah pada bulan Januari dengan suhu 32,50 °C. Kabupaten Nabire mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2020 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 81 persen sampai 86 persen dan rata-rata tekanan udara antara 1.007,5 - 1.009,5 mb. Sedangkan rata-rata kecepatan angin adalah 4,0 m/det.

Berdasarkan kondisi geografis dan peta geologi tersebut Kabupaten Nabire termasuk kawasan yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Letak 3 lempengan bumi yakni sesar Sungkup Weyland, Sesar Siriwo, dan Sesar Derewo menyebabkan Nabire rawan gempa bumi yang juga dapat menyebabkan tsunami. Gempa bumi tahun 2004 yang terjadi di Nabire merupakan bukti nyata dan pengalaman bagi Nabire.

Sebagai antisipasi terhadap bencana alam, perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini atau mitigasi dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam. Selain itu desain bangunan dapat disesuaikan dengan potensi risiko bencana khususnya gempa bumi. Berdasarkan peta geologi dan hasil penelitian saat ini telah dipetakan daerah rawan bencana di Kabupaten Nabire sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Nabire mempunyai daerah rawan bencana 2 Distrik, dan 3 Kelurahan serta 1 Desa dengan jenis rawan bencana banjir.
- 2) Kabupaten Nabire mempunyai daerah rawan bencana 1 Distrik, dan 7 Kelurahan dengan jenis rawan bencana tanah longsor.
- 3) Kabupaten Nabire mempunyai daerah rawan bencana Gempa Bumi.
 - a. Zona Rawan Menengah Yaitu:
 - Daerah Gunung Kampung Kimi
 - Daerah Gunung Kampung Kali Harapan
 - Daerah Gunung Distrik Topo
 - b. Zona Rawan-Rawan Tinggi Yaitu:
 - Pelabuhan Samabusa
 - Kelurahan Siritwini
 - Kelurahan Nabarua
 - Desa Kali Susu
 - Kelurahan Oyehe
 - Kelurahan Karang Mulia
 - Kelurahan Morgo
 - Kelurahan Kali Bobo
 - Distrik Wanggar
 - Kelurahan Bumi Wonorejo
 - Kelurahan Girimulyo
- 4) Kabupaten Nabire mempunyai daerah rawan bencana Tsunami dengan Pembagian Skala Kerawanan yang meliputi.
 - a. Zona Rawan Rendah Yaitu:
 - Desa Kali Harapan
 - Pelabuhan Samabusa
 - Kelurahan Bumi Wonorejo
 - b. Zona Rawan Menengah Yaitu:
 - Kelurahan Kali Bobo
 - Kelurahan Morgo
 - Kelurahan Karang Mulia
 - Desa Kali Susu
 - Kelurahan Siritwini
 - Kelurahan Nabarua
 - c. Zona Rawan Tinggi Yaitu:

- Distrik Wanggar
- Kelurahan Oyehe

Berdasarkan data tersebut di atas Distrik Wanggar sebagai daerah yang akan dikembangkan menjadi Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah berada pada klasifikasi zona rawan tinggi baik untuk potensi gempa bumi maupun tsunami. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini bagi pemerintah Provinsi baik penyiapan SDM yang tanggap, masyarakat yang sadar bahaya dan bangunan yang direncanakan juga dengan desain sesuai dengan risiko bencana.

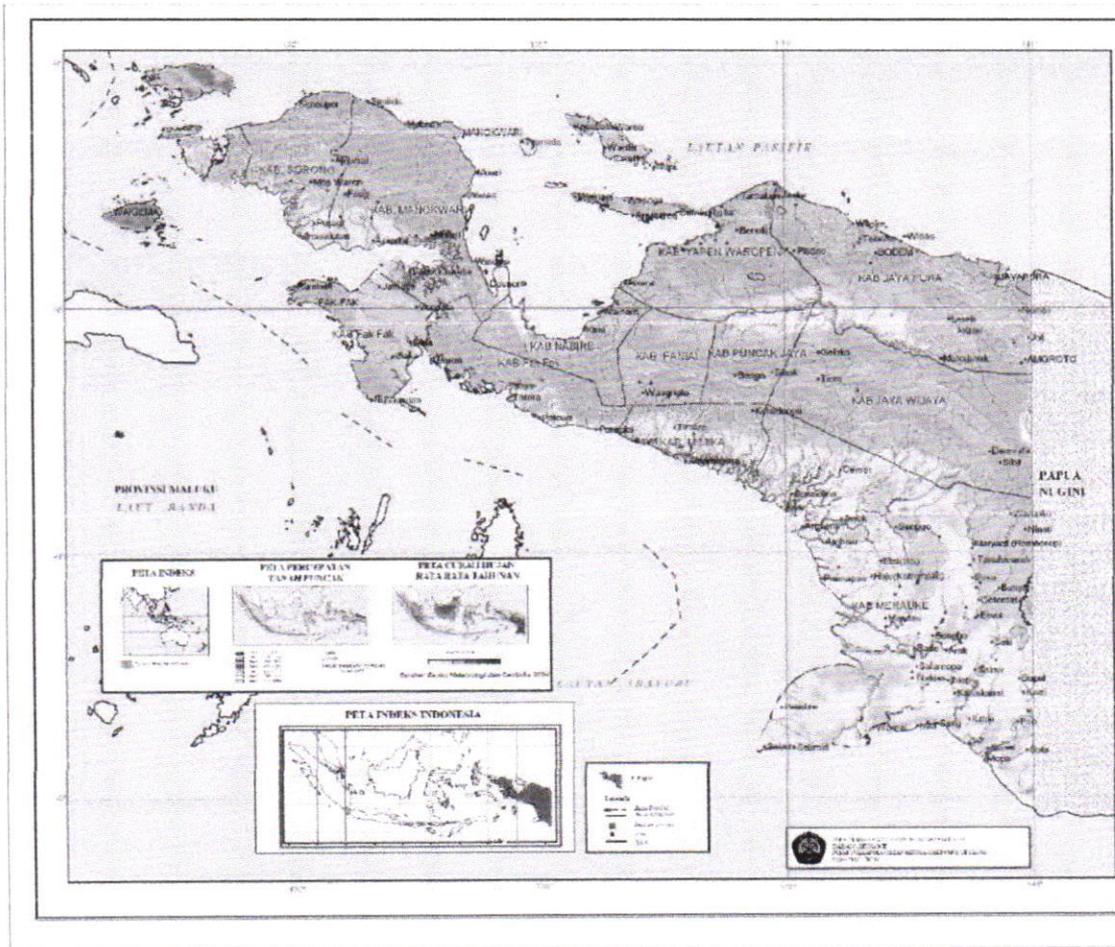
Sebagai daerah yang masuk zona tinggi, bukan berarti Distrik Wanggar tidak dapat dikembangkan. Sebab distrik Wanggar juga memiliki wilayah cukup luas yaitu wilayah pesisir dan wilayah daratan. Tsunami tentunya berbahaya bagi wilayah pesisir dengan ketinggian minimal 20 m di atas permukaan laut. Lokasi pembangunan berada di wilayah dataran dengan ketinggian 40-90 mdpl. Jarak lokasi berada 9,8 km dari garis pantai. Hal ini menunjukkan lokasi pembangunan cukup aman dari potensi tsunami. Sedangkan untuk potensi gempa bumi walaupun Distrik Wanggar masuk zona risiko tinggi, namun berdasarkan data dan wawancara dengan penduduk Distrik Wanggar, rencana lokasi pembangunan termasuk wilayah yang minim kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi tahun 2004. Minimnya kerusakan disebabkan struktur tanah dangkal yang termasuk tanah podsol. Tanah podsol adalah tanah yang terdiri dari campuran pasir dan bebatuan kecil. Jenis tanah podsol biasanya berwarna kuning keabuan dengantekstur pasir hingga lembung.



Gambar 4.10. Jenis Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan

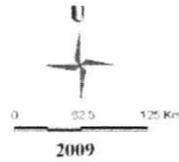
Dari gambar di atas terlihat lapisan tanah dan vegetasi yang tumbuh disekitaran lokasi pembangunan. Struktur tanah lempung campuran dengan pasir dan bebatuan menyebabkan daya dukung tanah baik untuk bangunan. Dengan

demikian berdasarkan pertimbangan geografis, letak atau lokasi tanah dan ketersediaan tanah serta pertimbangan lain sesuai dengan kajian di atas menunjukkan bahwa pemilihan lokasi rencana pembangunan cukup baik dan dapat ditindaklanjuti. Terkait dengan desain struktur bangunan yang akan dikembangkan ke depan, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan daya dukung tanah yang seriong disebut dengan *soil test*.



Gambar 4.11. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Pulau Papua

PETA ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH PULAU PAPUA



KETERANGAN

- Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah**
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.
- Zona kerentanan gerakan tanah rendah**
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.
- Zona kerentanan gerakan tanah menengah**
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.
- Zona kerentanan gerakan tanah tinggi**
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

BATASAN DAN FUNGSI PETA

Zona kerentanan gerakan tanah yang termuat dalam peta ini bersifat umum untuk informasi awal tentang daerah-daerah yang mempunyai kemungkinan terjadinya gerakan tanah dan daerah-daerah yang relatif mantap. Perubahan kondisi topografi dan tata guna lahan setelah dipetakan dapat merubah zona kerentanan gerakan tanah yang termuat dalam peta.

SARAN UNTUK PEMAKAI PETA

Peta ini memuat informasi tingkat kerentanan (kepekaan) suatu daerah untuk terjadi gerakan tanah sehingga dapat diidentifikasi daerah-daerah yang akan menghadapi permasalahan gerakan tanah, dan melakukan upaya pencegahan atau penanggulangannya. Daerah yang terletak pada zona kerentanan gerakan tanah tinggi untuk terkena gerakan tanah, agar dihindarkan sebagai lokasi pemukiman atau bangunan infrastruktur vital dan strategis.

Jika tidak dapat dihindari, akan mengembangkan atau membangun pada daerah berkerentanan gerakan tanah menengah, diperlukan penyelidikan kemantapan lereng secara rinci untuk menghindari terjadi gerkantanah

Pada zona berkerentanan gerakan tanah menengah harus dilakukan penyelidikan gerakantanah secara rinci jika akan melakukan penyayatan lereng.

BAB IV
ASPEK SOSIAL EKONOMI

5.1 SOSIAL BUDAYA

Tanah Papua dikenal memiliki budaya kuat dan masih dapat dipertahankan walaupun tingginya pengaruh modernisasi dari segala arah. Pembagian suku-sukudi tanah Papua berdasarkan 7 wilayah adat (keasamaan aspek; hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik hingga geografis,dll).

Wilayah adat tersebut meliputi;

- Mamta
- Saereri
- Ha-Anim
- La Pago
- Mee Pago

Nabire dihuni oleh suku-suku di pesisir yang termasuk kedalam wilayah adat Saireri, diantaranya suku Wate, Mora, Yaur, Umari, Gwoa), dan Yerisiam. Yaur atau Jaur adalah sebuah bahasa yang termasuk kedalam dalam rumpun bahasa cenderawasih (Teluk Geelvink) cabang dari keluarga Austronesia yang dituturkan di Propinsi Papua Tengah, Indonesia. Bahasa ini memiliki sekitar 300 penutur.

Selain itu di wilayah pegunungan terdapat Mee, Moi, dan Auye (Napan). Bagian tengah provinsi ini terdapat Danau Paniai yang dihuni oleh selain suku-suku yang sudah disebutkan, suku Moni dan suku Wolani.

Sedangkan Pegunungan Jayawijaya di sebelah timurnya, dihuni suku-suku seperti Amungme, Damalme, Dem, Wano, serta suku-suku yang juga bisa ditemui di Papua Pegunungan seperti Dani, Iani, dan Nduga (Dauwa). Sedangkan bagian pesisir selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika yang dihuni oleh suku Kamoro dan suku Sempan.

Nabire dahulu merupakan kota tertua dengan wilayah yang luas dan jumlah masyarakat sedikit. Dari Nabire pulalah kemudian dimekarkan beberapa wilayah seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, sampai ke puncak, Puncak Jaya. Dahulu Paniai adalah sebagai pusat pemerintahan. Masyarakat asli terutama berada di

pesisir dan bekerja sebagai nelayan sekaligus sebagai ciri khasnya. Sedangkan masyarakat Distrik Wanggar umumnya sudah mengalami percampuran(masyarakat majemuk) dimana di distrik ini terdapat lokasi transmigrasi dan masyarakat pendatang lainnya.

Nabire berasal dari kata “Nawi”. Pada zaman dahulu dipertimbangkan dengan kondisi alam nabire yang saat itu banyak binatang Jangkrik terutama di sepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata Nawi berubah penyebutannya menjadi Nawire dan akhirnya Nabire. Terdapat 6 (enam) suku ;

- Wate; Tanah besar di pesisir
- Gwoa Napan; berbatasan dengan Waropen (Pesisir)
- Mora; Kepulauan Harlem
- Yeresiam; Daerah Pesisir Barat
- Hegure; Daerah Pesisir Barat (Yaur)
- Umari; Berbatasan dengan Wasior

Tabel 5.1. Wilayah Adat

Wilayah Adat	Kelompok Etnik
Mamta	Disekitar Jayapura (±87 suku) yang mendiami Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Keerom.
Saereri	Menyebar di Sekitar Teluk Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, dan sebagian Nabire, bagian pantai (Suku Yaur, Wate, Mora, Umari, Gwoa, Napan, Yarisiam).
Ha Anim	Di Papua Selatan, Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat.
La Pago	Di Pegunungan Tengah bagian Timur, Pegunungan Bintang, Wamena, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Tolikara.
Mee Pago	Di Pegunungan Papua bagian tengah yaitu, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire bagian gunung, dan sebagian Mimika bagian gunung.

Pembangunan dapat dipahami sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, pertahanan, kelembagaan, pendidikan dan teknologi. Dalam perspektif antropologi, pembangunan merupakan bagian dari kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. Melalui kebudayaan segala perilaku dan tindakan manusia dapat dikontrol. Dengan demikian ketika membahas mengenai pembangunan, maka hal yang terpenting adalah masyarakat yang terdampak secara fisik.

Studi antropologi yang sangat khas dengan metode penelitian observasi partisipasi dan wawancara mendalamnya lebih mudah untuk meneliti keadaan masyarakat terdampak. Melalui pembangunan yang terbilang cukup besar dan sangat kompleks ini, antropologi akan memandang pembangunan sebagai wujud perkembangan manusia dan yang akan memberikan dampak sosial budaya untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan peradaban umat manusia. Masyarakat lokal menempati posisi utama dalam studi antropologi sebab terkait dengan aspek sosial budayanya. Manusia selalu menjadi objek dan subjek dari setiap studi yang dilakukan, sehingga apapun yang terjadi pada mereka bisa menjadi sorotan, baik sebelum maupun sesudah pembangunan itu dilakukan.

Salah satu pembangunan yang saat ini sedang dipersiapkan adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Papua Tengah. Pembangunan ini pastinya akan berimbas pada perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Berbagai bidang disiplin ilmu terlibat untuk mengkaji dan saling melengkapi demi menyukseskan penyelenggaraan proses pembangunan tersebut. Demikian halnya antropologi yang berfokus pada studi kelayakan bidang sosial budaya dan dampaknya terhadap kehidupan. Antropologi kemudian akan mengambil peran penting dalam melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap wacana pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Papua Tengah yang akan dilakukan dan reaksi masyarakat setelah pembangunan yang telah disosialisasikan itu terlaksana. Antropologi juga memperhatikan pada apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat setelah pembangunan itu dilakukan. Harus disadari bahwa pembangunan merupakan sebuah proyek jangka panjang sebab meskipun dianggap selesai tetapi kajian terhadap berbagai dampak dan

perilaku masyarakat terus berlanjut.

Setelah pembangunan berjalan akan banyak budaya, kondisi masyarakat, dan kondisi alam yang mengalami perubahan besar. Beberapa suku asli (Wate, Gwoa Napan, Mora, Yeresiam, Hegure, dan Umari) yang ada di Propinsi Papua Tengah dengan ciri khas budayanya sudah pasti akan mengalami perjumpaan dan saling interaksi dengan budaya luar. Oleh karena itu masyarakat harus disiapkan dengan segala bentuk adaptasi, asimilasi, dan akulturasi budaya. Dimana *culture shock* dan *culture lag* bisa saja terjadi.

Berdasarkan temuan di lapangan dari hasil observasi diketahui bahwa rencana pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Papua Tengah hingga saat ini belum mengalami kendala yang berarti. Beberapa indikator sosial yang menjawab itu diantaranya;

- a) Terdapat antusiasme warga dan tokoh adat setempat terutama pada saat pengukuran dan pelepasan tanah.
- b) Pihak pemerintah maupun tim perencana dapat mensosialisasikan secara baik akan tujuan pembangunan kawasan pusat pemerintah beserta segala dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, membawa masyarakat kearah modernisasi.
- c) Peran tokoh adat sebagai mediator antara pemerintah, tim pelaksana, dan masyarakat berjalan cukup baik. Salah seorang ondoafi dari Wate misalnya mengungkapkan :” *sebagai suku yang punya hak ulayat, kami akan terus mendukung semua proses penyelesaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini*”.

Bertolak dari indikator sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Propinsi Papua Tengah dan khususnya suku asli sesungguhnya sudah lebih terbuka dalam menerima perubahan. Adanya dukungan kepemimpinan tradisional ondoafi dan kepala suku cukup signifikan, terutama dalam mengatasi persoalan kepemilikan tanah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa temuan bahwa terdapat sekitar 17 tanah dengan persil yang tertimpa-timpa. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi timbulnya gesekan antara pemilik tanah secara pribadi. Bahkan bisa jadi berujung pada konflik komunal. Apalagi jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa SHM.

Antropologi dengan segala keunikannya selalu melihat hal-hal kecil yang mungkin timbul dari gejala tertentu.

Beberapa catatan tambahan agar gesekan-gesekan sebagai dampak negative dapat diminimalisir yakni;

- a) Pembangunan sebagai proses membangun peradaban hendaklah disusun dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip adil dan bermartabat. Sedapat mungkin para perencana pembangunan mampu meyakinkan masyarakat (melalui tindakan-tindakan dan itikad baik), sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama sekaligus meminimalisir benturan sosial.
- b) Perlunya kesadaran kolektif untuk membangun peradaban dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
- c) Perlunya sebuah konsensus bersama antara masyarakat, *stake holder*, elite- elite politik lokal/tokoh adat, dan semua pihak yang berkepentingan bahwa apa yang akan dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai merupakan tanggung jawab bersama.
- d) *Political will* harus terwujud dalam bentuk kebijakan (regulasi) yang berpihak kepada kemaslahatan.

5.2 PERTAHANAN, KEAMANAN & KEAGAMAAN

Beberapa masalah kebijakan serta isu strategis yang terjadi di Provinsi Papua Tengah masih pada masalah klasik yaitu masalah keamanan, infrastruktur terutamajalan darat, dan pemerataan pelayanan publik seperti Pendidikan dan Kesehatan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dalam periode 2024-2026.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dalam periode 2024-2026. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang didapat di Provinsi Papua Tengah, dapat disintesis bahwa terdapat 4 isu strategis yang diangkat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Selatan yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang terjadi di seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi. 4 Isu strategis di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)

Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi isu yang strategis bukan saja karena pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang, tetapi juga karena dengan pencapaian yang baik atas indikator-indikator yang ditetapkan dalam kedua bidang urusan ini merupakan sumbangan terbesar untuk keberhasilan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif menjadi arah kebijakan dan strategi dalam RIPP 2022-2041.

Dalam bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator untuk mengukur dampak pembangunan bidang pendidikan. Isu-isu yang perlu ditangani antara lain peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain terjadi karena:

1. Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas;
2. Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta;
3. Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal.

Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Daya Saing Wilayah (Sumber Daya Manusia)

Masih rendahnya pendidikan angkatan kerja, khususnya masyarakat lokal, menjadi salah satu kendala utama dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini harus menjadi diantisipasi ke depannya agar pembangunan daerah menjadi lebih berkualitas melalui dukungan dari masyarakat maupun swasta. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih

memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja jugadipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, Provinsi Papua Tengah harus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai prioritas pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan saat ini memang memiliki progress positif, namun ke depan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan perlu dipertajam untuk menjaga relevansi penurunan masyarakat miskin sehingga tepat sasaran dan tepat guna.

Pada implementasinya upaya penanggulangan kemiskinan pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah harus memperhatikan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

3. Keamanan Wilayah

Wilayah Provinsi Papua Tengah masih memiliki konflik antar kelompok masyarakat. Konflik ini berdampak pada proses pembangunan jalan penghubung antar wilayah yang terhambat bahkan banyak beberapa ruas jalan yang tidak dapat dilalui dikarenakan menjadi titik pecahnya konflik masyarakat. Keamanan wilayah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini perlu ditingkatkan agar mengurangi angka konflik masyarakat serta dapat memberi keamanan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan mobilisasi antar wilayah. Hal ini diperlukan untuk mendukung strategi RPJMN 2020-2024 menurunkan harga pokok sebesar 50 persen.

4. Konektivitas Wilayah

Isu strategis berikutnya yaitu peningkatan pemerataan pembangunan mengenai konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua Tengah.

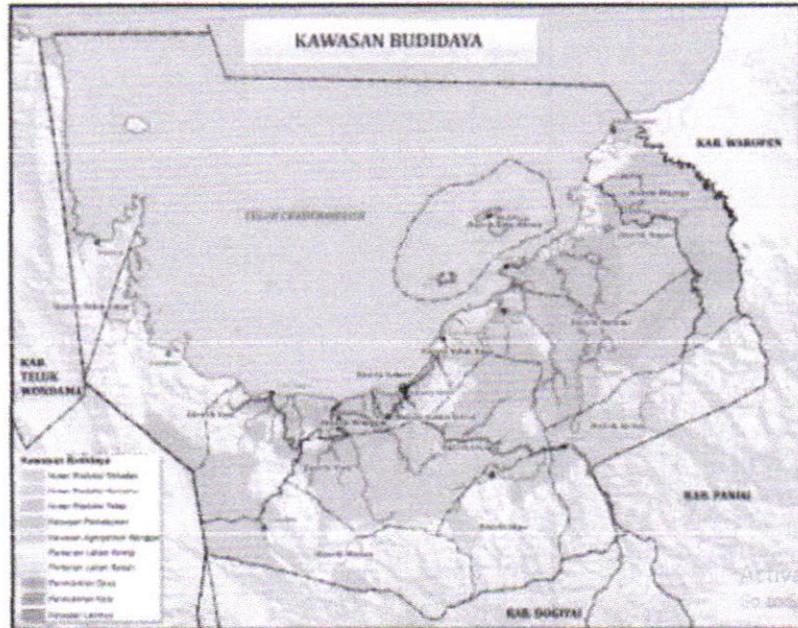
Kurang baiknya pembangunan infrastruktur mengenai konektivitas antar wilayah dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat yang berdampak pada adanya aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Maka ke depan harus dicari terobosan pengembangan konektivitas wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

Selain permasalahan pembangunan, perlu memahami isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Papua Tengah dalam pencapaian pembangunan daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan urusan di provinsi DOB. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang didapat dari masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 isu strategis yang diangkat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Tengah yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang terjadi di seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi.

Tabel 5.2. Isu Strategis Aktual di Provinsi Papua Tengah

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pendukung
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar	Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan
		Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan
		Rendahnya konektivitas jaringan prasarana infrastruktur
2.	Daya Saing Wilayah	Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Papua
		Tingginya tingkat kemiskinan penduduk
3.	Keamanan Wilayah	Masih adanya konflik antara kelompok
		penanganan pengungsi akibat konflik

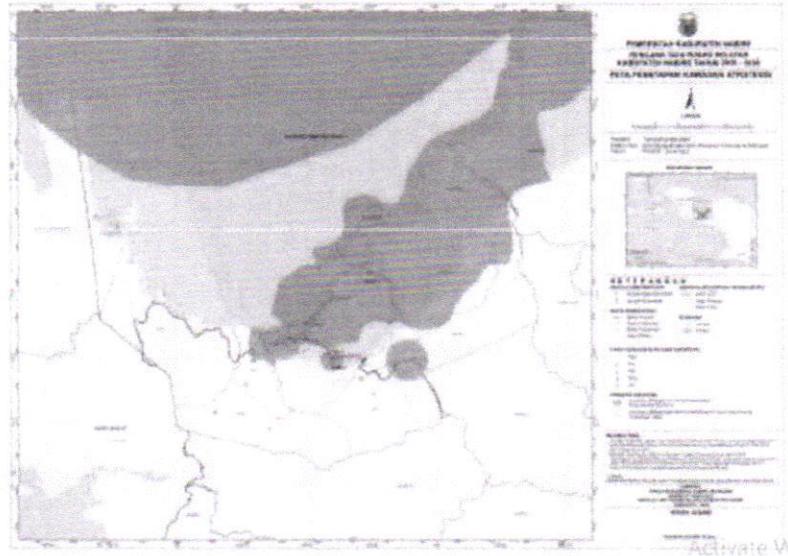
4.	Konektivitas Wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah(jalan, pelabuhan, bandara)
		Kebutuhan untuk mengaktifkan kembali pembangunan jalan trans nasional terhambat karena alasan keamanan



Sumber: RTRW Nabire, 2018-2038
Gambar 5.1. Peta Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Kabupaten Nabire terdiri dari:

- Komando Distrik Militer (Kodim) 1705 di Distrik Nabire;
- Pangkalan Angkatan Laut di Distrik Teluk Kimi;
- Markas Kompi Brimob di Distrik Teluk Kimi;
- Batalyon Raider 753/AVT di Distrik Nabire;
- Den Zipur 12 OHH di Distrik Nabire;
- Sub Den POM di Distrik Nabire;
- Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh distrik
- Kepolisian Resor Nabire (Polres) di Distrik Nabire; dan
- Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh distrik.



Sumber: RTRW Nabire, 2018-2038

Gambar 5.2. Peta Pengembangan Kawasan Strategis

Kemajemukan dalam agama yang ada di masyarakat Kabupaten Nabire membutuhkan sikap yang toleran dan nuansa rukun untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Data jumlah umat masing-masing agama, belum diperoleh data yang akurat, sehingga data yang disajikan di bawah ini masih perlu dikaji dan diteliti secara baik. Lebih jelasnya data jumlah umat masing-masing agama adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Menurut Distrik Agama Yang Dianut di Kabupaten Nabire Tahun 2022

No	Distrik (1)	Islam (2)	Kristen (3)	Katolik (4)	Hindu (5)	Buddha (6)	Lainnya (7)
1.	Uwapa	1780	1 373	1 780	-	20	
2.	Menou	2	1 756	810	-	-	
3.	Dipa	22	3 233	875	-	-	
4.	Yaur	234	713	315	-	-	
5.	Teluk Umar	11	518	163	-	-	
6.	Wanggar	5 027	1 802	785	87	-	

Distrik (1)	Islam (2)	Kristen (3)	Katolik (4)	Hindu (5)	Budha (6)	Lainnya (7)
7. Nabire Barat	6 605	3 227	5 923	151	55	
8. Nabire	34 073	39 811	10 563	217	139	
9. Teluk Kimi	3 155	1 038	327	24	-	
10. Napan	39	774	396	-	-	
11. Makimi	5 950	1 484	567	-	-	
12. Wapoga	-	633	217	-	-	
13. Kepulauan Moora	14	837	236	-	-	
14. Siriwo	103	3 458	468	-	-	
15. Yaro	3 950	1 482	454	48	-	
Jumlah/ Total						
2022	60 965	62 139	23 879	527	229	
2021	60 965	62 139	23 879	527	229	
2021	60 965	60 451	23 739	780	202	

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Nabire, 2023

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas pemeluk agama terbanyak di Kabupaten Nabire adalah Kristen Protestan yaitu sebesar 62.139 jiwa.

Guna mendukung peningkatan iman dan taqwa perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Nabire tetap konsen dalam memberi bantuan pembangunan rumah/tempat ibadah.

Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Menurut Distrik Agama Yang Dianut di Kabupaten Nabire Tahun 2022

Distrik	Mesjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Uwapa	5	12	24	11	-	1
2. Menou	-	-	3	5	-	-
3. Dipa	-	-	4	7	-	-
4. Yaur	1	-	8	5	-	-
5. Teluk Umar	-	-	15	3	-	-
6. Wanggar	7	36	29	6	2	-
7. Nabire Barat	6	33	41	4	3	1
8. Nabire	30	21	128	3	1	-
9. Teluk Kimi	8	3	27	1	-	-
10. Napan	1	-	11	1	-	-
11. Makimi	4	31	26	4	-	-
12. Wapoga	-	-	9	1	-	-
13. Kepulauan Moora	-	-	4	1	-	-
14. Siriwo	2	1	8	5	-	-
15. Yaro	2	6	12	4	2	1
Jumlah/ Total 2022	66	143	349	61	8	3

Sumber: Kementrian Agama Kabupaten Nabire, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 349 gereja protestasn, 143 musholla, 66 masjid, 61 gereja katolik, 8 pura dan 3 vihara di Kabupaten Nabire.

Distrik	Masjid	Mushola	Gereja	Gereja	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2021	65	143	349	56	8	3
2021	59	143	328	58	8	3

5.3 ANALISIS DAMPAK SOSIAL BUDAYA POLITIK DAN KEAMANAN

Dampak sosial budaya politik dan keamanan baik langsung maupun tidak langsung atas pembangunan :

1. Meningkatnya aktivitas perekonomian secara langsung yaitu dalam bidang perdagangan, jasa, perbankan, asuransi, industri, penginapan dan restaurant, minyak dan gas, ketenagaan listrik, air minum dan air bersih dan lainnya.
2. Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan sejak pembangunan. Diantaranya kebutuhan tenaga bangunan, ahli keteknikan, ekonomi dan sosial, pegawai pemerintahan baik ASN maupun honorer, pegawai dan karyawan swasta.

3. Meningkatnya aktivitas sosial dan keagamaan
4. Meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman masyarakat khususnya pegawai baik pemerintahan maupun swasta
5. Berkembangnya bangunan baru seperti gedung penginapan/ hotel, restoran, pertokoan, rumah ibadah dan lainnya
6. Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, jalan, jembatan, listrik, penyediaan air bersih, jembatan, sarana olah raga dan lainnya.
7. Meningkatnya bauran suku dan agaman sehingga akan meningkatkan kemajemukan budaya dan agama.

BAB IV

ASPEK TATA PEMERINTAHAN

6.1. PENDAHULUAN

Provinsi Papua Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah serta sebagai Pemerintah Daerah Otonomi Baru yang dimulai pada tahun 2022. Sehubungan dengan terbentuknya Provinsi Papua Tengah, maka pemerintah provinsi telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dalam penyusunan RPD, pemerintah Provinsi Papua Tengah menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan RPD tersebut salah satu point penting yang harus diperhatikan adalah rencana pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai upaya penyelenggaraan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan menjunjung kearifan lokal, budaya dan melayani kepentingan negara dan masyarakat. hal ini sesuai dengan Visi Provinsi Papua Tengah yaitu Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik serta Misi Provinsi Papua Tengah yaitu:

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

6.2. PERANGKAT DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah

Provinsi Papua Tengah menyusun struktur organisasi dan perangkat organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Struktur ataupun perangkat pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Perencanaan Pembentukan Perangkat Daerah tersebut akan berkaitan erat dengan rencana pembangunan kantor dan fasilitas pendukungnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kebutuhan lahan perkantoran untuk rencana pembangunan dan penganggaran baik penganggaran pengadaan lahan maupun untuk pembangunan gedung dan fasilitas pendukungnya.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Selanjutnya Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan

Terkait dengan ketentuan SKPD atau dinas maka PP No. 18 Tahun 2016 pada pasal 14-15 mengatur hal-hal berikut:

- a. Dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe yaitu terdiri atas:
 - 1) Dinas Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi dengan beban kerja yang besar;
 - 2) Dinas Daerah provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - 3) Dinas Daerah provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi dengan beban kerja yang kecil.
- b. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:
 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar terdiri atas:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

d. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;

e. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi.

f. Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.

g. Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja Daerah provinsi. Pemerintah provinsi juga dapat membentuk unit-unit dalam rangka efektifitas dan peningkatan layanan kepada masyarakat seperti:
- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
 - (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
 - (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
 - (6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 401 (empat ratus satu).
 - (7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan

memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. Keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

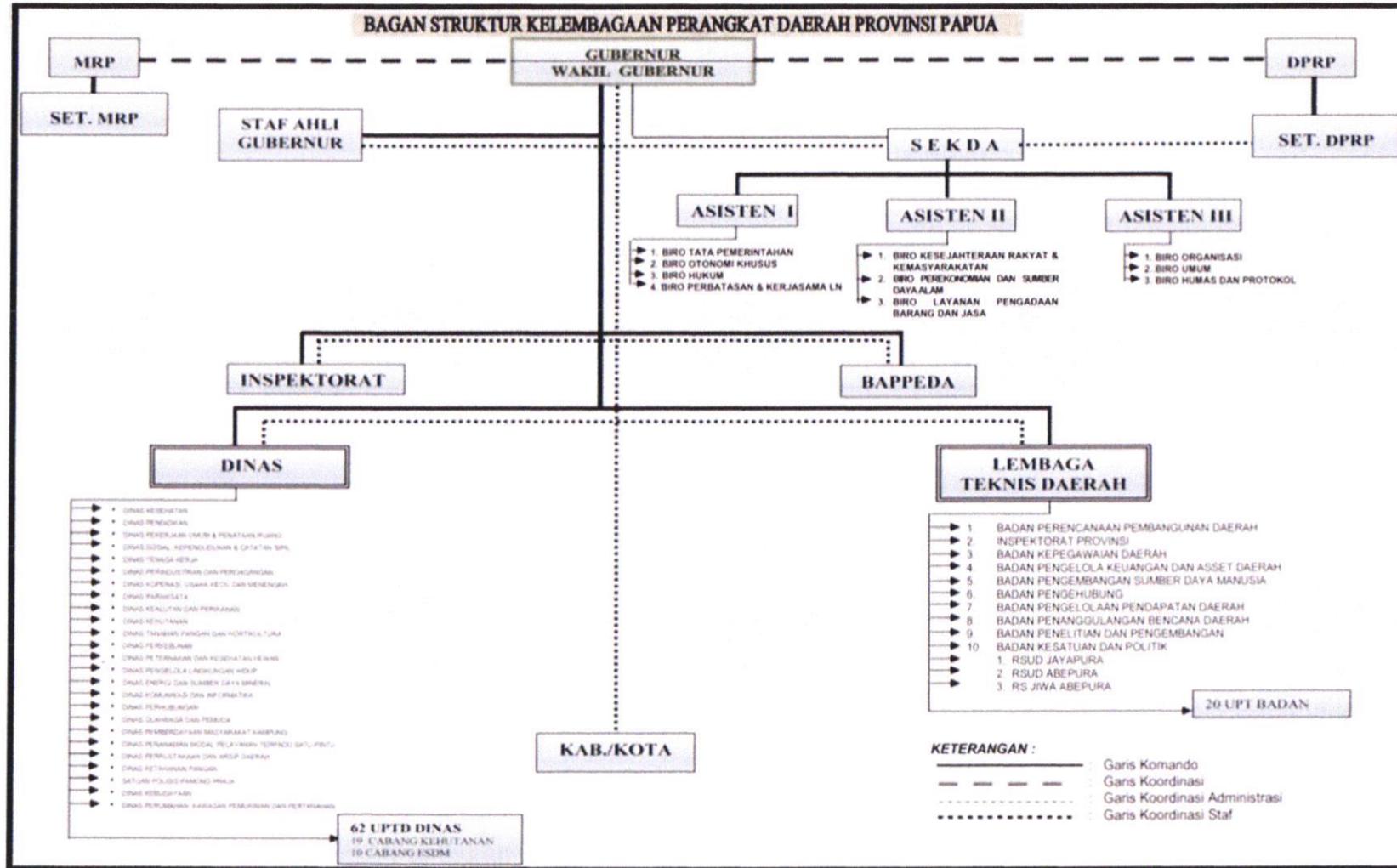
Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- 1) Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- 2) Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 4) Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- 5) Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 6) Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- 7) Perpustakaan dan kearsipan

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas mencerminkan Urusan Pemerintahan

yang digabung. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) sub bagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi pembangunan tersebut. Sebagai rujukan dalam pembentukan struktur pemerintahan Provinsi Papua Barat, maka struktur Pemerintah Provinsi Papua lebih sesuai secara kultur maupun geografis. Struktur Pemerintah Provinsi Papua dapat dilihat Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III dan 25 SKPD atau Dinas. Selain itu ada juga unsur Lembaga Teknis dan Instansi Vertikal serta Lembaga Legislatif atau DPRD. Bagan struktur dan lembaga diluar struktur tersebut tentunya memiliki konsekuensi masuk dalam perencanaan pembangunan gedung ataupun fasilitas pendukungnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap luas area pengadaan tanah dan rencana pembangunan yang sangat menentukan anggaran biaya.



Gambar 6.1. Struktur Pemerintahan Provinsi

BAB VII BIAYA DAN MANFAAT PEMBANGUNAN

7.1. LUAS TANAH PEMBANGUNAN

Mengacu pada data master plan Pembangunan Komplek Kantor Provinsi Papua Tengah, luas tanah yang dibutuhkan kurang lebih 300 hektar atau 3.000.000 m². Lokasi rencana Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah terletak di :

Kabupaten: Nabire

Distrik: Wanggar

Kelurahan/Kampung: Wanggar Makmur

Titik koordinat 1: 3°27' 54.90"S - 135°22' 46.96"E

Titik koordinat 2: 3°27' 54.77"S-135°23' 37.35"E

Titik koordinat 3: 3°25' 57.44"S-135°23' 37.34"E

Titik koordinat 4: 3°25' 57.54"S-135°22' 46.89"E



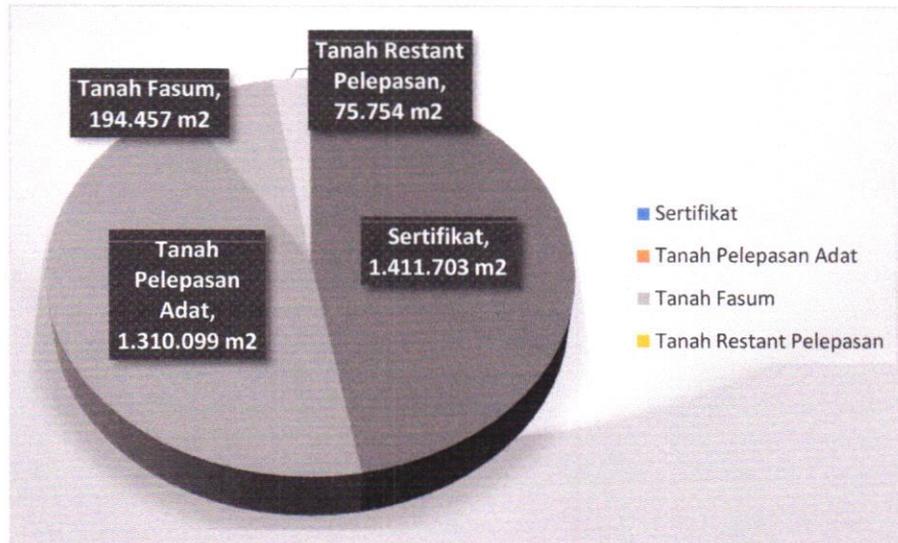
Sumber ; google.map

Gambar 7.1. Peta Lokasi Pembangunan Komplek Kantor

7.2. STATUS DAN ALAS HAK PENGUASAAN TANAH

Rencana Pembangunan Komplek Kantor Provinsi Papua Tengah berdasarkan perkiraan awal rencana pengadaan tanah adalah seluas 300 Ha atau 3.000.000 m². Namun setelah dilakukan pengukuran detail dengan menggunakan alat ukur geodetic dan pendataan awal tanah adalah seluas total ± 2.992.013,05 m². Terdapat beberapa jenis status penguasaan lahan, yang dominan adalah status lahan dengan kepemilikan sertifikat seluas 1.411.702,93 m² (47,18%), tanah pelepasan adat seluas 1.310.098,81 m² (43,79%), tanah restant pelepasan seluas 75.754,28 m² (2,53), serta tanah

fasilitas umum seluas 194.457,03 m² (6.5%).

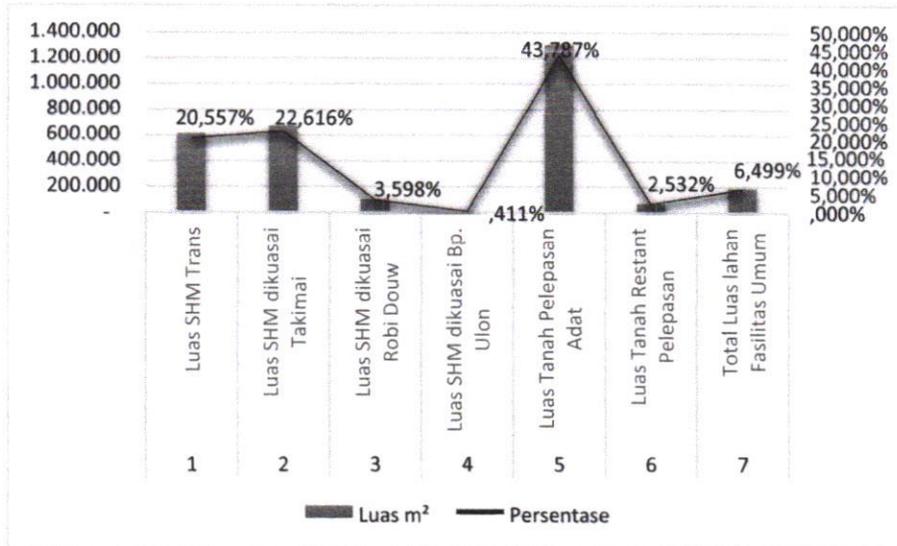


Sumber ; data diolah

Gambar 7.2. Alas Hak Penguasaan Tanah Pembangunan Komplek Kantor

Alas hak penguasaan tanah Pembangunan Komplek Kantor Provinsi Papua Tengah terdiri dari Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan jumlah 255 bidang (47.18%), tanah pelepasan adat meliputi 51 bidang (43.79%), tanah restant pelepasan dengan jumlah 19 bidang (2.53%) dan tanah fasilitas umum sebesar 6.50%. Sehingga total bidang yang digunakan untuk rencana pembangunan Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah 325 bidang.

Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan berdasarkan luas kategori kelompok kepemilikan tanah yang digunakan sebagai rencana pembangunan Kantor Provinsi Papua Tengah adalah tanah sertifikat hak milik yang terdiri dari SHM Trans seluas 615.066,54 m², SHM (dikuasai Takimai) seluas 676.669,56 m², SHM (dikuasai Robi Douw) seluas 107.662,53 m², SHM (dikuasai Bp Ulon) seluas 12.304,30 m², tanah pelepasan adat seluas 1.310.098,81 m², tanah restant pelepasan seluas : 75.754,28 m² dan tanah fasilitas umum seluas 194.457,03 m².



Sumber ; data diolah

Gambar 7.3. Kategori Kepemilikan Tanah Untuk Pembangunan Komplek Kantor Provinsi Papua Tengah



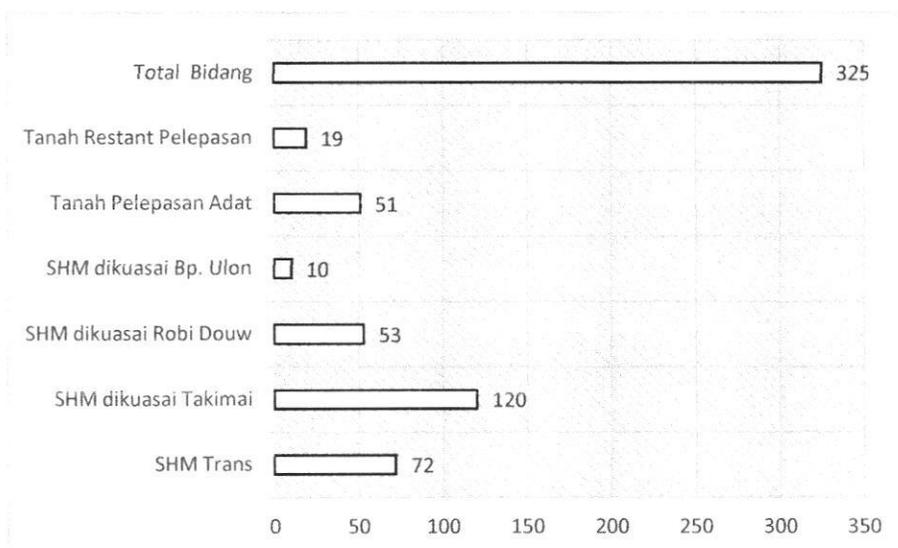
Sumber ; data diolah

Gambar 7.4. Bidang Tanah Pembangunan Komplek Kantor

7.3. PERUNTUKAN LAHAN

Rencana Pembangunan Komplek Kantor Provinsi Papua Tengah secara garis besar eksisting lahan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sedangkan pada penggunaannya, lahan direncanakan setidaknya terdiri 2 jenis yaitu untuk permukiman dengan rencana pemanfaatan rumah tinggal dan direncanakan untuk lahan terbuka dengan pemanfaatan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kelompok kepemilikan dan alas haknya, jumlah total bidang tanah yang digunakan sebagai rencana pembanguna kantor provinsi sebanyak kurang lebih 325 bidang, yang terdiri dari alas hak kepemilikan (SHM Trans) : 72 bidang, SHM dikuasai Takimai : 120 bidang, SHM dikuasai Robi Douw : 53 bidang, SHM dikuasai Bp Ulon : 10 bidang, tanah pelepasan adat : 51 bidangdan tanah restant pelepasan sebanyak 19 bidang.

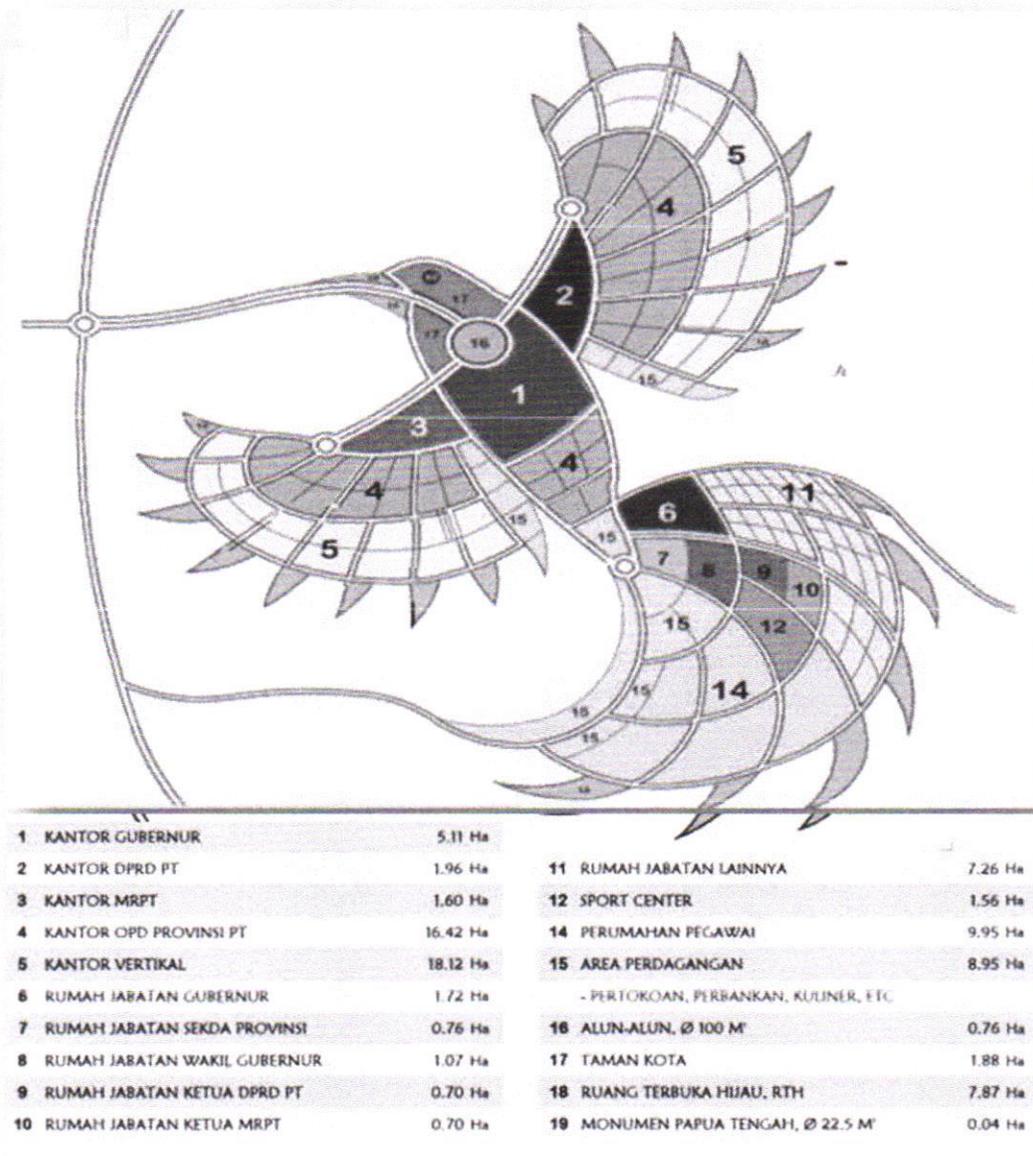


Sumber : data diolah

Gambar 7.5. Jumlah Bidang Tanah Sesuai Kategori Kelompok

7.4. PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG KANTOR

Konsep masterplan Pembangunan Kantor Provinsi Papua Tengah berada pada lahan seluas kurang lebih 300 hektar di Kelurahan/Desa Wanggar Makmur, Kecamatan Wanggar, Kabupaten Nabire dengan tata ruang perencanaan berikut :



Sumber ; Masterplan Provinsi Papua Tengah (for DPPT)

Gambar 7.6 Pemanfaatan Ruang Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah

7.5. ESTIMASI NILAI INVESTASI BANGUNAN PERKANTORAN PROVINSI PAPUATENGAH

Estimasi nilai investasi Pembangunan Kantor Provinsi Papua Tengah terdiri dari pengadaan lahan dan pematangan lahan, pembangunan perkantoran provinsi, pembangunan rumah jabatan serta pembangunan gedung kantor vertikal dengan estimasi biaya sebagai berikut :

Tabel 7.1 Estimasi Biaya Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

NO.	ITEM	SATUAN		HARGA SATUAN TAHUN KE-1	PERKIRAAN HARGA TAHUN KE-1	
I. LAHAN						
1	PENGADAAN LAHAN	300.00	Ha	Rp 250,000,000.00	Rp 75,000,000,000.00	
2	PEMATANGAN LAHAN	300.00	Ha	Rp 167,000,000.00	Rp 50,100,000,000.00	
					Rp 125,100,000,000.00	
II. PEMBANGUNAN PERKANTORAN PROVINSI						
1	PEMBANGUNAN JALAN PRIMER (2 jalur)	11.20	km	Rp 5,000,000,000.00	Rp 56,000,000,000.00	
2	PEMBANGUNAN JALAN SEKUNDER	15.00	km	Rp 5,000,000,000.00	Rp 75,000,000,000.00	
3	PEMBANGUNAN JEMBATAN 2x20 M'	40.00	M'	Rp 550,000,000.00	Rp 22,000,000,000.00	
4	PEMBANGUNAN FASILITAS DAN AKSESORIS JALAN	26.20	km	Rp 900,000,000.00	Rp 23,580,000,000.00	
5	PEMBANGUNAN FASILITAS ENERGI LISTRIK	26.20	km	Rp 1,700,000,000.00	Rp 44,540,000,000.00	
6	PEMBANGUNAN FASILITAS JARINGAN SMART CITY	26.20	km	Rp 1,800,000,000.00	Rp 47,160,000,000.00	
7	PEMBANGUNAN DRAINASE PERKANTORAN	52.40	km	Rp 1,450,000,000.00	Rp 75,980,000,000.00	
8	PEMBANGUNAN MONUMEN PAPUA TENGAH	1.00	LS	Rp 3,000,000,000.00	Rp 3,000,000,000.00	
9	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GUBERNUR	1.00	UNIT	25,000.00 m2	Rp 17,500,000.00	Rp 437,500,000,000.00
10	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPRPT	1.00	UNIT	8,000.00 m2	Rp 17,500,000.00	Rp 140,000,000,000.00
11	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR MRPT	1.00	UNIT	8,000.00 m2	Rp 17,500,000.00	Rp 140,000,000,000.00
12	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS DAN BADAN	22.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 660,000,000,000.00
13	PEMBANGUNAN RTH DAN PENGHIJAUAN KEMBALI	1.00	LS	78,700.00 m2	Rp 300,000.00	Rp 23,610,000,000.00
					Rp 1,748,370,000,000.00	
III. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN						
1	GUBERNUR	1.00	UNIT	800.00 m2	Rp 22,500,000.00	Rp 18,000,000,000.00
2	WAKIL GUBERNUR	1.00	UNIT	400.00 m2	Rp 22,500,000.00	Rp 9,000,000,000.00
3	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	1.00	UNIT	250.00 m2	Rp 22,500,000.00	Rp 5,625,000,000.00
4	KETUA DPR PT	1.00	UNIT	250.00 m2	Rp 22,500,000.00	Rp 5,625,000,000.00
5	KETUA MR PT	1.00	UNIT	250.00 m2	Rp 22,500,000.00	Rp 5,625,000,000.00
6	RUMAH JABATAN LAINNYA	22.00	UNIT	120.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 39,600,000,000.00
7	PERUMAHAN PEGAWAI	85.00	UNIT	70.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 89,250,000,000.00
					Rp 172,725,000,000.00	
IV. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR VERTIKAL						
1	GEDUNG KANTOR KEUANGAN	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
2	GEDUNG KANTOR PAJAK	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
3	GEDUNG KANTOR BEA CUKAI	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
4	GEDUNG KANTOR IMIGRASI	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
5	GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
6	GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
7	GEDUNG KANTOR POLDA	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
8	GEDUNG KANTOR KODAM	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
9	GEDUNG KANTOR BRIMOB	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
10	GEDUNG KANTOR BPS	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
11	GEDUNG KANTOR PLN	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
12	GEDUNG KANTOR TELKOM	1.00	UNIT	2,000.00 m2	Rp 15,000,000.00	Rp 30,000,000,000.00
					Rp 360,000,000,000.00	
TOTAL INVESTASI					Rp 2,406,195,000,000.00	
<i>Terbilang : Dua Trilyun Empat Ratus Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah</i>						

Sumber ; Masterpan Provinsi Papua Tengah (for DPPT)

7.6. DAMPAK PEMBANGUNAN

a. Dampak Pembangunan Bagi Masyarakat

Dampak positif pembangunan Komplek Kantor Pemerintah bagi masyarakat antara lain meningkatkan aksesibilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Komplek Kantor pemerintah, masyarakat akan lebih mudah dan cepat dalam memperoleh akses ke beberapa layanan publik yang mereka butuhkan. Dampak positif lainnya adalah terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman untuk aktivitas pemerintah, sehingga bisa membantu meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, dampak negatif pembangunan kompleks Kantor pemerintah bagi masyarakat dapat terjadi jika pengelolaan pembangunan tidak terintegrasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dilakukan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pembangunan kompleks Kantor pemerintah juga dapat menyebabkan adanya penggusuran terhadap masyarakat yang sebelumnya mendiami daerah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan kompleks Kantor dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah semata.

b. Dampak Pembangunan Bagi Negara

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Kesehatan dalam pengelolaan keuangan negara mampu mencapai keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh berjalannya pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial tentu saja bisa menekan angka pengangguran, kemiskinan, maupun kesenjangan ekonomi masyarakat. Hal tersebut bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, baik dari sisi peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) maupun pendapatan per kapita penduduk di negara tersebut.

Dampak positif yang bisa diciptakan dari adanya pembangunan yang baik di suatu negara antara lain :

- Terwujudnya sebuah jaminan akan kehidupan sosial yang lebih baik
- Meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi

negara yang dapat dinikmati oleh setiap orang

- Semakin meningkat dan lancarnya mobilitas dalam melaksanakan
- kegiatan sosial-ekonomi
- Perbaikan lingkungan hidup yang menjadi lebih baik
- Secara bertahap, kedepan akan mendongkrak tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun dampak negatif yang mungkin saja terjadi dalam pembangunan ekonomi yang tidak terkendali, diantaranya :

- Lahan-lahan hijau yang semakin berkurang dikarenakan pembangunan infrastruktur yang berlebihan
- Timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan
- Lahan pertanian yang berkurang karena penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian jadi berkurang
- Timbulnya masalah-masalah sosial karena adanya urbanisasi di perkotaan

c. Dampak Sosial

Disamping manfaat yang merupakan dampak positif dari pembangunan Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, rencana pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang bersifat negative bagi masyarakat yang perlu diantisipasi penanganannya antara lain :

- Hilangnya mata pencaharian masyarakat, karena lahan usahanya yang berbasis lahan (pertanian, perkebunan dll) karena lahannya terkena pembangunan.
- Hilangnya mata pencaharian/kegiatan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) masyarakat di lokasi eksisting pembangunan Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah

Dampak-sosial-ekonomi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah melalui :

- Identifikasi pihak yang terkena dampak secara langsung dan jenis usaha/kegiatan yang dilaksanakan
- Melaksanakan program atau kegiatan-kegiatan pembinaan usaha alternatif, termasuk kemungkinan alih usaha.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Y. Manurung', written over a blue ink stamp that partially obscures the text 'KEPALA BIRO HUKUM'.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002